

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

MASA PERSIDANGAN III

TANGGAL : 11,12 dan 27 SEPTEMBER 2013



TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212**

Selanjutnya dengan menggunakan "Ekwidit" terpasang
pada 11.02.2013, hasil pengujian DPB2 saya dapatkan data dan
terdapat hasil sebagai berikut.

(Kelas 1 dan 2 KKM)

Hasil pengujian yang tertera sebagai berikut.

Selanjutnya kita akan lihat hasil yang tertera pada "Ekwidit"
yang tertera pada hasil pengujian DPB2. Hasil pengujian yang tertera
adalah sebagai berikut.

Hasil pengujian yang tertera pada "Ekwidit" yang tertera pada hasil
pengujian yang tertera.

Hasil pengujian yang tertera pada "Ekwidit" yang tertera pada hasil
pengujian yang tertera.

Hasil pengujian yang tertera pada "Ekwidit" yang tertera pada hasil
pengujian yang tertera.

Hasil pengujian yang tertera sebagai berikut.

Hasil pengujian yang tertera pada "Ekwidit" yang tertera pada hasil
pengujian yang tertera.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013**

Hari : SENIN
Tanggal : 11 September 2013
Waktu : 09.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
1. Pembukaan;
 2. Penjelasan Bupati Rembang tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013;
 3. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : **Ir. H. SUNARTO**
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : **Drs. ACHMAD MUALIF**
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 5 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 4 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 3 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 2 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 4 orang
Jumlah	: 31 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Demokrat	: - orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 3 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 3 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 2 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 3 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 1 orang
Jumlah	: 14 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : Ir. H. SUNARTO**

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

- | | |
|-------------------|--|
| Yang terhormat | Bupati dan Wakil Bupati Rembang |
| Yang saya hormati | Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang. |
| Yang saya hormati | Ketua Pengadilan Negeri Rembang. |
| Yang saya hormati | Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Rembang |
| Yang saya hormati | Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang. |
| Yang saya hormati | Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang |
| Yang saya hormati | Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang |
| Yang saya hormati | Pimpinan Partai Politik, LSM, para wartawan dan semua undangan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. |

Mengawali Rapat Paripurna hari ini sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas limpahan nikmat, rahmah dan hidayahNYA, sehingga kita masih diberikan kesempatan mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat wal afiat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013. Mudah-mudahan dalam pembahasan Raperda Perubahan sampai selesai nanti, dapat berjalan lancar dan selalu memperhatikan kondisi dan kepentingan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Rembang .

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Sesuai dengan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 9 September 2013, bahwa Rapat Paripurna hari ini merupakan Rapat Paripurna pertama (I) dari 3 (tiga) Rapat Paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013. Adapun susunan acara selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati Rembang tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013;
3. Penutup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang berdasarkan disebutkan bahwa *"Rapat Paripurna DPRD memenuhi kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah"*

Dan menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 31 orang. Dengan demikian, maka Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucapkan "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 11.00 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk Palu 3 Kali)

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Selanjutnya kita masuki acara yang kedua, yaitu " *Penjelasan Bupati tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013*".

Kepada Saudara Bupati , yang kali ini diwakili oleh Sdr. Wakil Bupati dipersilahkan.

**== PENJELASAN BUPATI TENTANG RAPERDA
PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG T.A 2013 ==**

(Dibacakan oleh Wakil Bupati Rembang Sdr. Abdul Hafidz)

Terima kasih saya sampaikan kepada Sdr. Wakil Bupati yang telah menyampaikan Penjelasan Bupati tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013, sebagaimana yang telah diajukan ke DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat

Demikian acara Rapat Paripurna Pertama (I) dalam Pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013 hari ini telah sampai pada penghujung acara, selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan Rapat Fraksi pada hari ini juga untuk menyusun Pemandangan Umum Fraksi sebagai bahan untuk Pelaksanaan Rapat Paripurna Kedua (II) tanggal 12 September 2013 besok pagi dengan agenda pokok Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan

APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 dan Jawaban Bupati
atas Pemandangan Umum Fraksi .

Akhirnya terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas
segala kekurangan selama saya memimpin rapat pada hari ini. Dan
dengan mengucap "*Alhamdulillahillobbibil 'alamiin*" tepat pukul
11. 20 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk Palu 3 Kali)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA

Ir. H. SUNARTO

SEKRETARIS

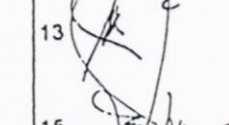
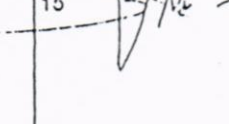
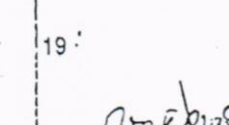
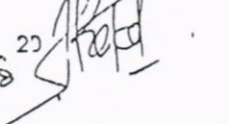
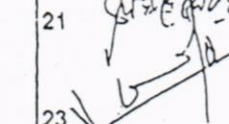
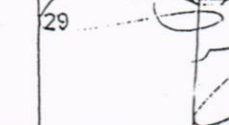
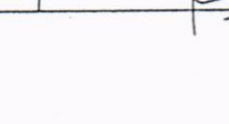
Drs. ACHMIAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN :RISALAH RAPAT PARIPURNA I DPRD
KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS
RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD
dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Teks Penjelasan Bupati tentang Pengantar
Nota Keuangan raperda tentang Perubahan
APBD Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2013.

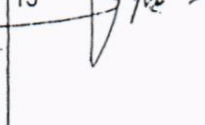
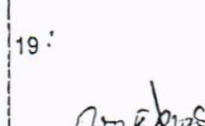
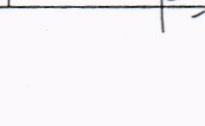
DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

HARI/TANGGAL : RABU, 11 SEPTEMBER 2013
PUKUL : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<u>FRAKSI DEMOKRAT</u>				
1	H. H. SUNARTO	Ketua		
2	H. ISLAHUDDIN	Anggota		
3	H. HARNO, SE	Anggota		
4	GUNASIH, SE	Anggota		
5	HAIRI ATUS SOLICHAH, SE	Anggota		
6	Hj. HIKMAH PURNAMIWATI	Anggota		
7	EDI KARTONO, S Pd	Anggota		
8	YULIANI ARI SETYANINGSIH, SE	Anggota		
<u>FRAKSI PARTAI GOLKAR</u>				
9	CATUR WINANTO, SH	Wakil Ketua		
10	H. ISMARI	Anggota		
11	SUCI RAHAYU, SH	Anggota		
12	JOKO SOESILO	Anggota		
13	GATOT PAERAN, SH MSI	Anggota		
14	CHAIRUL MUTAKIM	Anggota		
15	CHAIRUL ANWAR, S Sos	Anggota		
16	SRI REJEKI, SH	Anggota		
<u>FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN</u>				
17	H. MAJID KAMIL MZ	Wakil Ketua		
18	H. SA'DULLAH	Anggota		
19	H. M. MURSYID, ST	Anggota		
20	H. HAKAM, SH	Anggota		
21	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
22	KODRIYAH, S Pd	Anggota		
23	H. YUDIANTO, SH	Anggota		
<u>FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA</u>				
24	SUWANTO	Wakil Ketua		
25	MUTHAMMAD ASNAWI, S Pd	Anggota		
26	H. SUTARYO SHOLEH	Anggota		
27	PUJI SANTOSO, SP, MHI	Anggota		
28	H. M. NOOR HASAN, SH	Anggota		
29	H. SHOLEH, BA	Anggota		
30	H. M. SHODIQIN YASIR	Anggota		

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA 1 DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

HARI/TANGGAL : RABU, 11 SEPTEMBER 2013
PUKUL : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<u>FRAKSI DEMOKRAT</u>				
1	Ir. H. SUNARTO	Ketua		
2	H. ISLAHUDDIN	Anggota		
3	H. HARNO, SE	Anggota		
4	GUNASIH, SE	Anggota		
5	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE	Anggota		
6	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
7	EDI KARTONO, S.Pd	Anggota		
8	YULIANI ARI SETYANINGSIH, SE	Anggota		
<u>FRAKSI PARTAI GOLKAR</u>				
9	CATUR WINANTO, SH	Wakil Ketua		
10	H. ISMARI	Anggota		
11	SUCI RAHAYU, SH	Anggota		
12	JOKO SOESILO	Anggota		
13	GATOT PAERAN, SH MSI	Anggota		
14	KHAIRUL MUTAKIM	Anggota		
15	CHAIRUL ANWAR, S.Sos	Anggota		
16	SRI REJEKI, SH	Anggota		
<u>FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN</u>				
17	H. MAJID KAMIL MZ	Wakil Ketua		
18	H. SA'DULLAH	Anggota		
19	H.M. MURSYID, ST	Anggota		
20	H. HAKAM, SH	Anggota		
21	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
22	KODRIYAH, S.Pd	Anggota		
23	H. YUDIANTO, SH	Anggota		
<u>FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA</u>				
24	SUWANTO	Wakil Ketua		
25	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota		
26	H. SJUTARYO SHOLEH	Anggota		
27	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota		
28	H.M. NOOR HASAN, SH	Anggota		
29	H. SHOLEH, BA	Anggota		
30	H.M. SHODIQIN YASIR	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	<u>FRAKSI PDI PERJUANGAN</u>			
31	JASMANI	Anggota	31	
32	SUPRIHADI	Anggota	32	
33	SUMARSIH	Anggota	33	
34	RIDWAN, SH, MH	Anggota	34	
35	A. MASKUR RUKHANI	Anggota	35	
	<u>FRAKSI AMANAT NASIONAL</u>			
36	JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE	Anggota	36	
37	H. MOH. NURHASAN, SH	Anggota	37	
38	MOH. IMAM ZARKASI	Anggota	38	
39	SUKARMAIN	Anggota	39	
40	SAHNINGSIH, SE	Anggota	40	
	<u>FRAKSI BINTANG KEADILAN</u>			
41	dr. ROCHIMAD ISMAINI	Anggota	41	
42	ACHMAD ZAMHURI	Anggota	42	
43	MUNTUHID, SH	Anggota	43	
44	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	44	
45	DILIAN RAHWENI DEWI	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA
H. H. SUNARTO

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

HARI/TANGGAL : RABU, 11 SEPTEMBER 2013
PUKUL : 09.30 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. MOCH SALIM	Bupati Rembang	1.
2.	H. ABDUL HAFIDZ	Wakil Bupati Rembang	2.
3.	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	3.
4.		Kejaksaan Negeri Rembang	4.
5.	Albertus Usman	Pengadilan Negeri Rembang	5.
6.	Kur Sutiyasa	Dandim 0720 Rembang Kastim	6.
7.	Suhartimin	Kepolisian Resort Rembang / AKP	7.
8.		Pengadilan Agama Kab Rembang	8.

SEKRETARIS DPRD KAB REMBANG


Drs. ACHMAD MUALIE
NIP. 19620804 198803 1 011

COMMITTEE REPORT

OF THE SENATE

ON THE

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF

THE

LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A

RESOLUTION

PASSED

AT THE

SESSION

OF THE

SENATE

IN THE

YEAR

1881



DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

HARI/TANGGAL : RABU, 11 SEPTEMBER 2013
 PUKUL : 09.30 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	H. Agus Kaelm	1
2	CAMAT KALIORI	M. Mustholik	2
3	CAMAT SUMBER	HERMONO	3
4	CAMAT SULANG		4
5	CAMAT BULU	SUSANTORO	5
6	CAMAT PAMOTAN	M. Wiyono	6
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE	Kurnadi	8
9	CAMAT LASEM	Kekun P	9
10	CAMAT PANCUR		10
11	CAMAT SEDAN		11
12	CAMAT SLUKE	Subagyo	12
13	CAMAT KRAGAN	Maslah	13
14	CAMAT SARANG	Eddy Kertawanto	14

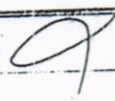
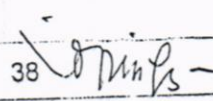
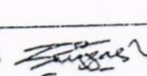
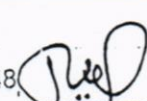
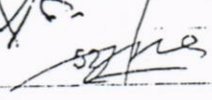
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG


Dr. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

HARI/TANGGAL : RABU, 11 SEPTEMBER 2013
PUKUL : 09.30 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Suganto	SA.B	1
2	STAF AHLI BUPATI	Wartono	—	2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA	K		6
7	ASISTEN III SEKDA	A. Fawati	AB. III	7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Akhmadudin	Kabag	8
9	BAG. HUKUM	Belang H. H. V	Belang	9
10	BAG. HUMAS	Pratomo	Humas	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Gantoro		11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	Sulhono	Kabag	12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Abdullah	Bag. Kese	13
14	BAG. ADM. KEUANGAN	Tri Hono		14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	End. Sulhono		15
16	BAG. UMUM	Suail		16
17	DPPKAD	Musirin		17
18	INSPEKTORAT	FAHRUDIN	INSPEKTUR	18
19	BAPPEDA			19
20	BPMPKB	HGATIMI	SEKRET	20
21	BKD	ADANI	Sek. Umum	21
22	BKP & P4K	Wahyuni	Rektor	22
23	BPPD	J. H. H. H.	V. L. L.	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	M. G. H.	Kes. Bg	24
25	DINAS KESCIATAN			25
26	DINAS PENDIDIKAN			26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	M. K. H.	Kad. K. H.	27
28	DINTANHUT	S. H. H.	K. H. H.	28
29	DINLUTKAN	PAMUDJI	Kabid	29
30	DININURKOMINFO	S. H. H.	K. H. H.	30
31	DINAS DUKCAPIL	M. D. H.	Kad. K. H.	31
32	DINSOSNAKERTRANS	H. H. H.	Kadis	32
33	DINBUUDIPARIWISATA			33

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
34	DINAS ENERGI & SDM	AGUS SUPRIYANTO	Ka	34 
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Rustiyanto	Sub	35 
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS			36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP			37
38	KANTOR PPT	Sri Supriyanti	KAPT	38 
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	Agus Supriyanto	PLUD	39 
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41
42	P D A M	EUSEWAHID H	Dir	42 
43	PERCETAKAN DAERAH	SANGGA CHOMBING	Direktur	43 
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	BKK LASEM			47
48	R B S J	Priestijo		48 
49	B P N KAB. REMBANG			49
50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	MUSSTHOFA		50 
51	DIPENDA PROPINSI	XUDI		51 
52	BPS KAB. REMBANG	M. SAICHUDIN	Ka.	52 
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KPU KAB. REMBANG			57
58	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			58
59	KANTOR POS DAN GIRO			59
60	TELKOM REMBANG			60
61	PLN CAB. REMBANG			61
62	PANWASLU KAB. REMBANG			62
63				63
64				64
65				65
66				66
67				67
68				68
69				69
70				70

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
71	Ali Anwar PA	Ali Anwar	Wk. Keten	71
72	SUNARMUS	POLRES		72
73	TP PKK	A. Anwar		73
74		Agus W	Staf PP G	74
75	Dhimas Setor	Dhimas	Adc. watur	75
76	ins. Suprayanto	pludin o7ro		76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100
101				101
102				102

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KEMBANG



DR. AGHMAD MUALIF

NIP. 196208041208031011

KABUPATEN REMBANG



PENGANTAR

NOTA KEUANGAN

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TAHUN ANGGARAN

2013

THE NEW YORK

NOTA REVISOR

REVISOR REVISOR REVISOR REVISOR REVISOR

REVISOR REVISOR REVISOR REVISOR REVISOR

REVISOR REVISOR

REVISOR REVISOR



BUPATI REMBANG

PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

- Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;
- Yang saya hormati, Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Yang saya hormati, Sdr. Wakil Bupati Rembang;
- Yang saya hormati, Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
- Yang saya hormati, Sdr. Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, perkenankanlah saya mengajak hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia serta hidayah Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013.

BUKTI KEMBARA

PERANGKAT KOTA KUALA LUMPUR
KAWASAN PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
KAWASAN PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
KAWASAN PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
KAWASAN PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Pada kesempatan ini, saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Rembang mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagai mitra kerja eksekutif, atas kerjasama yang harmonis selama ini, dan terima kasih juga kepada seluruh jajaran yang ada di Pemerintah Kabupaten Rembang yang telah bekerjasama baik langsung maupun tidak langsung ikut mensukseskan jalannya pemerintahan yang ada di Kabupaten Rembang. Dan kami senantiasa berdoa dan berharap agar berbagai momentum daerah, agenda-agenda daerah dapat kita tingkatkan terus dalam upaya pencapaian visi dan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang yang kita cintai ini.

Hadirin Sidang Dewan yang saya hormati

Rancangan Perubahan APBD yang kita awali dengan kesepakatan bersama melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013, penyusunannya berpedoman kepada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

Hadirin Sidang Dewan yang saya hormati,

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat;
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan asumsi dasar kebijakan umum APBD merupakan kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan dalam pembangunan. Perkembangan dinamika pelaksanaan pembangunan yang disertai dengan kebijakan fiskal yang diambil pemerintah, menuntut kita untuk lebih dapat mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan agar lebih efektif dan efisien. Menyikapi hal tersebut diperlukan perubahan perubahan dalam Kebijakan Umum Anggaran untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

Mengingat dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 telah terjadi perkembangan yang memenuhi syarat untuk disusunnya Perubahan APBD maka langkah-langkah yang akan ditempuh dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun anggaran 2013 meliputi :

1. Penyesuaian pendapatan daerah
2. Penyesuaian dan Pergeseran anggaran Belanja Daerah
3. Penyesuaian atas penerimaan Pembiayaan (SiLPA)

Berikut saya sampaikan perubahan pendapatan, belanja maupun pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 :

PENDAPATAN DAERAH

Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula sebesar Rp. 110.867.345.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.11.257.969.700,00 atau 10,15% sehingga menjadi Rp.122.125.314.700,00 dengan rincian:
 - Pajak Daerah sebesar Rp. 26.404.677.000,00
 - Retribusi Daerah sebesar Rp 25.681.195.000,00
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.4.977.434.000,00
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.65.062.008.700,00
2. Dana Perimbangan semula Rp. 734.617.850.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.4.733.686.000,00 sehingga menjadi Rp.729.834.164.000 dengan rincian:

- Dana Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak berkurang sebesar Rp.4.783.686.000,00 sehingga menjadi Rp.32.789.334.000,00
 - Dana Alokasi Umum (DAU) tetap sebesar Rp. 640.273.360.000,00
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) tetap sebesar Rp. 56.771.470.000,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.266.032.628.496,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.3.439.845.272,00 atau 1,13% dengan rincian
- ❖ Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.43.312.222.496,00
 - ❖ Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp.150.500.902.000,00
 - ❖ Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.72.219.504.000,00

Total seluruh Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 adalah Rp.1.117.992.107.196,00 atau naik sebesar Rp.9.914.128.972,00 (0,89 %) dari APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1.108.077.978.224,00

BELANJA DAERAH

Pada sisi Belanja Daerah terdapat kenaikan sebesar Rp.58.560.755.185,00

Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan sebesar Rp.5.463.417.989,00 dengan rincian kenaikan:

1. Kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp 4.664.103.989,00 karena adanya penyesuaian terhadap tunjangan profesi Guru PNSD.
2. Belanja Hibah naik sebesar Rp.3.301.142.000,00
3. Kenaikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp.607.625.000,00

Beberapa belanja yang mengalami penurunan atau dihapus antara lain :

1. Belanja Subsidi dihapus sebesar Rp 723.000.000,00
2. Penurunan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 1.836.453.000,00 karena penyesuaian terhadap posting anggaran beberapa SKPD dan pergeseran

Belanja Tidak Langsung pada DPPKAD menjadi Belanja Langsung dan penurunan Belanja Tidak Terduga Rp.500.000.000,00

Belanja Langsung

Pada Belanja Langsung terdapat kenaikan sebesar Rp.53.097.337.196,00 yang merupakan jumlah dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal.

Beberapa Program/Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 yang mengalami kenaikan antara lain:

1. Program/Kegiatan yang mengalami penyesuaian standardisasi terkait kenaikan harga BBM
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
3. Program JKRS
4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
5. Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan
6. Kegiatan Pengamanan dan Pengawasan Pilkades di 243 Desa
7. Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)

Total seluruh Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 adalah Rp.1.180.338.623.409,00 atau naik sebesar Rp.58.560.755.185,00 (5,22%) dari APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1.121.777.868.224,00

PEMBIAYAAN DAERAH

Pada Penerimaan Pembiayaan Daerah terdapat kenaikan sebesar Rp.48.646.626.213,00 sehingga menjadi Rp.67.601.516.213,00

Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya saya sampaikan Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

PENDAPATAN DAERAH	Rp. 1.117.992.107.196
Pendapatan Asli Daerah	Rp. 122.125.314.700
Hasil Pajak Daerah	Rp. 26.404.677.000
Hasil Retribusi Daerah	Rp. 25.681.195.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 4.977.434.000
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 65.062.008.700
Dana Perimbangan	Rp. 729.834.164.000
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 32.789.334.000
Dana Alokasi Umum	Rp. 640.273.360.000
Dana Alokasi Khusus	Rp. 56.771.470.000
Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 266.032.628.496
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 43.312.222.496
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 150.500.902.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 72.219.504.000
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.117.992.107.196
BELANJA DAERAH	Rp. 1.180.338.623.409
Belanja Tidak Langsung	Rp. 715.089.642.213
Belanja Pegawai	Rp. 632.291.245.213
Belanja Bunga	Rp. 37.000.000
Belanja Subsidi	Rp. -
Belanja Hibah	Rp. 43.357.137.000
Belanja Bantuan Sosial	Rp. 4.455.885.000
Belanja Bantuan Keuangan Kepada - Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan - Desa	Rp. 34.448.375.000
Belanja Tidak Terduga	Rp. 500.000.000
Belanja Langsung	Rp. 465.248.981.196
Belanja Pegawai	Rp. 64.488.145.296
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 205.284.509.570
Belanja Modal	Rp. 195.476.326.330
Jumlah Belanja	Rp. 1.180.338.623.409
Surplus / (Defisit)	Rp. (62.346.516.213)

PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Rp. 67.601.516.213

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp. 67.601.516.213

Pengeluaran Pembiayaan

Penyertaan Modal

Rp. 5.200.000.000

Pembayaran Pokok Utang yang jatuh tempo

Rp. 55.000.000

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp. 5.255.000.000

Pembiayaan Netto Rp. 62.346.516.213

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan

Rp.

Rapat Dewan dan Hadirin yang Saya Hormati,

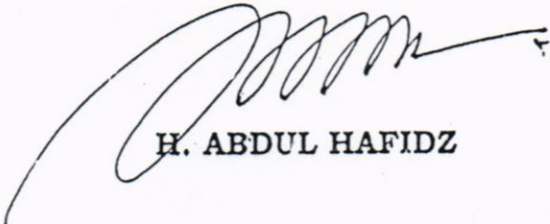
Demikian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013, untuk segera dibahas melalui mekanisme pembahasan di DPRD dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Akhirnya tidak lupa saya menyampaikan terimakasih dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk Nya kepada kita sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 11 September 2013

WAKIL BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

Hari : SELASA
Tanggal : 12 September 2013
Waktu : 09.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
 1. Pembukaan.
 2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013.
 3. Skors.
 4. Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013.
 5. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
 1. Nama : Ir. H. SUNARTO
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
 1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 6 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 5 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 4 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 4 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	: 33 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 2 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 3 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 3 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: - orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 1 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: - orang
Jumlah	: 12 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : Ir. H. SUNARTO**

LAGU INDONESIA RAYA.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang saya hormati Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
 Kabupaten Rembang.
- Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Rembang.
- Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
 Rembang.
- Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,
 Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan
 Camat se Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Pimpinan Partai Politik, LSM, para wartawan dan
 semua undangan lainnya.

Sebelum kita melangkah pada pokok acara rapat hari ini, marilah kita terlebih dahulu senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan anugerah-Nya yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Kedua (II) DPRD Kabupaten Rembang membahas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 dengan agenda pokok Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 dan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi.

Rapat Dewan yang terhormat.

Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 9 September 2013, Rapat Paripurna hari ini adalah merupakan Rapat Paripurna Kedua (II) dalam membahas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013.

Sebagaimana Rapat Paripurna pertama kemarin, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang bahwa Rapat Paripurna DPRD untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRD. Untuk itu sesuai dengan catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 33 orang, dengan demikian maka Rapat Paripurna hari ini saya nyatakan telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucapkan **"Bismillahirrohmanirrohim"** tepat pukul 11.30 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk Palu 3 Kali)

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Agenda pokok dalam paripurna pertama tanggal 11 September 2013 kemarin adalah Penjelasan Bupati tentang Raperda Perubahan APBD

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013, untuk selanjutnya yang menjadi agenda pokok Rapat Paripurna Kedua (II) hari ini adalah Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Atas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 dan dilanjutkan dengan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013.

Dan untuk lebih lengkapnya akan saya sampaikan susunan acara pada rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan.
2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013.
3. Skors.
4. Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013.
5. Penutup.

Selanjutnya marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

Kepada Saudara-saudara anggota Fraksi DPRD yang akan menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya, saya persilahkan untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Fraksi Demokrat | : H. HIKMAH PURNAWAWATI |
| 2. Fraksi Partai Golkar | : JOKO SOESILO |
| 3. Fraksi PPP | : KODRIYAH |
| 4. Fraksi PKB | : PUJI SANTOSO |
| 5. Fraksi PDI Perjuangan | : SUMARSIH |
| 6. Fraksi Amanat Nasional | : SUKARMAIN |
| 7. Fraksi Bintang Keadilan | : DHIAN RAHWENI DEWI |

Selanjutnya dimulai dari Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat sampai dengan Fraksi Bintang Keadilan, secara berurutan saya persilahkan untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya :

===== PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI =====

(Teks Pemandangan Umum semua Fraksi terlampir)

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara-saudara yang telah mewakili Fraksinya masing-masing.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Sebelum acara dilanjutkan terlebih dahulu kita berikan waktu kepada Saudara Bupati untuk mempersiapkan jawaban atas Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013. Untuk itu Rapat Paripurna saya skors selama 60 menit.(berarti jam 1 mulai lagi kita istirahat makan plus sholat terus kita mulai lagi)

(Ketuk Palu 1 Kali)

INTERUPSI Sdr. RIDWAN, SH, MH (Fraksi PDI Perjuangan)

ya, saya kira begini ketua saya menyakini pak bupati ini khan sudah sangat cerdas sekali terhadap jawaban-jawaban seperti ini, sehingga tidak perlu waktu 60 menit ketua ya, saya kira langsung aja Saudara ketua jika sudah siap.

JAWABAN PIMPINAN RAPAT

Ya ini saya mohon maaf karena sudah tak dok tadi saya tidak melihat ada interupsi, untuk itu saya mohon maaf saya sudah putuskan, sebenarnya tadi sudah mau dijawab Bupati lisan tapi secara administrasi itu khan tidak diperbolehkan harus ada tertulis, seperti itu pak Ridwan.semua ada aturannya.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Sehubungan waktu yang telah diberikan kepada Saudara Bupati dalam menyusun Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 telah selesai maka skors saya cabut dan tepat pukul 13.35 WIB Rapat Paripurna saya buka kembali.

(Ketuk Palu 3 Kali)

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Kita masuki acara yang keempat, yaitu penyampaian jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013. Kepada Saudara Bupati saya persilahkan.

**==JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013 ==**

(Teks Terlampir dan Tambahan Penjelasan dari Sdr. Bupati Rembang)

Terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Acara rapat paripurna hari ini telah kita lalui dengan seksama dan selesai sesuai dengan acara yang diagendakan. Akhirnya terima kasih saya sampaikan atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat paripurna pada hari ini. Selanjutnya pembahasan Raperda Perubahan akan diteruskan dengan Rapat Paripurna ketiga (III) pada tanggal 27 September 2013.

Sehubungan Rapat Paripurna ketiga (III) dilaksanakan pada hari Jum,at dan padatnya acara, kami menghimbau kepada Saudara-saudara semua untuk dapat hadir tepat waktu sesuai dengan undangan yang telah beredar, terimakasih dan dengan mengucap “Alhamdulillahirebbil ‘alamin“ tepat pukul 14.00 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk Palu 3 Kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA

Ir. H. SUNARTO

SEKRETARIS

Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN :RISALAH RAPAT PARIPURNA II DPRD
KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS
RAPERDA PERUBAHAN APABD KABUPATEN
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD
dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Teks Pemandangan Umum Fraksi terhadap
Raperda Perubahan APBD Kabupaten
Rembang Tahun 2013;
- LAMPIRAN III : Teks Jawaban Bupati atas Pemandangan
Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan
APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran
2013 dan Tambahan Jawaban.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

HARI/TANGGAL : KAMIS, 12 SEPTEMBER 2013
PUKUL : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	<u>FRAKSI DEMOKRAT</u>			
1	Ir. H. SUNARTO	Ketua	1	
2	H. ISLAHUDDIN	Anggota	2	
3	H. HARNO, SE	Anggota	3	
4	GUNASIH, SE	Anggota	4	
5	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE	Anggota	5	
6	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	6	
7	EDI KARTONO, S.Pd	Anggota	7	
8	YULIANI ARI SETYANINGSIH, SE	Anggota	8	
	<u>FRAKSI PARTAI GOLKAR</u>			
9	CATUR WINANTO, SH	Wakil Ketua	9	
10	H. ISMARI	Anggota	10	
11	SUCI RAHAYU, SH	Anggota	11	
12	JOKO SOESILO	Anggota	12	
13	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	13	
14	KHAIRUL MUTAKIM	Anggota	14	
15	CHAIRUL ANWAR, S.Sos	Anggota	15	
16	SRI REJEKI, SH	Anggota	16	
	<u>FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN</u>			
17	H. MAJID KAMIL, MZ	Wakil Ketua	17	
18	H. SA'DULLAH	Anggota	18	
19	H.M. MURSYID, ST	Anggota	19	
20	H. HAKAM, SH	Anggota	20	
21	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	21	
22	KODRIYAH, S.Pd	Anggota	22	
23	H. YUDIANTO, SH	Anggota	23	
	<u>FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA</u>			
24	SUWANTO	Wakil Ketua	24	
25	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	25	
26	H. SUTARYO SHOLEH	Anggota	26	
27	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	27	
28	H.M. NOOR HASAN, SH	Anggota	28	
29	H. SHOLEH, BA	Anggota	29	
30	H.M. SHODIQIN YASIR	Anggota	30	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KEI
1	2	3	4	5
	<u>FRAKSI PDI PERJUANGAN</u>			
31	JASMANI	Anggota	31	
32	SUPRIHADI	Anggota	32	
33	SUMARSIH	Anggota	33	
34	RIDWAN, SH, MH	Anggota	34	
35	A. MASKUR RUKHANI	Anggota	35	
	<u>FRAKSI AMANAT NASIONAL</u>			
36	JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE	Anggota	36	
37	H. MOH. NURHASAN, SH	Anggota	37	
38	MOH. IMAM ZARKASI	Anggota	38	
39	SUKARMAIN	Anggota	39	
40	SAHNINGSIH, SE	Anggota	40	
	<u>FRAKSI BINTANG KEADILAN</u>			
41	dr. ROCHMAD ISNAINI	Anggota	41	
42	ACHMAD ZAMHURI	Anggota	42	
43	MUNTHOHID, SH	Anggota	43	
44	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	44	
45	DHIAN RAHWENI DEWI	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

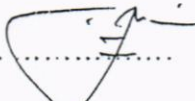
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



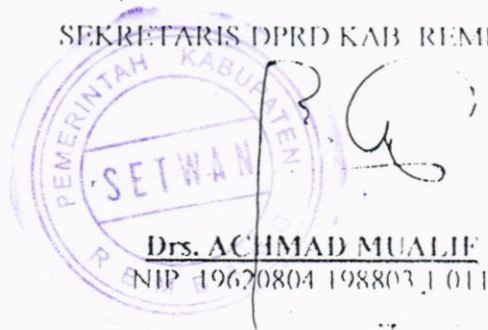
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

HARI/TANGGAL : KAMIS, 12 SEPTEMBER 2013
PUKUL : 09.30 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. MOCH SALIM	Bupati Rembang	1. 
2.	H. ABDUL HAFIDZ	Wakil Bupati Rembang	2. 
3.	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	3. 
4.		Kejaksaan Negeri Rembang	4.
5.		Pengadilan Negeri Rembang	5.
6.	WAWAN INDARYANTO, SPd	Dandim, 0720 Rembang	6.
7.	ADHY FANDY A.	Kepolisian Resort Rembang	7.
8.		Pengadilan Agama Kab Rembang	8.

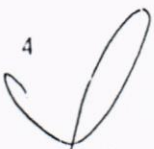
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG


Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

HARI/TANGGAL : KAMIS, 12 SEPTEMBER 2013

PUKUL : 09.30 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	H. Agus Rizal	1 
2	CAMAT KALIORI	MUSTHOCH	2 
3	CAMAT SUMBER		3
4	CAMAT SULANG		4 
5	CAMAT BULU	SUSKANTORO	5 
6	CAMAT PAMOTAN	M. Wiyono	6 
7	CAMAT GUNEM	SUGIYANTO	7 
8	CAMAT SALE		8
9	CAMAT LASEM		9
10	CAMAT PANCUR	SATRI WISNU	10 
11	CAMAT SEDAN		11
12	CAMAT SLUKE	HM. Marjianto	12 
13	CAMAT KRAGAN		13
14	CAMAT SARANG	Eddy Kiswanto	14 

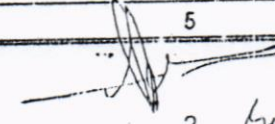
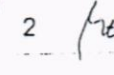
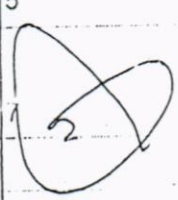
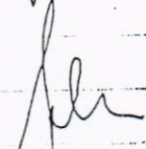
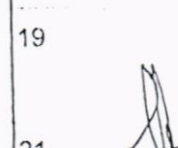
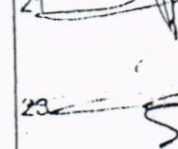
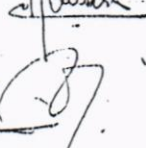
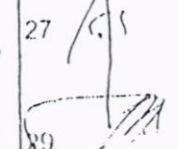
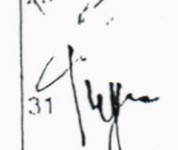
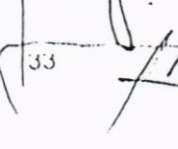
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



Drs. ACIMAD MUALIF
NIP. 196208041988031011

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

HARI/TANGGAL : KAMIS, 12 SEPTEMBER 2013
 PUKUL : 09.30 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	H. H. Affandi	STAB	1 
2	STAF AHLI BUPATI	Sunarto	SAB	2 
3	STAF AHLI BUPATI	W. W. W. W.	1.	3 
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA	S. S. S. S.	M. H.	6 
7	ASISTEN III SEKDA	A. A. A. A.	AB. H.	7 
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM			9 
10	BAG. HUMAS	S. S. S. S.	Bag. Humas	10 
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	G. G. G. G.		11 
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	S. S. S. S.	Kabag.	12 
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	A. A. A. A.		13 
14	BAG. ADM. KEUANGAN			14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	E. E. E. E.	o. o. o. o.	15 
16	BAG. UMUM	S. S. S. S.		16 
17	DPPKAD	M. M. M. M.		17 
18	INSPEKTORAT	S. S. S. S.	Ka. Sub. Bay	18 
19	BA. PEDANA			19
20	B. P. M. P. K. B.	D. D. D. D.	Ka.	20 
21	B. K. D.	H. H. H. H.	P. P. P. P.	21 
22	B. K. P. & P. K.	P. P. P. P.	(M. M. M. M.)	22 
23	B. P. B. D.	A. A. A. A.	Kab. R. R.	23 
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	P. P. P. P.	Ka. P. P.	24 
25	DINAS KESEHATAN	A. A. A. A.	Kad. P. P.	25 
26	DINAS PENDIDIKAN			26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	P. P. P. P.	P. P. P. P.	27
28	DINTANHUT	S. S. S. S.	Kad. P. P.	28 
29	DINLUTKAN	P. P. P. P.	Kad. P. P.	29
30	DINHUBKOMINFO	S. S. S. S.	Ka. P. P.	30
31	DINAS DUKCAPIL	A. A. A. A.	S. S. S. S.	31
32	DINBODNARI RIRANG	H. H. H. H.	Kad. P. P.	32
33	DINBUDPARPORA	S. S. S. S.	S. S. S. S.	33

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
34	DINAS ENERGI & SDM	AGUS SUPRIYANTO	K	34
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Purnawati		35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO	Ka	36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Edi Winarso	Ka Perpustakaan	37
38	KANTOR PPT	Ety Purharyanti	Ka. Sub. Bakti	38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	Kr. Agus Setiawan	dr.	39
40	SATPOL PP			40
41	YIM PKK KAB. REMBANG	MOG/ARTI.		41
42	P D A M	Hernawan	Adm Keu	42
43	PERCETAKAN DAERAH	Kartunin		43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	BKK LASEM			47
48	R B S J			48
49	B P N KAB. REMBANG			49
50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA			50
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG	Sri Winarso	Ka. Perminy	52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KPU KAB. REMBANG			57
58	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			58
59	KANTOR POS DAN GIRO			59
60	TELKOM REMBANG			60
61	PLN CAB. REMBANG			61
62	PANWASLU KAB. REMBANG			62
63	Radio Citra Bahari FM	Masudi	Reporter	63
64	Radio Citra Bahari FM	Rina	Reporter	64
65	Stigt Dwi Saputro	ESNM	Kasi	65
66		Agus W.	Sty. FPG	66
67				67
68				68
69				69
70				70

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100
101				101
102				102

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



DR. ACHMAD MUALIF

 NIP. 196208041988031011

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT

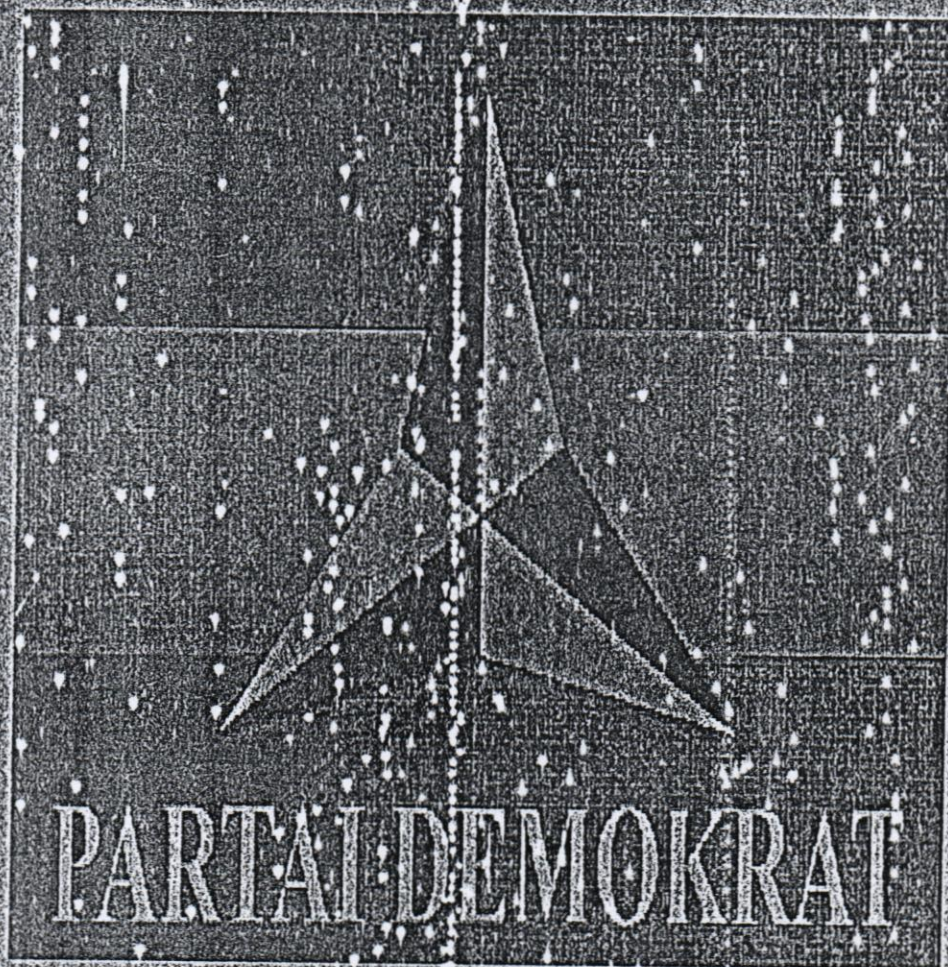
ATAS

RAPERDA PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2013



FRAKSI DEMOKRAT

DPRD KABUPATEN REMBANG

Rembang, 12 September 2013

DIBACAKAN OLEH : II. HIKMAH PUENAMAWATI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang;
telp. (0295) 691194; 693290; 693291

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2013

Kamis, 12 September 2013
Dibacakan oleh : Hj.Hikmah Purnamawati

Assalamualaikum Wr.Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan wakil bupati
2. Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
4. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
5. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama staf.
6. Saudara Pimpinan Organisasi kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pemandangan umum kami terhadap Raperda Perubahan APBD tahun 2013 ini, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat, Hidayah serta Inayah-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kebugaran tak kurang suatu apa.

Dalam pemandangan umum ini kami Fraksi Demokrat, menyampaikan bahwa di penghujung masa jabatan kami ini, banyak agenda besar yang akan kita laksanakan bersama antara lain: pilihan

serentak 243 kepala desa yang akan dilaksanakan bulan Nopember 2013 ini dan pilihan legislatif tahun 2014 serta pilihan presiden. Oleh karena itu kita harus bersama - sama bekerja keras dan saling bahu membahu menciptakan kondusifitas suasana panasnya suhu politik sehingga akan terciptanya Rembang yang aman damai dan sejahtera.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Menyikapi anggaran perubahan APBD kabupaten Rembang tahun 2013 ini kami mengharapkan mendahulukan hal - hal yang sifatnya mendesak dan harus dilaksanakan yang tidak tercover di anggaran induk 2013.

Adapun beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan anggaran perubahan tahun 2013 ini antara lain :

1. Berkurangnya dana bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar Rp. 4.733.686.000 disebabkan karena faktor apa??
2. Mengapa muncul defisit yang sangat besar??? Apa penyebabnya?
3. Kami mengharapkan anggaran pemeliharaan jalan supaya ditambah karena masih banyak yang belum tercover di anggaran induk pada hal kondisinya sudah rusak parah.
4. Kepada Satpol PP supaya lebih tegas dalam penindakan pelanggaran perda dan ketertiban umum contoh pedagang yang menempati trotoar di sepanjang jalan lasem sangat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan terutama anak anak sekolah. Hal tersebut tidak akan terjadi apabila satpol PP menjalankan tugasnya dengan rutin.
5. Mohon supaya kualitas dalam mengajar para guru lebih ditingkatkan karena gaji dan tunjangan para guru sangat luar biasa belum sebanding dengan kinerjanya.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada saudara bupati, wakil bupati, saudara ketua dan para wakil ketua DPRD serta segenap tamu undangan kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

an
[Signature]
KETUA
H. ISLAHUDDIN



SEKRETARIS

[Signature]
H. MOCH GUNASIH, SE.

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C. 20535

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

SUBJECT: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

ADMINISTRATIVE

DATE: [REDACTED] BY: [REDACTED]

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD KABUPATEN REMBANG



Terhadap
Rancangan Peraturan Daerah
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang TA 2013

PEMANTAPAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD KABUPATEN REMBANG



Disusun oleh

Konvensi Partai Golkar

Anggota DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2013

Rembang, 20 Mei 2013



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

Sekretariat: DPRD Rembang, Jl. Diponegoro No.88, Rembang 59212

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD KABUPATEN REMBANG**

terhadap
Rancangan Peraturan Daerah
tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Rembang

Hari Kamis, 12 September 2013

Juru Bicara: JOKO SUSILO

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum Fraksi kali ini, perkenankanlah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini. Pada tanggal 12 September 2013 hari ini, 239 kepala desa di Kabupaten Rembang berakhir masa tugasnya. Dari mimbar ini, Fraksi Partai GOLKAR DPRD Kabupaten Rembang menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian dan peran sertanya dalam membangun Kabupaten Rembang selama ini, dan bagi yang mencalonkan lagi kami mengucapkan selamat dan sukses.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat

Membuka pemandangan umum ini kami menyampaikan informasi bahwa realisasi belanja Kementerian/Lembaga Negara di pusat terhadap APBN 2013 baru mencapai 39,3 persen dari pagu APBN. Untung hal ini tidak terjadi pada daya serap SKPD Kabupaten Rembang terhadap APBD Kabupaten Rembang tahun 2013, karena perencanaan yang cukup matang dan besaran anggaran yang sangat kecil dibanding APBN.

Memibaca Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2013 yang kemarin disampaikan oleh Sdr. Wakil Bupati, FPG memberi apresiasi kepada pemerintah berkenaan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.11,258 M, dari Rp. 110,867 M menjadi Rp. 122,125 M. Namun terdapat beberapa hal yang kami mintakan penjelasan dan harapan kepada pemerintah al:

- Mengapa dari PAD tersebut Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan justru turun dari Rp. 5,500 M menjadi Rp 4,977 M ?
- Apa yang dimaksud Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak turun dari Rp 37,573 M menjadi Rp 32,789 M ?
- Dalam APBD Induk 2013 SILPA TA 2012 belum dimasukkan dengan alasan lupa. Apakah dalam RAPBD 2013 ini SILPA TA 2012 itu sudah dimasukkan ?
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk mewadahi kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembahasan RAPBD nanti kami minta benar-benar memikirkan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya para nelayan.
- Untuk kesekian kalinya kami menyoroti jadwal pembahasan Raperda yang sangat singkat. Sebagai mitra kerja kami siap bekerja bersama-sama eksekutif menyelesaikan tugas ini dalam waktu yang ditentukan. Komisi-komisi DPRD bersama SKPD terkait kalau perlu melaksanakan pembahasan RAPBD siang malam, agar bisa ditetapkan pada saat yang dijadwalkan. Namun kami khawatir apabila hasilnya kedodoran/tidak sempurna, untuk itu kami mengnimbau agar hal ini tidak terulang dimasa yang akan datang.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Menutup pemandangan umum ini kami mengutip piweling yang termuat dalam Serat Wulangreh karya Sri Sunan Pakubuwono IV sbb:

*"Dhedhasaring angasto negari,
kudu bener kudu lantip,
sepi pamrih den kaesti,
pesunen sariranira,
jejeging adil den udi".*

Artinya, syarat untuk mengelola negara adalah kejujuran dan kecakapan. Mengesampingkan kepentingan pribadi, mengendalikan hawa nafsu serta menegakkan keadilan.

Bila ada kata-kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

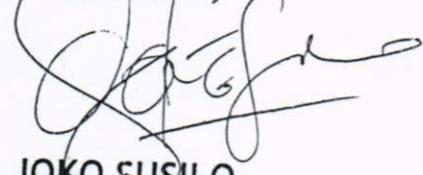
Ketua,



H. ISMARI



Sekretaris,



JOKO SUSILO

“Dibaca oleh anggota Majelis”

“Kedua, Bapak Ketua Majelis”

“Ketiga, Bapak Wakil Ketua Majelis”

“Keempat, Bapak Sekretaris Majelis”

“Kelima, Bapak Bendahara Majelis”

“Selanjutnya, Bapak Ketua Majelis akan menyampaikan laporan hasil kerja Majelis selama tahun 2021. Laporan ini akan disampaikan kepada Bapak Ketua Majelis dan Bapak Wakil Ketua Majelis.”

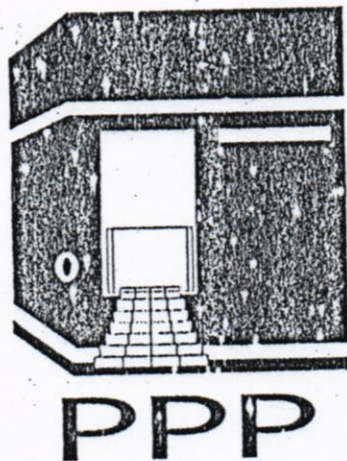
“Selanjutnya, Bapak Ketua Majelis akan menyampaikan laporan hasil kerja Majelis selama tahun 2021. Laporan ini akan disampaikan kepada Bapak Ketua Majelis dan Bapak Wakil Ketua Majelis.”

“Selanjutnya, Bapak Ketua Majelis akan menyampaikan laporan hasil kerja Majelis selama tahun 2021. Laporan ini akan disampaikan kepada Bapak Ketua Majelis dan Bapak Wakil Ketua Majelis.”

“Selanjutnya, Bapak Ketua Majelis akan menyampaikan laporan hasil kerja Majelis selama tahun 2021. Laporan ini akan disampaikan kepada Bapak Ketua Majelis dan Bapak Wakil Ketua Majelis.”

“Selanjutnya, Bapak Ketua Majelis akan menyampaikan laporan hasil kerja Majelis selama tahun 2021. Laporan ini akan disampaikan kepada Bapak Ketua Majelis dan Bapak Wakil Ketua Majelis.”

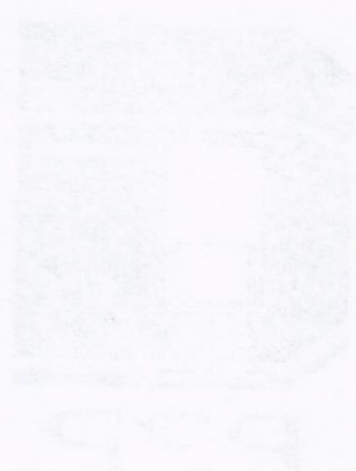
**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
HARI : KAMIS
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2013
Dibacakan oleh : HAKAM SH

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**
Jl. P.Diponegoro no.88 Rembang Telp. (0295) 693292

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
NATIONAL EXAMINATIONS
TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL



TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL

TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013

Disampaikan oleh :

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Yang terhormat Saudara Bupati dan wakil Bupati Rembang

Yang terhormat Saudara Muspida kabupaten rembang

Yang terhormat Saudara ketua pengadilan Negeri Rembang

Yang terhormat Saudara ketua pengadilan Agama Rembang

Yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Rembang

Yang terhormat Saudara pimpinan parpol, ormas dan insan pers di kabupaten Rembang.

Mengawali pandangan umum terhadap raperda perubahan APBD kabupaten Rembang tahun anggaran 2013 perkenankanlah kami mengajak segenap hadirin untuk bersama-sama memanjatkan syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala rahmat, karunia dan hidayahNya kepada kita. Karena hanya seizin Allah lah kita dapat menunaikan tugas kita selaku pengemban amanat rakyat. Sholawat dan

salam marilah kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga pola kepemimpinan dapat kita jadikan tauladan dan spirit dalam mengelola pembangunan di kabupaten Rembang yang di Ridloi Allah SWT.

Saudara Bupati, wakil Bupati dan rapat Dewan yang terhormat.

Dalam mensikapi rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2013, ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, namun sebelumnya perkenankan fraksi partai persatuan pembangunan mengucapkan selamat dan sukses kepada kapolres Rembang yang baru yaitu Bapak AKBP Muhammad Kurniawan SIK. M. Si. Semoga dalam menjalankan tugasnya selalu mendapat lindungan dari Allah SWT.

1. Menurut hemat kami sektor pertanian sampai saat ini masih merupakan penyumbang terbesar yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kabupaten Rembang kondisi ini perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan mengingat masyarakat kabupaten Rembang sebagian besar bekerja disektor pertanian, banyak persoalan yang dihadapi oleh para petani diantaranya adalah mahalnya harga pupuk, sulitnya mencari pengairan, biaya produksi yang mahal dan murah nya harga jual hasil pertanian. Untuk itu fraksi partai persatuan pembangunan menanyakan mengapa sektor yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi khususnya dikabupaten Rembang kurang mendapat dukungan anggaran yang signifikan?
2. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan di kabupaten Rembang ini menunjukkan adanya komitmen dan upaya pemerintah dalam memenuhi amanat undang-undang yang mewajibkan mengalokasikan anggaran belanja dan pendapatan sebesar 20% untuk bidang pendidikan. Namun demikian dalam pengamatan FPPP masih banyaknya sekolah-sekolahan swasta

Seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan yang lainnya yang sarana prasarannya dan kesejahteraan gurunya masih memprihatinkan, untuk itu FPPP mohon kepada pemerintah menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan.

3. Kami percaya bahwa proyek – proyek yang diprogramkan oleh pemerintah tentu penyelesaiannya tentu sudah ditargetkan waktunya oleh pemerintah, tapi kenyataannya masih banyak proyek – proyek yang penyelesaiannya tidak tepat waktu, untuk itu mohon perhatian yang serius.

Sebelum kami mengakhiri Pemandangan umum Fraksi ini kami ingin menyampaikan tentang adanya fenomena yang ada belakangan ini yang menggejala di daerah Kabupaten Rembang adalah adanya tindak perampasan sepeda motor kami menghimbau kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar lebih optimal dalam menjalankan tugas untuk memberantas kemungkaran.

Saudara Bupati dan Wakil Bupati beserta Sidang Dewan yang terhormat,

Setelah kami mencermati penjelasan Saudara Bupati yang tertuang dalam Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2013 kami secara umum menyatakan setuju untuk dibahas karena menurut kami sudah sesuai dengan kondisi yang ada.

Demikian dengan mengucapkan BISMILLAHIRROHMANIRROHIM FPPP menyetujui untuk dibahas.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.





PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

**Pemandangan Umum
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
PENGANTAR NOTA KEUANGAN
RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013**

disampaikan oleh puji santoso
Pada Sidang Paripurna DPRD kabupaten Rembang, Kamis, 12 September 2013

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah kabupaten

Yang kami Hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami Hormati, kawan-kawan pers, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang berbahagia.

Beberapa waktu yang lalu anggota DPRD kabupaten Rembang telah menetapkan Perda Penyertaan modal daerah yang merubah perda nomor 7 tahun 2011. Perubahan inilah yang memberi konsekuensi terhadap Raperda Perubahan APBD tahun 2013. Perubahan yang menyedot sebagian besar kenaikan pendapatan daerah, sekalipun dengan skema penyertaan hingga tahun 2017. Semestinya hal hal krusial seperti penyertaan modal sudah masuk dalam rencana induk APBD.

Beberapa waktu lalu anggota DPRD juga telah menetapkan perda perda atas perubahan perda nomor 3 dan nomor 4 tahun 2007 tentang pemilihan dan penetapan Kepala Desa. Meskipun hanya merubah beberapa pasal atau ayatnya saja sesungguhnya kurang tepat jika alokasi pembahasannya hanya dilakukan dalam satu hari. Sebagai sebuah saran sebaiknya pembahasan perda memiliki waktu yang cukup untuk lebih menyerap aspirasi warga.

Sebelum melanjutkan pemandangan umum kami, perlu kiranya dinas yang mengatur lalu lintas perhubungan memiliki *kepekaan* terhadap kemacetan yang ditimbulkan oleh pembangunan dua ruas jembatan, yaitu jembatan Babagan dan jembatan Karanggeneng. Meskipun kewajiban pembangunannya bukan kewenangan anggaran daerah kabupaten Rembang, tetapi kemacetan yang ditimbulkan, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja sungguh mengkhawatirkan. Ada beberapa kecelakaan yang telah terjadi pada jam-jam tersebut.

Masih berkaitan dengan pengelolaan jalan, beberapa waktu terakhir ini di kabupaten telah terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa. Kecelakaan karena jalan yang berlubang, pengaturan parkir tepi jalan, ataupun kelalaian pengemudi yang juga bisa diyakini karena kondisi psikologis akibat macet berkepanjangan.

Banyak argumen untuk membantah hal-hal di atas, tetapi alangkah lebih baik jika perlu langkah antisipatif agar hal-hal tersebut tidak terjadi.

Sidang Dewan Yang Kami Mulyakan

Pada halaman 4 nota pengantar Perubahan RAPBD 2013 disebutkan bahwa kenaikan pendapatan sebesar Rp. 9.914.128.972.000,- atau naik sebesar (0,89%). Kenaikan ini bersumber dari kenaikan PAD sebesar 11.257 miliar, penurunan dana perimbangan sebesar 4.783 miliar dan kenaikan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 3.439 miliar.

Sementara dalam pos belanja terdapat kenaikan sebesar Rp. 58.560.755.185,- sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp. (62.346.516.213,-). Hemat kami, (untungnya) jumlah silpa tahun lalu sebesar Rp. 67.601.516.213,- yang dikurangi jumlah pengeluaran pembiayaan Rp. 5.225.000.000,-. Maksud kami, bahwa jumlah silpa sebesar itu menunjukkan Pemkab Rembang gagal dalam melakukan perencanaan terhadap APBD sebelumnya, jumlah 67,6 miliar bukanlah angka yang sedikit.

Kami mengharapkan agar semakin jelas dirumuskan tingkat efisiensi anggaran agar tidak lagi terdapat nilai silpa yang tinggi. Langkah radikal barangkali bisa meniru yang dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama dengan memangkas anggaran sebesar 25%. Dari kita tahu meskipun jajaran pemprop DKI awalnya keberatan-keberatan, tetap dapat dijalankan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kebocoran anggaran yang cukup tinggi di lingkungan birokrasi pemerintahan.

Disebutkan dalam nota pengantar bahwa kenaikan belanja tersebut sebagian besar untuk belanja langsung karena yang untuk belanja tidak langsung hanya sebesar 5,4 miliar atau tidak ada 10%-nya. Sebagian untuk belanja langsung khususnya beberapa program :

1. Program yang menyesuaikan dengan standarisasi terkait kenaikan BBM
Untuk hal ini kami bisa memaklumi
2. Penyediaan sarpras pendidikan
Kami mengingatkan kepada semua pihak, terutama pemangku dana pendidikan untuk lebih hati-hati dalam mendistribusikan penyediaan sarpras ini.
3. JKRS
Kami mengharapkan agar sejak awal anggaran JKRS ini dialokasikan penuh untuk satu tahun. Jika selalu ada perubahan pada APBD P artinya kita memang setengah hati melaksanakan program ini atau memenuhi kebutuhan anggaran yang telah dikeluarkan.
4. Program Rehabilitasi jalan dan Jembatan
Hemat kami faktor terpenting dalam rehabilitasi ini adalah kesungguhan untuk melakukan rehab jalan dan jembatan sesuai dengan pagu anggarannya. Mampu meminimalisir munculnya jalan-jalan berlobang yang rawan kecelakaan. Apalagi masih terdapat beberapa baliho dengan semboyan jalan hotmix mulus.
5. Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
Program ini menjadi program yang hampir semua unit stakeholder pembangunan mengalokasikan anggarannya. Jangan sampai terjadi duplikasi anggaran.
6. Pengamanan dan pengawasan pilkades 243 desa
Mari kita kawal pilkades menjadi contoh demokrasi yang elegan, minimal konflik dan disengkuyung semua masyarakat desa.
7. PPJU
Sama seperti pengalokasian anggarannya untuk RBSJ, bukan dialokasikan pada perubahan tetapi sudah dialokasikan pada APBD induk.

Sidang Dewan Yang Kami Mulyakan

Bahwa kenaikan belanja langsung tersebut belum mengantisipasi munculnya dampak atas kenaikan DBM terhadap masyarakat dan antisipasi terhadap krisis air dan kemarau panjang yang terjadi di kabupaten Rembang.

Untuk itu beberapa catatan berikut kembali patut kami sampaikan :

1. Penambahan untuk JKRS juga disertakan *cash flow* yang telah menjadi tanggungan JKRS terhadap RSUD atau Puskesmas sebagai bahan dasar untuk merumuskan kebijakan baru yang mungkin lahir atas program kesehatan ini
2. Sejauh mana hotmix-sasi jalan mampu memberikan efisiensi sebagaimana yang pernah disosialisasikan. Sebab pada kenyataannya jalan-jalan tersebut sudah mulai hancur atau rusak. Dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan

3. Dalam kondisi kemarau panjang yang melanda semua daerah di Jawa Tengah ini apakah ktujuh bidang yang mengalami kenaikan belanja di atas lebih memiliki skala prioritas dibandingkan dengan penanganan air bersih dan kerusakan lahan produktif

Jika kebijakan perubahan RAPBD ini adalah kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan agar implementasi program dan kegiatan pembangunan lebih efektif dan efisien, kami perlu mendapatkan klarifikasi tatas pilihan pilihan skala prioritasnya

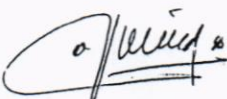
Sidang Dewan Yang Kami Hormati

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan agar mendapatkan perhatian semua pihak. Kami berharap selalu ada tahapan kemajuan bagi proses menyejahterakan masyarakat Rembang melalui pengelolaan keuangan yang benar.

Atas segala kekurangannya disampaikan permohonan maaf dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rembang, 12 September 2013
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa


Muhammad Asnawi, SPd
Ketua



Rudi Santoso, SP. MH
Sekretaris



Pemandangan Umum
FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN REMBANG

Terhadap:

Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013

Dibacakan Oleh;
SUMARSIH

Pada Sidang Paripurna
DPRD KABUPATEN REMBANG
Selasa, 12 September 2013



**PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

PEMANDANGAN UMUM

Fraksi PDI Perjuangan: DPRD Kabupaten Rembang

Terhadap;

*Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013*

Dibacakan Oleh;

SUMARSIH

Assalamu'alaikum wa rohmatullahi wa barokatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
MERDEKA...!!!

- Yang terhormat, Saudara Bupati, Saudara Wakil Bupati, Saudara-Saudaraku Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- Yang terhormat, Saudara Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan Badan Musyawarah, Pimpinan Badan Kehormatan, Pimpinan Badan Legislasi Daerah, beserta seluruh Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Yang terhormat, Saudara Sekretaris Daerah, Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang, Saudara para Kepala Dinas, Para Kepala Bagian, para Kepala Kantor, Badan dan para staf di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
- Para hadirin, Insan Pers dan tamu undangan Peserta Rapat Paripurna yang berbahagia.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Berbahagia,

Alhamdulillah robbil alamien, puja dan puji syukur selalu terucap dan terhaturkan kepada Allah atas segala rahmat, nikmat dan karuniaNya sehingga DPRD Kabupaten Rembang mampu melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya untuk melakukan fungsi legislasi dan budgetting dengan baik terkait dengan Perubahan APBD Kabupaten Rembang.

Sholawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Rosul Muhammad yang telah menyampaikan wahyu Allah, memberikan keteladanan hidup yang baik dan sesuai dengan petunjuk dan ajaran Allah SWT.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Terhormat,

Selamat Datang kami sampaikan kepada Saudaraku Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Kurniawan yang akan melanjutkan program dan pengabdian Aju Komisaris Besar Polisi Andhy Fandy Ariyanto sebagai Kepala Kepolisian Reso Rembang yang baru, semoga betah, mampu menjalankan tugas dan kewajiban serta bersinergi dengan baik bersama rakyat Rembang.

Terkait dengan diajukannya Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 ini, Fraksi PDI Perjuangan perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Perda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 yang telah disahkan beberapa bulan lalu, pada Dinas Pekerjaan Umum terdapat judul kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan dengan nomor rekening 1.03.1.03.01.18.01 dengan anggaran dana sebesar Rp.13.678.066.000,- (tiga belas milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh enam ribu rupiah).
 - a. Dipergunakan untuk pemeliharaan jalan mana sajakah dana Rehabilitasi Pemeliharaan sebesar tiga belas milyar lebih dimaksud?
 - b. Bukankah ada ketentuan-ketentuan tertentu terkait penggunaan anggaran Rehabilitasi/Pemeliharaan pada umumnya, mengingat alokasi dana sebesar tiga milyar lebih adalah sangat besar untuk ukuran Rembang namun dalam pengamatan kami, masih banyak jalan antar kecamatan yang masih berlubang dan tak terurus di wilayah Kabupaten Rembang.
2. Beberapa waktu yang lalu, Komisi A DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan Rapat Kerja bersama Bagian Tata Pemerintahan dan Asisten Bidang Pemerintahan yang diantaranya membahas rencana jadwal dan tahapan Pilkades serentak di seluruh wilayah Kabupaten Rembang yang diajukan oleh eksekutif dan akhirnya disetujui dan menjadi keputusan bersama. Beberapa waktu yang lalu pula, keputusan yang telah dibuat dan disepakati bersama tersebut juga disampaikan di hadapan Pansus DPRD Kabupaten Rembang. Sehingga kabar jadwal dimaksud telah diterima oleh internal DPRD Kabupaten Rembang, media dan masyarakat, tak pelak para calon kepala desa dan masyarakat luas telah memahami dan mencatatnya. Namun, akhir-akhir ini ditemukan kabar beda yang tersiar, bahwa jadwal yang telah dibahas, disepakati dan diputuskan bersama antara eksekutif dan legislatif dimaksud terindikasi dirubah sepihak. Untuk itu, kami meminta kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang agar berkenan melakukan klarifikasi atas indikasi perubahan jadwal dimaksud kemudian menetapkan jadwal dan tahapan Pilkades serentak di seluruh wilayah Kabupaten Rembang sesuai dengan yang telah dibahas dan diputuskan bersama DPRD Kabupaten Rembang. Kami perlu sampaikan ini dengan tujuan untuk mengurangi keresahan masyarakat atas perubahan jadwal dimaksud sekaligus mengingatkan bahwa menjaga konsistensi atas keputusan bersama itu lebih penting, membikin masyarakat tenang dan tidak resah itu lebih baik.

3. Dengan disahkannya Perda penambahan modal beberapa waktu yang lalu hendaknya dapat dilakukan secara baik dan sesuai dengan amanat Perda. Walaupun ada wacana pembatasan atas penambahan modal dimaksud sampai dengan tahun 2017 namun pada setiap tahun lebih baik dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Terhormat,
Demikian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Rembang, semoga ada guna dan manfaatnya.

Wassalamu'alaikum wa rohmatullahi wa barokatuh,
MERDEKA...!!!

Rembang, 12 September 2013

F R A K S I
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,


JASMANI

SEKRETARIS,


SUMARSIH



PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
TERHADAP
RAPERDA PERUBAHAN APED TAHUN 2011

12 SEPTEMBER 2013

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KABUPATEN REMBANG
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
TERHADAP
RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2013

Dibacakan Oleh : H. M. NURHASAN

Yang Terhormat,

Saudaraku Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Saudaraku Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Saudaraku Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Saudaraku Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Saudaraku Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor,

Kepala Bagian dan Camat Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Saudaraku Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *uswatun hasanah*, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. *Aamin.*

Saudaraku Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Membaca pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang, mohon dapat dijelaskan :

1. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 11.257.969.700,00 atau 10,15 % cukup besar, mengingat masa anggaran Tahun 2013 hanya menyisakan waktu 4 bulan (September – Desember) saja. Kami mengharapkan penjelasan lebih lanjut tentang capaian target Pendapat Asli Daerah sampai bulan Agustus 2013 dan sektor-sektor yang dapat menjadi potensi kenaikan PAD sebesar 10,15 % tersebut.
2. Dalam kesempatan ini, kami mohon dapat diberikan data jumlah anggaran yang telah terserap hingga bulan Agustus 2013. Jika kemampuan penyerapan anggaran masih lemah, seyogyanya penambahan kegiatan pada APBD Perubahan ini diikuti dengan peningkatan kinerja SKPD terkait.
3. Tidak semua hal dapat diprediksi dengan baik, untuk itu kami mohon penjelasan tentang *reasoning* penurunan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 500.000.000,00.

Saudaraku Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah pandangan umum dari Fraksi Partai Amanat Nasional untuk dapat dibahas lebih mendalam pada forum Badan Anggaran ataupun Komisi.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 12 September 2013

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KAB. REMBANG

Ketua



JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE.

Sekretaris



MOH. IMAM ZARKASI

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013



REMBANG, 12 SEPTEMBER 2013

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2013**



REMBANG , 12 SEPTEMBER 2013



**FRAKSI BINTANG KEADILAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Jl.P.Diponegoro No.88 Rembang (0295) 691194 Kode Pos 59251

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013**

Kamis , 12 September 2013

Dibacakan oleh : DHIAN RAHWENI DEWI ,SE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

Yang kami hormati Saudara BUPATI dan Saudara WAKIL BUPATI.

Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD beserta seluruh anggota Dewan.

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat dan Hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pandangan Umum Fraksi Bintang Keadilan terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 ini, kami tiada lupa mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada Alloh SWT

atas segala limpahan nikmat dan karuniaNya sehingga sampai saat ini kita semua dapat melaksanakan tugas pengabdian kepada seluruh masyarakat Rembang bisa berjalan dengan baik. Demikian pula FBK mengucapkan selamat atas dibukanya Akademi Komunitas Negeri Rembang, semoga akan semakin memajukan pendidikan anak-anak kita dan turut memajukan Rembang secara umum.

Hadirin sidang paripurna yang kami hormati

Terkait dengan Struktur APBD Perubahan 2013 FBK tidak banyak berkomentar mengingat Perubahan ini tidak bersifat Fundamental terhadap APBD induk 2013. Namun demikian FBK melihat ada beberapa hal yang kami mintakan penjelasan lebih lanjut diantaranya :

1. Apakah sudah ada Pengalokasian anggaran untuk penyertaan modal BUMD sebagaimana amanat dari perubahan perda no.7 tahun 2011 beserta rekomendasi pansus yang baru saja kita sahkan?
2. Dengan kenaikan harga kedelai sebagai bahan baku tempe yang mengakibatkan kesulitan ditingkat pengrajin , apakah APBD 2013 sudah mengalokasikan anggaran untuk subsidi pembelian kedelai bagi pengrajin tahu dan tempe?
3. Dengan akan diberlakukannya UU PPJS, bagaimana kelanjutan program JKRS?

4. Terhadap rencana pengangkatan CPNS terutama kategori II , sudah sejauh mana persiapan yang dilakukan ?

Selanjutnya FBK akan mencermati lebih lanjut RAPERDA tersebut dalam setiap tahapan pembahasan terutama dalam forum pembahasan komisi dengan SKPD.

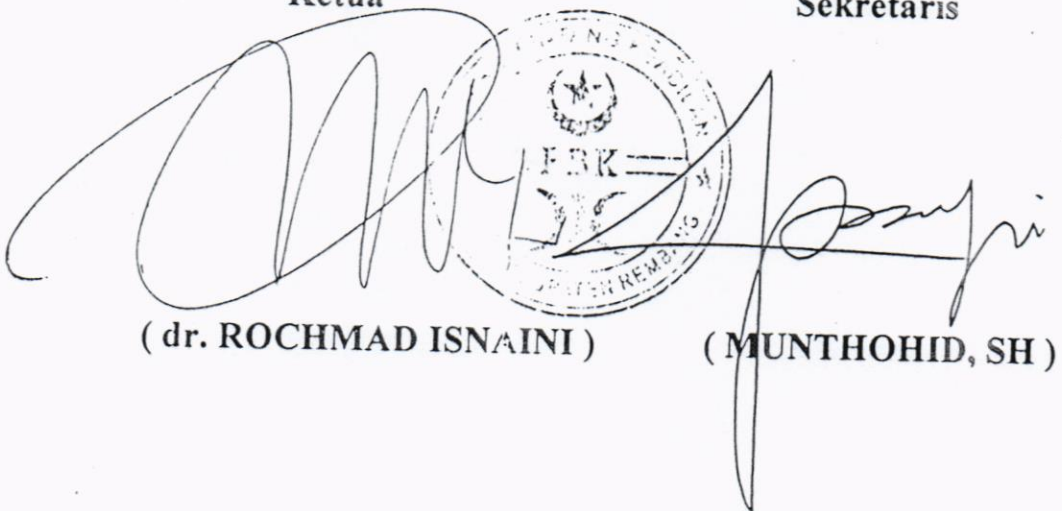
WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

Rerabang, 12 September 2013

**FRAKSI BINTANG KEADILAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Ketua

Sekretaris



The image shows two handwritten signatures. The signature on the left is for the Chairman, and the signature on the right is for the Secretary. Between the signatures is a circular official stamp of the Fraksi Bintang Keadilan DPRD Kabupaten Rembang. The stamp contains the text 'FRAKSI BINTANG KEADILAN' at the top, 'DPRD KABUPATEN REMBANG' at the bottom, and 'FBK' in the center.

(dr. ROCHMAD ISNAINI)

(MUNTTHOHID, SH)

1. The first of these is the fact that the

the second of these is the fact that the

the third of these is the fact that the

the fourth of these is the fact that the

the fifth of these is the fact that the

the sixth of these is the fact that the

the seventh of these is the fact that the

the eighth of these is the fact that the



**JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA MEMBAHAS PENGANTAR
NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG**



TAHUN ANGGARAN 2013



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
GENERAL DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION
JANUARY 1975
No. 100/1975

1975



**JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD
KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA MEMBAHAS PENGANTAR NOTA KEUANGAN
RANCANGAN PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat :

- Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang,
- Para Pejabat Muspida Kabupaten Rembang,
- Saudara Wakil Bupati Rembang,
- Tamu undangan yang kami hormati, tokoh masyarakat, wartawan dan segenap jajaran eksekutif yang berbahagia.

Mengawali jawaban Saya atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga kita masih diberi nikmat, kesehatan dan kebahagiaan.

Berkenaan dengan pertanyaan, saran, pendapat dan catatan yang disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang, dapat saya jelaskan sebagai berikut :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	<u>I. FRAKSI DEMOKRAT</u>	
1	Berkurangnya dana bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar Rp.4.783.686.000,- disebabkan faktor apa?	Alokasi dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mencantumkan besarnya alokasi dana yang akan diterima pada masing-masing daerah, pengalokasian dana bagi hasil tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya pemerintah pusat.
2	Defisit yang besar apa penyebabnya?	Besarnya defisit dalam RAPBD perubahan karena dengan jumlah SiLPA sebesar Rp.67 Milyar akan dipergunakan untuk membiayai Belanja Daerah, sehingga dalam struktur RAPBD Perubahan menjadi balance
3	Anggaran pemeliharaan jalan supaya ditambah karena masih banyak yang belum tercover di anggaran induk padahal kondisinya sudah rusak parah.	Kami berkomitmen untuk meningkatkan anggaran pemeliharaan jalan yang meningkat dari APBD Induk sebesar Rp.13,6 M menjadi Rp.15,9 M (naik 2,3 M).
4	Satpol PP supaya lebih tegas dalam penindakan pelanggaran Perda dan ketertiban umum.	Kami telah melakukan langkah-langkah dengan melakukan operasi secara rutin, namun demikian saran akan kami perhatikan.
5	Kualitas Guru lebih ditingkatkan karena gaji dan tunjangan guru sangat luar biasa.	Dalam penilaian kualitas kegiatan belajar mengajar, yang berperan banyak adalah Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah untuk masing-masing jenjang pendidikan. Akan kami tingkatkan lagi kapasitas dari Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah untuk lebih berperan dalam menjalankan fungsinya. Selain itu juga peningkatan kapasitas tenaga pendidik juga akan diperhatikan melalui peningkatan kualifikasi jenjang pendidikan minimal Diploma IV atau Sarjana, maupun melalui peningkatan kapasitas untuk kegiatan tertentu melalui Diklat dan Bintel.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	<u>II.FRAKSI GOLONGAN KARYA</u>	
1	Mengapa pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan turun sebesar Rp.552 juta dari Rp.5 5 Milyar menjadi Rp.4,977 Milyar?	1 Beberapa yang mengalami penurunan seperti PD. PBR BKK Lasem sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengalami penurunan pendapatan dari Rp.1.290.408.000 menjadi Rp.1.099.845.000 dan jasa deviden. Namun demikian walaupun terjadi penurunan terdapat beberapa sektor yang mengalami kenaikan diantaranya PDAM, PD. Apotek Daerah dan BKK Kaliori
2	Mengapa Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak turun dari Rp.37,57 Milyar menjadi Rp.32,789 milyar?	2 Jawaban sudah ada pada Fraksi Demokrat
3	Apakah SILPA TA 2012 sudah dimasukkan dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2013 ini?	3 SILPA Tahun Anggaran 2012 telah teranggarkan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.
4	Dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD, kami minta untuk memikirkan kesejahteraan masyarakat khususnya para nelayan	4 Terima kasih, akan kami perhatikan.
5	Kami menghimbau agar jadwal pembahasan Raperda dan penetapan perda dapat tepat waktu.	5 Terima kasih, akan kami perhatikan dan tidak lanjut.

NO.	PERTANYAAN/SARAN	JAWABAN
III. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		
1.	Sektor pertanian penyumbang terbesar yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang, pemberian dukungan anggaran yang signifikan.	1. Sektor pertanian telah diberikan dukungan anggaran baik dari Pemerintah Kabupaten Rembang, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
2.	Sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan.	2. Untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) pembangunan di bidang pendidikan sudah cukup baik melalui program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan adanya BOS pendidikan dasar dari pemerintah pusat. BOS pendampingan dari Provinsi maupun program sekolah gratis dari Pemerintah Kabupaten, memang untuk sekolah – sekolah yang berada dibawah kewenangan Kementerian Agama, masih perlu koordinasi lebih lanjut untuk memetakan keadaan sarana dan prasarana dan tenaga pendidik. Selain itu juga perlu koordinasi lebih lanjut mengenai pembagian porsi pembangunan yang telah dibiayai oleh Kementerian Agama dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten.
3.	Penyelesaian proyek-proyek yang diprogramkan oleh pemerintah .	3. Kami telah melakukan upaya-upaya dan teguran kepada pihak penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	<u>IV. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</u>	
1.	Adanya kemacetan di jalur pantura yang mengkhawatirkan serta penanganan parkir di tepi jalan.	1. Terima kasih atas perhatiannya : perlu kami jelaskan, kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan di jalur pantura yang disebabkan oleh adanya perbaikan Jembatan Karanggeneng Kecamatan Rembang, Jembatan Bagan Kecamatan Lasem, Jembatan Ngacur Kecamatan Kragan dan perbaikan ruas jalan Kaliori-Batangan. Penyebab lain terjadinya macet adalah tingginya arus lalu lintas di jalur pantura, berdasarkan hasil pantauan rutin oleh Dinhubkominfo Kab. Rembang jumlah kendaraan yang lewat di jalur pantura rata-rata per hari adalah 7.550 kendaraan, dari jumlah tersebut 3.450 adalah kendaraan angkutan barang, 2.500 buah adalah truk berat sejenis tronton keatas. Lainnya mobil kecil dan sepeda motor. Perlu diketahui bahwa, Kab. Rembang adalah merupakan titik lelah dalam mengemudi sehingga banyak kendaraan parkir di bahu jalan di jalur pantura. Langkah tindakan yang telah dilakukan 1. Berkoordinasi dengan Bina Marga, rekanan, Dinhubkominfo dan Satlantas Polres Rembang dengan menempatkan petugas di titik rawan macet, memasang rambu-rambu dan menyiapkan jalur alternatif. 2. Menertibkan parkir liar di bahu jalan pantura dengan berbagai cara.

No	PERTANYAAN	JAWABAN												
		3. Terkait dengan parkir di jalur pantura, sudah dipasang rambu larangan parkir banyak yang hilang, contoh di depan Jembatan Tasikharjo Kaliori.												
2.	Pada Pengantar Nota Perubahan RAPBD 2013 terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 62.346.516.213,-, jumlah silpa tahun lalu sebesar Rp. 67.601.516.213,- yang dikurangi jumlah pengeluaran pembiayaan Rp. 5.225.000.000. Jumlah silpa sebesar itu menunjukkan PemKab Rembang gagal dalam melakukan perencanaan terhadap APBD sebelumnya, jumlah 67,6 miliar bukanlah angka yang sedikit. Kami mengharapkan agar semakin jelas dirumuskan tingkat efisiensi anggaran agar tidak lagi terdapat silpa yang tinggi.	2. Jumlah silpa yang tinggi bukanlah dikarenakan salah dalam perencanaan tetapi karena adanya kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak bisa dilaksanakan terkendala oleh Juknis terlambat diterima PemKab dan berubah teknisnya.												
3.	Agar sejak awal anggaran JKRS dialokasikan penuh untuk satu tahun, jika selalu ada perubahan pada Anggaran Perubahan artinya kita memang setengah hati melaksani program ini. Penambahan untuk JKRS agar disertai dengan cash flow yang telah menjadi tanggungan JKRS terhadap RSUD dan Puskesmas sebagai bahan dasar untuk merumuskan kebijakan baru atas program kesehatan ini.	3. Terkait dengan Program JKRS dalam anggaran Induk 2013 telah dialokasikan dana sebesar 10 Milyar. Alokasi tersebut dimaksudkan untuk membayar jumlah hutang klaim tertanggung dengan rincian sebagai berikut : Membayar Klaim PPK2 RSUD Rembang <table border="1"> <tr> <td>a.</td><td>Klaim Tahun 2010</td><td>Rp.2.312.647.277</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Klaim Tahun 2011</td><td>Rp.2.506.110.260</td></tr> <tr> <td>c.</td><td>Klaim Okt-Des 2012</td><td>Rp.1.463.748.509</td></tr> <tr> <td>d.</td><td>Klaim Januari-Juli 2013</td><td>Rp.2.234.645.869</td></tr> </table>	a.	Klaim Tahun 2010	Rp.2.312.647.277	b.	Klaim Tahun 2011	Rp.2.506.110.260	c.	Klaim Okt-Des 2012	Rp.1.463.748.509	d.	Klaim Januari-Juli 2013	Rp.2.234.645.869
a.	Klaim Tahun 2010	Rp.2.312.647.277												
b.	Klaim Tahun 2011	Rp.2.506.110.260												
c.	Klaim Okt-Des 2012	Rp.1.463.748.509												
d.	Klaim Januari-Juli 2013	Rp.2.234.645.869												

No	PERTANYAAN	JAWABAN						
		Membayar klaim PPK3 (RSUP dr. Kariadi, RSJD Aminugondo, RSUD Tugurejo Semarang) <table> <tr> <td>a.</td><td>Klaim Tahun 2012</td><td>Rp. 99.254.658</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Klaim PPK3 s/d Mei 2013</td><td>Rp.351.979.371</td></tr> </table> Dengan demikian perkiraan kekurangan anggaran 2013 sebesar Rp.1.729.786.795. Apabila kekurangan tersebut dapat dialokasikan secara penuh didalam Perubahan APBD 2013 ini maka diharapkan JKRS bisa menyelesaikan semua tanggungannya dalam tahun berjalan.	a.	Klaim Tahun 2012	Rp. 99.254.658	b.	Klaim PPK3 s/d Mei 2013	Rp.351.979.371
a.	Klaim Tahun 2012	Rp. 99.254.658						
b.	Klaim PPK3 s/d Mei 2013	Rp.351.979.371						
4.	Sejauh mana Hotmix-sasi jalan mampu memberikan efisiensi sebagaimana yang pernah disosialisasikan, sebab kenyataannya jalan-jalan tersebut sudah mulai hancur atau rusak.	4. Kami akan perhatikan dan segera kami , tangani pada anggaran Perubahan 2013.						

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	V. FRAKSI PDI PERJUANGAN	
1.	Penjelasan tentang Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum a. Dipergunakan untuk pemeliharaan jalan mana saja dana tersebut ? b. Ketentuan – ketentuan tertentu terkait penggunaan anggaran tersebut ?	a. Pekerjaan Peningkatan Jalan Sidomulyo - Sidorejo - Karas - Sedan, Kec. Sedan dengan sumber dana dari APBD Kab. Rembang, sedang dilaksanakan pelebaran pada ruas jalan Sidomulyo - Sidorejo - Karas - Sedan dengan lapis hotmix. Pekerjaan Peningkatan Jalan Kalipang – Lodan, -Kec. Sarang, sedang dilaksanakan peningkatan dengan perkerasan hotmix. Pekerjaan Peningkatan Jalan Beton Lambangan Wetan - Karangasem, Kec. Bulu dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Beton Desa Tahunan - Ke Batas Blora, Kec. Sale; dengan jenis perkerasan rigid (beton). Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dan Peningkatan Ruas Jalan Pamotan - Gunem Kab. Rembang dan Pemeliharaan Jalan Sulang - Gunem - Pamotan, Kec. Sulang, Gunem, Pamotan, dilaksanakan pemeliharaan jalan untuk ruas jalan Pamotan – Gunem – Sulang, dengan perkerasan hotmix. b. Dalam penanganan jalan kondisi rusak akan dilaksanakan dengan pemeliharaan rutin/berkala.

REVISI KEMAHIRAN

1. Apa itu kemahiran? (10)

2. Apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran? (10)

Kemahiran adalah satu proses yang melibatkan penggunaan pengetahuan, pengalaman, dan tenaga untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kemahiran ini dapat dipelajari melalui latihan dan pengalaman.

3. Apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran? (10)

4. Apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran? (10)

5. Apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran? (10)

6. Apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran? (10)

7. Apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran? (10)

No	PERTANYAAN	JAWABAN
2.	Penjelasan tentang jadwal dan tahapan Pilkades serentak di seluruh wilayah Kabupaten Rembang.	Pertemuan rapat komisi A DPRD maupun pansus DPRD yang membahas raperda perubahan tentang pilkades bahwa terkait jadwal pelaksanaan pilkades bersifat rencana karena belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati, tidak ada putusan ataupun kesepakatan bersama dengan DPRD yang membahas jadwal pelaksanaan pilkades, sedangkan jadwal pelaksanaan merupakan bagian dari petunjuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah menjadi Tugas dan tanggung jawab eksekutif, yang pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Bupati. Namun demikian demi mengurangi keresahan karena kekosongan jabatan kepala desa, pelaksanaan pilkades tetap dilaksanakan pada bulan november tahun 2013 dengan mengacu pada perda dan perbup yang ada, dan teknis pelaksanaannya akan diawasi oleh masing-masing kecamatan.
3.	Pembatasan atas Penambahan Modal sampai dengan tahun 2017.	Pada dasarnya kami sependapat, bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD, PD BPR BKK Lasem, PD BKK Kaliori dan PT Bank Pembangunan Jawa Tengah, diharapkan penyertaan modal daerah sesuai dengan amanat Perda yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada anggaran tahun berkenaan sehingga tujuan penyertaan modal untuk pemupukan keuntungan dan untuk pelayanan publik dapat terwujud.

JANUARY	FEBRUARY
1. The first of January is a public holiday in most countries. It is a day of celebration and festivity. People often go to church or to a public square to watch a parade. In some countries, there are fireworks and bonfires. In others, there are religious processions. In still others, there are carnivals and masquerades. In some countries, there are special customs, such as the burning of straw effigies or the throwing of oranges. In some countries, there are special foods, such as lentils or ham. In some countries, there are special traditions, such as the wearing of new clothes or the giving of gifts. In some countries, there are special customs, such as the burning of straw effigies or the throwing of oranges. In some countries, there are special foods, such as lentils or ham. In some countries, there are special traditions, such as the wearing of new clothes or the giving of gifts.	2. The second of February is a public holiday in some countries. It is a day of celebration and festivity. People often go to church or to a public square to watch a parade. In some countries, there are fireworks and bonfires. In others, there are religious processions. In still others, there are carnivals and masquerades. In some countries, there are special customs, such as the burning of straw effigies or the throwing of oranges. In some countries, there are special foods, such as lentils or ham. In some countries, there are special traditions, such as the wearing of new clothes or the giving of gifts.
3. The third of January is a public holiday in some countries. It is a day of celebration and festivity. People often go to church or to a public square to watch a parade. In some countries, there are fireworks and bonfires. In others, there are religious processions. In still others, there are carnivals and masquerades. In some countries, there are special customs, such as the burning of straw effigies or the throwing of oranges. In some countries, there are special foods, such as lentils or ham. In some countries, there are special traditions, such as the wearing of new clothes or the giving of gifts.	4. The fourth of January is a public holiday in some countries. It is a day of celebration and festivity. People often go to church or to a public square to watch a parade. In some countries, there are fireworks and bonfires. In others, there are religious processions. In still others, there are carnivals and masquerades. In some countries, there are special customs, such as the burning of straw effigies or the throwing of oranges. In some countries, there are special foods, such as lentils or ham. In some countries, there are special traditions, such as the wearing of new clothes or the giving of gifts.
5. The fifth of January is a public holiday in some countries. It is a day of celebration and festivity. People often go to church or to a public square to watch a parade. In some countries, there are fireworks and bonfires. In others, there are religious processions. In still others, there are carnivals and masquerades. In some countries, there are special customs, such as the burning of straw effigies or the throwing of oranges. In some countries, there are special foods, such as lentils or ham. In some countries, there are special traditions, such as the wearing of new clothes or the giving of gifts.	6. The sixth of January is a public holiday in some countries. It is a day of celebration and festivity. People often go to church or to a public square to watch a parade. In some countries, there are fireworks and bonfires. In others, there are religious processions. In still others, there are carnivals and masquerades. In some countries, there are special customs, such as the burning of straw effigies or the throwing of oranges. In some countries, there are special foods, such as lentils or ham. In some countries, there are special traditions, such as the wearing of new clothes or the giving of gifts.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	<u>VI.FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL</u> Mohon penjelasan tentang capaian target pendapatan asli daerah sampai bulan agustus 2013 dan sector-sektor yang dapat menjadi potensi kenaikan PAD sebesar 10,15%	1 Menanggapi pertanyaan Fraksi PAN tentang kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 10,15%, perlu kami sampaikan bahwa kenaikan pendapatan yang kami rencanakan berdasarkan potensi pada masing-masing jenis pajak daerah dapat tercapai 100% sehingga sangat terukur tingkat capaiannya dan diharapkan rencana penerimaan secara keseluruhan maupun perjenis pendapatan di akhir tahun anggaran dapat tercapai.
2	Mohon dijelaskan tentang penyerapan anggaran sampai dengan bulan Agustus 2013	2 Penyerapan Total Belanja sampai dengan bulan Agustus 2013 sebesar Rp.550.947.179.132,00 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp.401.937.514.683,00 dan belanja langsung sebesar Rp.149.009.664.449,00.
3	Mengapa Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar Rp.500.000.000,00? Mohon penjelasannya.	3 Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Rembang tetap berkomitmen dalam penyediaan anggaran tidak terduga, adanya pandangan penurunan besaran belanja tidak terduga pada APBD Perubahan 2013, hal ini karena adanya pengalihan anggaran pada kegiatan penanggulangan bencana. Penyerapan Belanja dana tidak terduga yang selama ini dominan untuk penanggulangan bencana, dengan terbentuknya BPBD maka kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana dialihkan ke SKPD BPBD.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	<u>VII.FRAKSI BINTANG KEADILAN</u>	
1	Pengalokasian anggaran untuk penyertaan modal BUMD sebagaimana amanah dari Perubahan Perda No 7 Tahun 2011.	1 Dalam Perda No 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda No 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD, PD BPR BKK Lasem, PD BKK Kaliori dan PT Bank Pembangunan Jawa Tengah dalam rekomendasi penyertaan modal daerah dimulai pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sehingga dalam perubahan APBD 2013 tidak dianggarkan, pada APBD Induk telah dianggarkan sebesar Rp.5,2 M
2	Kenaikan harga kedelai	2 Pemda belum menganggarkan terkait dengan kenaikan harga kedelai, tetapi akan membantu operasi pasar terkait kenaikan harga kedelai
3	Diberlakukannya UU BPJS	3 Lihat jawaban pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
4	Rencana Pengangkatan CPNS Katagori 2	4 BKD Kab Rembang telah menyiapkan data kategori 2 dan berkoordinasi dengan BKD Provinsi, BKN maupun Menpan

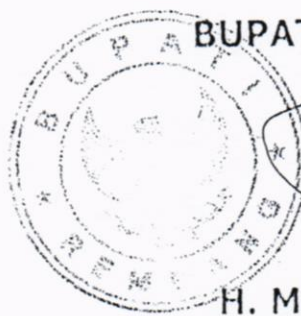
Rapat Dewan dan Hadirin yang Saya hormati,

Demikian jawaban atas pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Untuk selanjutnya terhadap hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan secara teknis, kami mempersilahkan untuk dibahas dan diperdalam dalam pembahasan komisi-komisi.

Akhirnya tidak lupa saya sampaikan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita sekalian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 12 September 2013

 **BUPATI REMBANG**

H. MOCH. SALIM

TAMBAHAN JAWABAN BUPATI

➤ FRAKSI PARTAI GOLKAR

Nomor 3. terimakasih akan kami tindaklanjuti dan perhatikan sesuai dengan mekanisme ketentuan aturan-aturan yang berlaku

➤ FRAKSI PPP

Nomor 2. Maaf ini bukan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Rembang sehingga perlu koordinasi lebih lanjut

Nomor 3. Lebih-lebih kepada Panitia dan BPK yang ada keengganan untuk melaksanakan kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan yang lelang ini banyak yang tidak bisa diselesaikan pada tahun ini karena masalah-masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Rembang kami mohon perhatiannya dan dukungannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang menimpa pada pejabat-pejabat kami agar kedepan pelaksanaan kegiatan yang sudah dianggarkan ini betul-betul bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, sekarang ini semua dilanda ketakutan, untung masih bisa dilakukan, di Kabupaten –kabupaten yang lain bahkan di Jepara Kabupaten lain hampir 90 % tidak dilaksanakan, sungguh ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kita semua kita dari eksekutif dan legislatif sudah berupaya semaksimal untuk membuat anggaran Rancangan ini untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat tetapi ditingkat pelaksanaanya jalannya tersendat karena ada pihak-pihak yang mengganggu jalannya ini semua, sehingga ini perlu kita sikapi bersama dan mudah-mudahan kedepan bisa lebih baik lagi

➤ FRAKSI PKB

Nomor1. Uraianya panjang sekali tapi saya singkat saja jadi kemacetan di jalur pantura kita sudah berusaha mengatasi hal tersebut, setiap saat bahkan karena rumah saya kebetulan sebelah barat jembatan ketika ada antrian panjang saya langsung kontak Kepala Dinas Perhubungan pak Suyono, langsung saya kontak untuk menurunkan petugasnya di lapangan setiap saat itu, saya tidak mungkin memerintahkan lantasi, yang bisa saya perintahkan adalah Dinas Perhubungan. Kami sudah berupaya mungkin e..rekan-rekan bisa lihat di Juwana sebenarnya bisa diatasi tapi kemacetan sangat luar biasa, Juwana mungkin

kepeduliannya kurang dari pemerintah Kabupaten Rembang dari pemerintah setempat, untuk kondisi ini mau tidak mau, suka tidak suka kita berupaya untuk terus menekan penyedia jasa dan Bina Marga Balai Besar Jalan yang di Surabaya maupun perwakilan yang di Pati untuk bisa diselesaikan dengan baik. Hadirin yang saya hormati barangkali kedepan kalau masih memungkinkan e... saya sungguh sangat berharap jalan yang kita punya sekarang ini jalan dari Soklin masuk sampai ke jeruk e.. alangkah baiknya kalau bisa dilanjutkan tembus ke Banyudono, ini perlu ada dirintis barangkali ada kedepan kalau ini bisa direncanakan dengan baik. Diperencanaan di Bappeda sudah ada, tetapi masalahnya adalah pembebasan tanah karena kita hanya dibatasi maksimal hanya 1 hektare dibawah kewenangan kita diatas itu harus dikoordinasi dengan BPN atau BPN yang melaksanakan dan mekanisme ini sampai sekarang juga belum jelas jurklak dan jurklis sehingga kami kesulitan untuk melaksanakan hal tersebut, sehingga patokan kami masih di 1 hektare, barangkali secara bertahap kami bisa dibantu selain dari jajaran birokrasi sendiri dengan kawan-kawan legislatif didapil sana barangkali bisa melakukan pendekatan kepada Kepala Desa dan masyarakat untuk Sit Up jalan. Saya rasa tidak begitu jauh hanya sekitar 1 sampai 2 km barangkali tembus dijalan Banyudono, ini bisa menjadi jalur alternatif dari timur ini langsung masuk keselatan yang dibarat dari timur ini bisa langsung masuk keselatan yang dari barat barangkali tetap satu arah e... dari barat langsung menuju ke Surabaya .

- Nomor 2. Sudah saya mohon maaf, sudah saya sampaikan didepan tadi, kendalanya jelas **tidak berani melaksanakannya**, jadi Silpa tinggi ini rata-rata anggaran DAK. Tahun ini saja DAK baru terserap uang muka saja hanya baru 30% kalau tidak salah, baru 3%, baru 3%, semua anggaran Pendidikan yang mendominasi 60% atau kurang lebih sekitar 33 Milyard sekian Zero, sama sekali tidak dilaksanakan, jadi kondisinya bukan kami kurang benar atau kurang pas dalam merencanakan, kondisinya adalah demikian jadi mohon dimengerti ini terjadi DAK sama sekali tidak dilaksanakan, SDM juga sama ada program DAK sama sekali tidak dilaksanakan karena Jurklak dan jurnisnya juga tidak jelas. Contohnya saja PLTS atau Pembangkit Listrik

Tenaga Surya, jujur saja keberhasilan hanya sekian persen saja, tetapi bagi desa yang sudah menerima Program Daerah Tertinggal tidak boleh lagi dialokasikan untuk DAK padahal program DAK ini hanya khusus untuk listrik yang untuk penerangan diluar listrik jadi pakai energi tenaga surya, pakai biogas dan lain-lain, jadi ini saya rasa penekanannya Dana alokasi Khusus yang tidak bisa dilaksanakan.

Nomor 3. jadi ini dirinciannya ada tetapi akan saya sampaikan secara umum bahwa diprogram JKRS ini diperuntukkan untuk semua warga masyarakat yang mempunyai KTP Rembang. Apakah yang terjadi ? yang terjadi ada warga tetangga Rembang seperti Tuban, Blora lalu e.... Batangan yang ber KTP Rembang untuk bisa berobat gratis di Rembang artinya kita rugi, kita membantu yang bukan rakyat kita. Yang ke dua saya merasa kalau orang kaya atau orang mampu dibiayai dengan JKRS itu artinya kita mendzolimi orang miskin, ini penekanan saya, saya berharap terus ditekankan hal itu karena sudah ada Jamkesmas pusat lalu Jamkesda dari entah pemerintah Propinsi kita dampingi JKRS, saya masih memberikan peluang termasuk di Perda dan aturan maen di JKRS pada masyarakat yang betul-betul mengalami musibah, meskipun kondisinya mampu lalu bisa jadi jatuh miskin karena pembiayaannya sangat besar bisa minta rekomendasi Bupati selanjutnya saya gratiskan melalui JKRS, sudah banyak mungkin sudah ada ribuan yang sudah saya ACC, jadi ini sebenarnya target saya untuk efisiansi JKRS ini kedepan kita alihkan bantuan ini bermanfaat kepada anak didik kita, melanjutkan dari SMP ke SMA yang sekarang ini masih 70% tadinya hanya 42 % sekitar tahun 2008 sekarang sudah mencapai mencapai 70%. Sekarang kita sudah membuka pendaftaran di Akademi Komunitas, kemarin saya sampaikan pendaftan gratis lalu pelaksanaan mandi, uang kuliah dan lain sebagainya saya minta masih dirumuskan mana-mana yang masih kita bantu supaya semakin hari pendidikan di Rembang ini semakin meningkat, Akademi Komunitas adalah D2 Diploma Dua jurusanya adalah e...Budidaya Perikanan dan Pengolahan Hasil Perikanan, Insyaallah semua jurusan ini terserap di perusahaan perikanan di seluruh Indonesia.

Nomor 4. Saya rasa wajar jalan pantura setiap tahunnya perawatan, Hotmix saya luncurkan tahun 2006 lanjut 2007, 2008 selesai, sekarang 2013 sudah berusia. yang pertama seperti jalan Kaliori Sumber yang berusia 7, 6 sampai 7 tahun, jalan Kragan Sedan itu awal sekali, e.... kalo nggak salah Pandangan Sedan ini sudah hampir 8 tahun, sehingga wajar kalau sekarang sudah mengalami kerusakan, kedepan saya berkomitmen tentunya terhadap e... rekan-rekan di Dewan mempunyai komitmen yang sama untuk menyelesaikan jalan- jalan kkecamatan minimal baik dan maksimal bisa dilebarkan sehingga arus lalu lintas dapat dilewati dengan baik, Alhamdulillah akses-akses dipelosok-pelosok Desa sudah bisa diakses.

➤ **FRAKSI PDI PERJUANGAN**

Nomor 1. Masih ada beberapa yang belum tercantum disini adalah Sulang. Sulang Sumber kaliori juga sudah masuk kalau tidak salah sekitar 2 Milyard

Nomor 2. Insyallah akan dibagi menjadi 3 Wilayah tidak serentak, jadi wilayah barat, tengah dan Wilayah Timur agar pengamannya lebih mudah.

➤ **FRAKSI BINTANG KEADILAN**

Nomor4. Untuk CPNS Umum pada tahun ini alokasi untuk Pemerintah Kabupaten Rembang tidak dapat.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

Hari : JUM'AT
Tanggal : 27 September 2013
Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
 1. Pembukaan.
 2. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013;
 3. Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013;
 4. Persetujuan Penetapan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013 ;
 5. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013.
 6. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
 1. Nama : Ir. H. SUNARTO
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
 1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Demokrat	: 7 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	: 44 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 6 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 6 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 6 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 4 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 4 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 4 orang
Jumlah	: 34 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 1 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 2 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 1 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 1 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 1 orang
Jumlah	: 10 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : Ir. H. SUNARTO

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat	Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang saya hormati	Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Ketua Pengadilan Negeri Rembang
Yang saya hormati	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Pimpinan Partai Politik, LSM, para wartawan dan semua undangan lainnya yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti Rapat Paripurna Ketiga (III) DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka membahas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 dalam keadaan sehat walafiat.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Sebelum memasuki acara pokok perlu kami sampaikan bahwa Rapat Paripurna pada hari ini merupakan Rapat Paripurna terakhir dalam membahas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2013,

sebagaimana yang telah terjadwalkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 9 September 2013. Perlu diketahui bahwa pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 ini cukup menguras energi dan dilalui dengan berbagai tahapan rapat-rapat dalam pembahasannya, baik internal maupun eksternal. Semua ini dilakukan untuk menetapkan dan memutuskan arah Kebijakan Daerah Kabupaten Rembang dalam menentukan posisi Anggaran Daerah yang efisien dan efektif sehingga dapat mencakup kepentingan Aparatur maupun Kepentingan Publik demi terwujudnya Masyarakat Kabupaten Rembang ke depan yang lebih baik.

Tahapan tingkat internal yaitu rapat-rapat Legislatif seperti Rapat Komisi, Rapat Badan Anggaran internal, Rapat Banggar dengan Pimpinan Komisi serta Rapat Fraksi. Sedang ditingkat eksternal yaitu rapat-rapat DPRD bersama Eksekutif seperti Komisi dengan Instansi terkait dan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Rembang . Dan Alhamdulillah semua ini dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Untuk mempersingkat waktu, akan kami bacakan acara yang akan berlangsung pada Rapat Paripurna hari ini, yaitu :

1. Pembukaan.
2. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013;
3. Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013;
4. Persetujuan Penetapan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013 ;

5. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013.
6. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Perlu kami sampaikan bahwa ketentuan kuorum dalam Rapat Paripurna Ketiga (III) hari ini, sama dengan ketentuan kuorum yang berlaku dalam Rapat- rapat Paripurna sebelumnya, baik Rapat Paripurna Pertama (I) maupun Rapat Paripurna Kedua (II) membahas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013 yakni dihadiri dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa anggota DPRD Kabupaten Rembang sejumlah 44 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebanyak 34 orang. Dengan demikian ketentuan kuorum rapat telah terpenuhi.

Untuk itu Rapat Paripurna dapat kita mulai, dan dengan membaca "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 10.15 WIB Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk Palu 3 Kali)

Peserta Rapat dan hadirin yang terhormat.

Kita masuki acara yang kedua, yaitu Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013.

Kepada Sekretaris Badan Anggaran Sdr. Drs. Achmad Mualif dipersilahkan.

===== LAPORAN BADAN ANGGARAN =====

**(dibacakan oleh Sdr. Drs. ACHMAD MUALIF Sekretaris DPRD
Kab. Rembang Laporan terlampir)**

Terima kasih kepada Sekretaris Badan Anggaran atas penyampaian laporannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Menginjak acara ketiga yaitu Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun 2013. Kepada Saudara-saudara anggota Fraksi yang akan menyampaikan Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun 2013, saya persilahkan untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Fraksi Demokrat | : EDI KARTONO, SPd |
| 2. Fraksi Partai Golkar | : KHAIRUL MUTHAKIM |
| 3. Fraksi Persatuan Pembangunan: | SA'DULLAH |
| 4. Fraksi PKB | : M. ASNAWI, SPdi |
| 5. Fraksi PDI-Perjuangan | : A. MASKUR RUKHANI |
| 6. Fraksi Amanat Nasional | : H. MOH. NURHASAN |
| 7. Fraksi Bintang Keadilan | : ACHAMAD ZAMHURI |

Selanjutnya dimulai dari juru Bicara Fraksi Demokrat sampai dengan Fraksi Bintang Keadilan, secara berurutan saya persilahkan untuk menyampaikan pendapat akhirnya.

Dipersilahkan.

Fraksi	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Fraksi Demokrat	✓	-	-
Fraksi Partai Golkar	✓	-	-
Fraksi Persatuan Pembangunan	✓	-	-
Fraksi PKB	✓	-	-
Fraksi PDI-Perjuangan	✓	-	-
Fraksi Amanat Nasional	✓	-	-
Fraksi Bintang Keadilan	✓	-	-

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara-saudara yang telah mewakili Fraksinya masing-masing dalam Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun 2013.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Setelah mendengar Laporan Badan Anggaran dan Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013, maka dapat saya simpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 dapat diterima dan disetujui.

Namun untuk keabsahan Peraturan Daerah tersebut perlu saya tawarkan terlebih dahulu kepada Saudara-Saudara Anggota DPRD yang hadir :

“Apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 dan Rekomendasi yang disampaikan Badan Anggaran DPRD melalui Laporrannya dapat disetujui ?”

=====Semua Anggota Rapat setuju=====

(Ketuk Palu 1 Kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Dengan telah disetujuinya Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 tersebut diatas menjadi Peraturan Daerah, maka acara Rapat Paripurna hari ini dapat dilanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu Penyampaian Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013.

Kepada saudara Bupati dipersilahkan

=====PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR BUPATI =====

(dibacakan oleh Bupati Rembag H. MOCH SALIM teks terlampir)

Terima kasih kepada saudara Bupati Rembang, yang telah menyampaikan “ *Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013*”.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Acara demi acara telah kita lalui dengan seksama, akhirnya terima kasih saya sampaikan kepada Bupati beserta jajarannya, rekan-rekan Anggota DPRD baik yang masuk dalam Komisi-Komisi maupun Badan Anggaran serta Sekretaris DPRD beserta seluruh stafnya yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sehingga dapat

menyelesaikan pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013 sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan.

-Kepada saudara-saudara yang telah mengikuti Rapat , kami atas nama Pimpinan DPRD mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian, kehadiran serta kebersamaannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan Rapat Paripurna pada hari ini.

Selanjutnya dengan mengucap “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 11.45 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk Palu 3 Kali)

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**


Ir. H. SUNARTO


Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN :RISALAH RAPAT PARIPURNA III DPRD
KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS
RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013**

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD
dan Camat Se Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II : Laporan Badan Anggaran Atas Hasil
Pembahasan Raperda Perubahan APBD
Kabupaten Rembang Tahun 2013;

LAMPIRAN III : Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil
Pembahasan Raperda Perubahan APBD
Kabupaten Rembang Tahun 2013;

LAMPIRAN IV : Penyampaian Pendapat Akhir Bupati atas
Hasil Pembahasan Raperda tentang
Perubahan APBD Kabupaten Rembang
Tahun 2013;

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 27 SEPTEMBER 2013
PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<u>FRAKSI DEMOKRAT</u>				
1	Ir. H. SUNARTO	Ketua	1	
2	H. ISLAHUDDIN	Anggota	2	
3	H. HARNO, SE	Anggota	3	
4	GUNASIH, SE	Anggota	4	
5	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE	Anggota	5	
6	H. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	6	
7	EDI KARTONO, S Pd	Anggota	7	
8		Anggota	8	
<u>FRAKSI PARTAI GOLKAR</u>				
9	CATUR WINANTO, SH	Wakil Ketua	9	
10	H. ISMARI	Anggota	10	
11	SUCI RAHAYU, SH	Anggota	11	
12	JOKO SOESILO	Anggota	12	
13	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	13	
14	KHAIRUL MUTAKIM	Anggota	14	
15	CHAIRUL ANWAR, S.Sos	Anggota	15	
16	SRIREJEKI, SH	Anggota	16	
<u>FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN</u>				
17	H. MAJID KAMIL MZ	Wakil Ketua	17	
18	H. SA'DULLAH	Anggota	18	
19	H.M. MURSYID, ST	Anggota	19	
20	H. HAKAM, SH	Anggota	20	
21	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	21	
22	KODRIYAH, S Pd	Anggota	22	
23	H. YUDIANTO, SH	Anggota	23	
<u>FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA</u>				
24	SUWANTO	Wakil Ketua	24	
25	MUHAMMAD ASNAWI, S Pd	Anggota	25	
26	H. SUTARYO SHOLEH	Anggota	26	
27	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	27	
28	H.M. NOOR HASAN, SH	Anggota	28	
29	H. SHOLEH, BA	Anggota	29	
30	H.M. SHODIQIN YASIR	Anggota	30	

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	<u>FRAKSI PDI PERJUANGAN</u>			
31	JASMANI	Anggota	31	
32	SUPRIHADI	Anggota	32	
33	SUMARSIH	Anggota	33	
34	RIDWAN, SH, MH	Anggota	34	
35	A. MASKUR RUKHANI	Anggota	35	
	<u>FRAKSI AMANAT NASIONAL</u>			
36	JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE	Anggota	36	
37	II. MOH. NURIHASAN, SH	Anggota	37	
38	MOH. IMAM ZARKASI	Anggota	38	
39	SUKARMAIN	Anggota	39	
40	SAHNINGSIH, SE	Anggota	40	
	<u>FRAKSI BINTANG KEADILAN</u>			
41	dr. ROCHMAD ISNAINI	Anggota	41	
42	ACHMAD ZAMHURI	Anggota	42	
43	MUNTHOHID, SH	Anggota	43	
44	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	44	
45	DHIAN RAHWENI DEWI	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA

Ir. H. SUNARTO

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 27 SEPTEMBER 2013
PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. MOCH SALIM	Bupati Rembang	1.
2.	H. ABDUL HAFIDZ	Wakil Bupati Rembang	2.
3.	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	3.
4.		Kejaksaan Negeri Rembang	4.
5.		Pengadilan Negeri Rembang	5.
6.		Dandim 0720 Rembang	6.
7.	IG EDE ARDA	Kepolisian Resort Rembang	7.
8.		Pengadilan Agama Kab. Rembang	8.

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

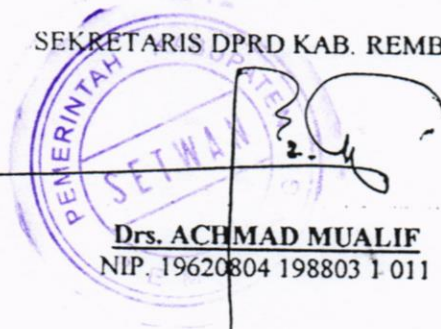

Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 27 SEPTEMBER 2013
 PUKUL : 09.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	Regi H.	1
2	CAMAT KALIORI	Chris Prasetyana	2
3	CAMAT SUMBER	HERIYONO	3
4	CAMAT SULANG	TEGUH G	4
5	CAMAT BULU	SUSWANTORO	5
6	CAMAT PAMOTAN	M. Wiyato	6
7	CAMAT GUNEM	TEGUH G	7
8	CAMAT SALE	Kurnia	8
9	CAMAT LASEM	Supriat	9
10	CAMAT PANCUR	Satrio Wibisono	10
11	CAMAT SEDAN		11
12	CAMAT SLUKE	Subagyo NH	12
13	CAMAT KRAGAN		13
14	CAMAT SARANG	Eddy Cuswanto	14

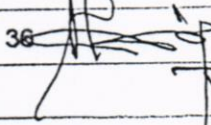
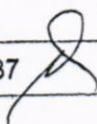
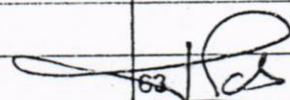
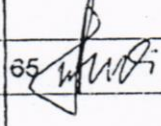
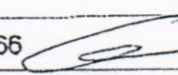
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG


Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 27 SEPTEMBER 2013
 PUKUL : 09.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Har Effendi	SAS	1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	A. JAWANI	R. III	7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Ach sanda	Bag Tata	8
9	BAG. HUKUM	Eddy Dolo P	Wakil	9
10	BAG. HUMAS	YOHANIS RW	Humas	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Gautama	Aspan	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	Subhan	Kabag	12
13	BAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	Abdullah	Korwil	13
14	BAG. ADM. KEUANGAN	Indo Haryanto	Korwil	14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	Indo Sulaiman	Aspy	15
16	BAG. UMUM	ISMAIC		16
17	DPPKAD	MUSTAIN	DPPKAD	17
18	INSPEKTORAT			18
19	BAPPEDA	Haris S	Bappeda	19
20	BPMPKB	Slamet Bardi	Korwil	20
21	BKD	A. DADI	Sekretaris	21
22	BKP & P4K	Dr. Purnomo	K. Badan	22
23	B P B D	Sunardi	Korwil	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	Troto lo	S. Korwil	24
25	DINAS KESEHATAN	ARIS. S.	DKK	25
26	DINAS PENDIDIKAN			26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	Murtah	Korwil	27
28	DINTANHUT	Nurhidayati		28
29	DINLUTKAN	Suparman		29
30	DINHUBKOMINFO	Baffan	Korwil	30
31	DINAS DUKCAPIL	MURTOHO H		31
32	DINSOSNAKERTRANS			32
33	DINBUDPARPORA	Sunardi	Korwil	33

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
34	DINAS ENERGI & SDM	Maryasa	Sebidan	34 
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Purandi S	ka	35 
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	Didih ✓	Kesbang	36 
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Esi W	ke turban	37 
38	KANTOR PPT			38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	Y. E. SUDHARNO	RSUD, RKS	39 
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41
42	P D A M	Hernawan	Ko. Adm Kcu	42 
43	PERCETAKAN DAERAH			43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	BKK LASEM			47
48	R B S J			48
49	B P N KAB. REMBANG			49
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			50
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG			52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KPU KAB. REMBANG			57
58	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			58
59	KANTOR POS DAN GIRO			59
60	TELKOM REMBANG			60
61	PLN CAB. REMBANG			61
62	PANWASLU KAB. REMBANG			62
63	TP PKK	Adhaya		63 
64	PERA (MA)	MURICHI		64 
65	Radio Citra Bahari FM	MASUDI	Reng-dan	65 
66		A. War tando	SA FPG	66 
67				67
68				68
69				69
70				70

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100
101				101
102				102

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Dis. ACHMAD MUALIF

NIP. 19610804 198803 1 011

LAPORAN BADAN ANGGARAN
DPRD KABUPATEN REMBANG



MEMBAHAS

RAPERDA PERUBAHAN APBD
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013

DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 perlu diadakan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ;
2. Bahwa hasil pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 dilaporkan oleh Badan Anggaran pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

II. DASAR

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013;
8. Surat Bupati Rembang Nomor 188.3/5793/2013 tanggal 30 Agustus 2013 perihal Pengiriman Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013;
9. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
10. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dengan TAPD Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 9 September 2013 yang mengagendakan Jadwal Rapat-rapat DPRD dalam membahas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013.

III. PELAKSANAAN

- a. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada tanggal 13 September 2013 Jam 09.00 WIB dengan agenda penjeiasan lanjutan atas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013.
- b. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi – komisi DPRD Kabupaten Rembang yang dilakukan pada tanggal 13 September 2013 Jam 13.00 WIB membahas Strategi dan Distribusi Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.
- c. Rapat-rapat Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Rembang dengan SKPD / Instansi terkait dilaksanakan pada :
Hari : Senin s/d Jum'at
Tanggal : 16 s/d 20 September 2013
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Komisi A,B,C dan D DPRD Kabupaten Rembang
Acara : Pendalaman Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013

d. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Rembang pada :

Hari : Senin
Tanggal : 23 September 2013
Jam : 09.30 WIB
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Acara : Penyampaian Laporan Komisi atas Pendalaman Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013

e. Rapat Badan Anggaran Internal pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 23 September 2013
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Acara : Pembahasan atas Laporan Komisi terhadap Pendalaman Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013

f. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 25 September 2013
Jam : 09.30 WIB
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Acara : Sinkronisasi dan koordinasi hasil pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

IV. HASIL RAPAT

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013, sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Adapun ringkasannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2013

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	PEMBAHASAN		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		PERSETUJUAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7 = 6-3	8 = 6-4
1	PENDAPATAN DAERAH	1.108.077.978.224	1.117.992.107.196	9.914.128.972	1.122.999.341.196	14.921.362.972	5.007.234.000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	110.867.345.000	122.125.314.700	11.257.969.700	127.132.548.700	16.265.203.700	5.007.234.000
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	24.002.000.000	26.404.677.000	2.402.677.000	29.742.877.000	5.740.877.000	3.338.200.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	23.877.796.000	25.681.195.000	1.803.399.000	26.481.195.000	2.603.399.000	800.000.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.500.105.800	4.977.434.000	(522.671.800)	4.977.434.000	(522.671.800)	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57.487.443.200	65.062.008.700	7.574.565.500	65.931.042.700	8.443.599.500	869.034.000
1.2	Dana Perimbangan	734.617.850.000	729.834.164.000	(4.783.686.000)	729.834.164.000	(4.783.686.000)	-
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37.573.020.000	32.789.334.000	(4.783.686.000)	32.789.334.000	(4.783.686.000)	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	640.273.360.000	640.273.360.000	-	640.273.360.000	-	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	56.771.470.000	56.771.470.000	-	56.771.470.000	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	262.592.783.224	266.032.628.496	3.439.845.272	266.032.628.496	3.439.845.272	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya	41.653.651.000	43.312.222.496	1.658.571.496	43.312.222.496	1.658.571.496	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	148.729.060.224	150.500.902.000	1.771.841.776	150.500.902.000	1.771.841.776	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	72.210.072.000	72.219.504.000	9.432.000	72.219.504.000	9.432.000	-
2.	BELANJA DAERAH	1.121.777.868.224	1.180.338.623.409	58.560.755.185	1.185.345.857.409	63.567.989.185	5.007.234.000
2.1	Belanja Tidak Langsung	709.626.224.224	715.089.642.213	5.463.417.989	719.407.742.213	9.781.517.989	4.318.100.000
2.1.1	Belanja Pegawai	627.627.141.224	632.291.245.213	4.664.103.989	632.457.245.213	4.830.103.989	166.000.000
2.1.2	Belanja Bunga	37.000.000	37.000.000	-	37.000.000	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	723.000.000	-	(723.000.000)	-	(723.000.000)	-
2.1.4	Belanja Hibah	40.055.995.000	43.357.137.000	3.301.142.000	47.026.071.000	6.970.076.000	3.668.934.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.342.338.000	4.455.885.000	(1.886.453.000)	5.014.051.000	(1.328.287.000)	558.166.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	33.840.750.000	34.448.375.000	607.625.000	34.373.375.000	532.625.000	(75.000.000)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	500.000.000	(500.000.000)	500.000.000	(500.000.000)	-

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	PEMBAHASAN		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		PERSETUJUAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7 = 6-3	8 = 6-4
2.2	Belanja Langsung	412.151.644.000	465.248.981.196	53.097.337.196	465.938.115.196	53.786.471.196	689.134.000
2.2.1	Belanja Pegawai	59.279.640.200	64.488.145.296	5.208.505.096	64.860.786.596	5.581.146.396	372.641.300
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	168.454.345.470	205.284.509.570	36.830.164.100	206.581.601.270	38.127.255.800	1.297.091.700
2.2.3	Belanja Modal	184.417.658.330	195.476.326.330	11.058.668.000	194.495.727.330	10.078.069.000	(980.599.000)
	Jumlah Belanja	1.121.777.868.224	1.180.338.623.409	58.560.755.185	1.185.345.857.409	63.567.989.185	5.007.234.000
	surplus (devisit)	(13.699.890.000)	(62.346.516.213)	(48.646.626.213)	(62.346.516.213)	(48.646.626.213)	-
3.	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	18.954.890.000	67.601.516.213	48.646.626.213	67.601.516.213	48.646.626.213	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	18.954.890.000	67.601.516.213	48.646.626.213	67.601.516.213	48.646.626.213	-
	Jumlah penerimaan Pembiayaan	18.954.890.000	67.601.516.213	48.646.626.213	67.601.516.213	48.646.626.213	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.255.000.000	5.255.000.000	-	5.255.000.000	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.200.000.000	5.200.000.000	-	5.200.000.000	-	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	55.000.000	55.000.000	-	55.000.000	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.255.000.000	5.255.000.000	-	5.255.000.000	-	-
	Pembiayaan Netto	13.699.890.000	62.346.516.213	48.646.626.213	62.346.516.213	48.646.626.213	-
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	-	-	-	-	-	-

Rincian hasil pembahasan, dituangkan dalam lampiran Laporan ini.

B. REKOMENDASI

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan untuk memperlancar kegiatan pada Dinas Pendidikan agar Bupati segera menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
2. Dalam rangka persiapan pembangunan Puskesmas Sarang II agar dilakukan reklamasi terlebih dahulu terhadap lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Puskesmas.
3. Agar penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Saudara Bupati.
4. Pencairan Bantuan Sosial kepada kelompok nelayan agar dipermudah namun tetap sesuai aturan.
5. Kegiatan Pengarus Utamaari Gender (PUG) di Kecamatan agar dipermudah proses pencairannya.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan Perda Kabupaten Rembang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 26 September 2013

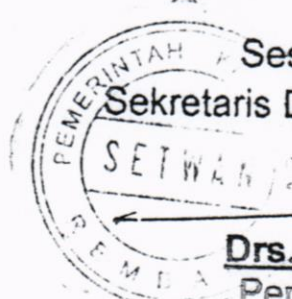
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

BADAN ANGGARAN
Ketua, Sekretaris

Ttd

ttd

Ir. H. SUNARTO Drs. ACHMAD MUALIF

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD R PERUBAHAN APBD 2013

NO.	SKPD	JUMLAH			
		SEBELUM PERUBAHAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH
1	2		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
4			5	6	7
1	DINAS PENDIDIKAN		437,117,033,224	70,319,823,000	507,436,862,224
2	DINAS KESEHATAN	5,994,464,000	33,451,562,000	30,308,355,000	69,759,917,000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	54,000,000,000	21,181,380,000	61,791,400,000	82,972,780,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	1,105,000,000	12,264,171,000	107,929,943,000	120,194,114,000
5	BAPPEDA		2,707,416,000	6,458,097,000	9,165,513,000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,300,000,000	4,786,951,000	8,579,296,000	13,366,247,000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP		1,764,393,000	1,951,683,000	3,716,076,000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	465,000,000	2,351,621,000	2,720,050,000	5,071,671,000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		7,697,126,000	5,286,153,000	12,983,279,000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		4,452,310,000	1,910,700,000	6,363,010,000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	2,317,903,200	8,123,457,000	4,266,375,000	12,389,832,000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1,444,544,000	1,994,110,000	3,438,654,000
13	SATPOL PP		2,916,151,000	1,265,537,600	4,181,688,600
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1,309,059,000	1,779,600,000	3,088,659,000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		6,899,372,000	-	6,899,372,000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		542,184,000	-	542,184,000
17	SETDA	1,684,408,000	10,807,859,000	18,285,239,000	29,093,098,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	21,000,000	-	4,770,400,000	4,770,400,000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)		-	430,000,000	430,000,000
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	90,000,000	10,807,859,000	3,244,600,000	14,052,459,000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)		-	3,732,125,000	3,732,125,000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	45,000,000	-	560,000,000	560,000,000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)		-	2,883,114,000	2,883,114,000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)		-	885,000,000	885,000,000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	1,528,408,000	-	1,200,000,000	1,200,000,000
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)		-	580,000,000	580,000,000
18	SEKRETARIAT DPRD		2,606,534,000	15,185,444,000	17,991,978,000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,028,699,631,024	92,600,760,000	14,481,546,000	107,082,306,000
a	(SKPD)	31,488,997,800	10,601,677,000	14,481,546,000	25,083,223,000
b	(PPKD)	997,210,633,224	81,999,083,000	-	81,999,083,000
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		3,100,179,000	2,115,940,000	5,216,119,000
21	BKD		2,913,444,000	2,719,773,900	5,633,217,900
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU		1,070,391,000	719,100,000	1,789,491,000
23	KECAMATAN REMBANG		4,825,533,000	372,391,000	4,997,924,000
24	KECAMATAN KALIORI		1,623,833,000	370,934,000	1,994,767,000
25	KECAMATAN SULANG		1,776,326,000	230,000,000	2,006,326,000
26	KECAMATAN SUMBER		1,342,193,000	210,472,000	1,552,665,000
27	KECAMATAN BULU		1,270,034,000	259,472,000	1,529,506,000
28	KECAMATAN LASEM		1,833,558,000	256,948,000	2,090,506,000
29	KECAMATAN PANCUR		1,944,633,000	238,472,000	2,183,105,000
30	KECAMATAN SLUKE		1,301,984,000	208,472,000	1,510,456,000
31	KECAMATAN PAMOTAN		1,417,038,000	220,746,000	1,637,784,000
32	KECAMATAN GUNEM		1,423,894,000	217,434,000	1,641,328,000
33	KECAMATAN SALE		1,293,234,000	266,934,000	1,560,168,000
34	KECAMATAN KRAGAN		1,561,718,000	262,744,000	1,824,462,000
35	KECAMATAN SEDAN		1,394,873,000	335,858,000	1,730,731,000
36	KECAMATAN SARANG		1,609,726,000	260,744,000	1,870,470,000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN		7,177,923,000	2,611,000,000	9,788,923,000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		1,619,969,000	1,658,860,000	3,278,849,000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	133,472,000	5,522,896,000	14,130,314,000	19,653,210,000
40	DINAS ESDM		2,200,377,000	8,884,112,000	11,084,489,000
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	996,000,000	2,485,903,000	2,715,033,000	5,200,936,000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	10,382,100,000	3,892,662,000	18,372,532,500	22,265,194,500
	JUMLAH	1,108,077,978,224	709,626,224,224	412,151,641,000	1,121,777,868,224

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD R PERUBAHAN.

NO.	SKPD	JUMLAH			
		SETELAH PERUBAHAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	2	8	9	10	11=9+10
1	DINAS PENDIDIKAN		449,163,474,213	75,109,778,000	524,273,252,213
2	DINAS KESEHATAN	6,753,796,000	32,788,561,000	34,747,840,000	67,536,401,000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	60,000,000,000	20,959,772,000	67,791,400,000	88,751,172,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	1,105,000,000	11,736,232,000	126,118,553,400	137,854,785,400
5	BAPPEDA		2,631,780,000	7,414,097,000	10,045,877,000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,411,000,000	4,423,733,000	11,045,500,000	15,469,233,000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP		1,989,393,070	2,235,433,000	4,224,826,000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	415,000,000	2,121,148,000	2,987,550,000	5,108,698,000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		7,411,293,000	6,203,523,000	13,614,816,000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		4,265,950,000	2,669,066,000	6,935,016,000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMMK	2,392,803,200	7,504,394,000	5,139,875,000	12,644,269,000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1,264,607,000	2,247,270,000	3,511,877,000
13	SATPOL PP		2,741,737,000	1,315,537,600	4,057,274,600
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1,365,375,000	3,729,900,000	5,095,275,000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		6,899,372,000	-	6,899,372,000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		529,599,000	-	529,599,000
17	SETDA	2,437,449,000	11,060,512,000	20,368,684,000	31,429,196,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	21,000,000	-	5,070,400,000	5,070,400,000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)		-	450,000,000	450,000,000
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	90,000,000	11,060,512,000	3,472,600,000	14,533,112,000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)		-	4,491,625,000	4,491,625,000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	42,500,000	-	901,595,000	901,595,000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)		-	2,892,464,000	2,892,464,000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)		-	1,035,000,000	1,035,000,000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	2,283,949,000	-	1,475,000,000	1,475,000,000
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)		-	580,000,000	580,000,000
18	SEKRETARIAT DPRD		2,888,347,000	15,053,137,000	17,941,484,000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,029,963,651,996	91,686,942,000	14,809,046,000	106,495,988,000
a	(SKPD)	34,097,059,500	8,888,545,000	14,809,046,000	23,697,591,000
b	(PPKD)	995,866,792,496	82,798,397,000	-	82,798,397,000
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		2,720,381,000	2,264,469,000	4,984,850,000
21	BKD		2,814,723,000	3,628,509,000	6,443,232,000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU		1,057,360,000	781,130,000	1,838,490,000
23	KECAMATAN REMBANG		4,299,830,000	515,091,000	4,814,921,000
24	KECAMATAN KALIORI		1,613,275,000	461,084,000	2,074,359,000
25	KECAMATAN SULANG		1,593,996,000	316,259,596	1,910,255,596
26	KECAMATAN SUMBER		1,291,620,000	281,872,000	1,573,492,000
27	KECAMATAN BULU		1,380,972,000	373,772,000	1,754,744,000
28	KECAMATAN LASEM		1,799,398,000	336,448,000	2,135,846,000
29	KECAMATAN PANCUR		1,891,027,000	330,622,000	2,221,649,000
30	KECAMATAN SLUKE		1,160,294,000	263,672,000	1,423,966,000
31	KECAMATAN PAMOTAN		1,359,050,000	361,896,000	1,720,946,000
32	KECAMATAN GUNEM		1,308,290,000	281,234,000	1,589,524,000
33	KECAMATAN SALE		1,293,234,000	225,684,000	1,618,918,000
34	KECAMATAN KRAGAN		1,547,194,000	368,094,000	1,915,288,000
35	KECAMATAN SEDAN		1,134,579,000	419,408,000	1,553,987,000
36	KECAMATAN SARANG		1,470,768,000	353,394,000	1,824,162,000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN		7,226,774,000	2,753,850,000	9,980,624,000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		1,533,813,000	1,692,273,000	3,226,086,000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	133,472,000	5,300,027,000	16,414,749,000	21,714,776,000
40	DINAS ESDM		2,075,481,000	11,566,965,100	13,642,446,100
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	996,000,000	2,218,258,000	3,374,783,000	5,593,041,000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11,383,735,000	3,567,077,000	18,797,532,500	22,364,609,500
	JUMLAH	1,117,992,107,196	715,089,642,213	465,248,981,196	1,180,338,623,409

NO.	SKPD	BERTAMBAH (BERKURANG)			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	12=8-4	13=9-5	14=10-6	15=13+14
1	DINAS PENDIDIKAN	-	12,046,440,989	4,789,949,000	16,836,389,989
2	DINAS KESEHATAN	759,332,000	(663,001,000)	4,439,485,000	3,776,484,000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	6,000,000,000	(221,608,000)	6,000,000,000	5,778,392,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	(527,939,000)	18,188,610,400	17,660,671,400
5	BAPPEDA	-	(75,636,000)	956,000,000	880,364,000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	111,000,000	(363,218,000)	2,466,204,000	2,102,986,000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	-	225,000,000	283,750,000	508,750,000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(50,000,000)	(230,473,000)	267,500,000	37,027,000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	(285,833,000)	917,370,000	631,537,000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	(186,360,000)	758,366,000	572,006,000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	74,900,000	(619,063,000)	873,500,000	254,437,000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	(179,937,000)	253,160,000	73,223,000
13	SATPOL PP	-	(174,414,000)	50,000,000	(124,414,000)
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	56,316,000	1,950,300,000	2,006,616,000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	(12,585,000)	-	(12,585,000)
17	SETDA	753,041,000	252,653,000	2,083,445,000	2,336,098,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	300,000,000	300,000,000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	20,300,000	20,000,000
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	-	252,653,000	228,000,000	480,653,000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	759,500,000	759,500,000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	(2,500,000)	-	341,595,000	341,595,000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	9,350,000	9,350,000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	150,000,000	150,000,000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	755,541,000	-	275,000,000	275,000,000
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-
18	SEKRETARIAT DPRD	-	81,813,000	(132,307,000)	(50,494,000)
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,264,220,972	(913,818,000)	327,500,000	(586,318,000)
a	(SKPD)	2,608,061,700	(1,713,132,000)	327,500,000	(1,385,632,000)
b	(PPKD)	(1,343,840,728)	799,314,000	-	799,314,000
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	(379,798,000)	148,529,000	(231,269,000)
21	BKD	-	(98,721,000)	908,735,100	810,014,100
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	-	(13,031,000)	62,030,000	48,999,000
23	KECAMATAN REMBANG	-	(325,703,000)	142,700,000	(183,003,000)
24	KECAMATAN KALIORI	-	(10,558,000)	90,150,000	79,592,000
25	KECAMATAN SULANG	-	(182,330,000)	86,259,596	(96,070,404)
26	KECAMATAN SUMBER	-	(50,573,000)	71,400,000	20,827,000
27	KECAMATAN BULU	-	110,938,000	114,300,000	225,238,000
28	KECAMATAN LASEM	-	(34,160,000)	79,500,000	45,340,000
29	KECAMATAN PANCUR	-	(53,606,000)	92,150,000	38,544,000
30	KECAMATAN SLUKE	-	(141,690,000)	55,200,000	(86,490,000)
31	KECAMATAN PAMOTAN	-	(57,988,000)	141,150,000	83,162,000
32	KECAMATAN GUNEM	-	(115,604,000)	63,800,000	(51,804,000)
33	KECAMATAN SALE	-	-	58,750,000	58,750,000
34	KECAMATAN KRAGAN	-	(14,524,000)	105,350,000	90,826,000
35	KECAMATAN SEDAN	-	(260,294,000)	83,550,000	(176,744,000)
36	KECAMATAN SARANG	-	(138,958,000)	92,650,000	(46,308,000)
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN	-	48,851,000	142,850,000	191,701,000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	-	(86,176,000)	33,413,000	(52,763,000)
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	-	(222,869,000)	2,284,435,000	2,061,566,000
40	DINAS ESDM	-	(124,836,000)	2,682,853,100	2,557,957,100
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	(267,645,000)	659,750,000	392,105,000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,001,635,000	(325,585,000)	425,000,000	99,415,000
	JUMLAH	9,914,128,972	5,463,417,989	53,097,337,196	58,560,753,185

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD R PERUBAHAN.

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		PERSETUJUAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	16	17	18	19=17+18
1	DINAS PENDIDIKAN		449,163,474,213	74,944,178,000	524,107,652,213
2	DINAS KESEHATAN	6,753,796,000	32,788,561,000	34,678,340,000	67,466,901,000
3	RSUD dr R. SC ETASNO	60,000,000,000	20,959,772,000	67,791,400,000	88,751,172,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	1,505,000,000	11,736,232,000	126,314,553,400	138,050,785,400
5	BAPPEDA		2,631,780,000	7,222,097,000	9,853,877,000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,411,000,000	4,423,733,000	10,345,500,000	14,769,233,000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP		1,989,393,000	2,210,433,000	4,199,826,000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	415,000,000	2,121,148,000	3,007,550,000	5,128,698,000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		7,411,293,000	6,193,523,000	13,604,816,000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		4,265,950,000	2,628,566,000	6,894,516,000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	2,392,803,200	7,504,394,000	5,542,889,000	13,047,283,000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1,264,607,000	2,247,270,000	3,511,877,000
13	SATPOL PP		2,741,737,000	1,315,537,600	4,057,274,600
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1,365,375,000	3,729,900,000	5,095,275,000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		6,899,372,000	-	6,899,372,000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		529,599,000	-	529,599,000
17	SETDA	2,437,449,000	11,060,512,000	20,603,684,000	31,664,196,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	21,000,000	-	5,070,400,000	5,070,400,000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)		-	450,300,000	450,000,000
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	90,000,000	11,060,512,000	3,472,600,000	14,533,112,000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)		-	4,666,625,000	4,666,625,000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	42,500,000	-	1,076,595,000	1,076,595,000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)		-	2,877,464,000	2,877,464,000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)		-	935,000,000	935,000,000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	2,283,949,000	-	1,475,000,000	1,475,000,000
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)		-	580,000,000	580,000,000
18	SEKRETARIAT DPRD		2,888,347,000	15,090,137,000	17,978,484,000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,034,171,085,996	96,005,042,000	15,128,046,000	111,133,088,000
a	(SKPD)	38,304,293,500	9,054,545,000	15,128,046,000	24,182,591,000
b	(PPKD)	995,866,792,496	86,950,497,000	-	86,950,497,000
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		2,720,381,000	2,364,469,000	5,084,850,000
21	BKD		2,814,723,000	3,603,509,000	6,418,232,000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU		1,037,360,000	781,130,000	1,838,490,000
23	KECAMATAN REMBANG		4,299,830,000	527,391,000	4,826,921,000
24	KECAMATAN KALIORI		1,613,275,000	469,584,000	2,082,859,000
25	KECAMATAN SULANG		1,593,936,000	325,759,596	1,919,755,596
26	KECAMATAN SUMBER		291,620,000	289,372,000	1,580,992,000
27	KECAMATAN BULU		1,380,972,000	381,272,000	1,762,244,000
28	KECAMATAN LASEM		1,799,308,000	344,948,000	2,144,346,000
29	KECAMATAN PANCUR		1,891,077,000	341,122,000	2,232,149,000
30	KECAMATAN SLUKE		1,160,294,000	269,172,000	1,429,466,000
31	KECAMATAN PAMOTAN		1,359,050,000	371,356,000	1,730,446,000
32	KECAMATAN GUNEM		1,304,290,000	288,234,000	1,596,524,000
33	KECAMATAN SALE		1,293,234,000	331,184,000	1,624,418,000
34	KECAMATAN KRAGAN		1,547,194,000	376,594,000	1,923,788,000
35	KECAMATAN SEDAN		1,134,579,000	427,408,000	1,561,987,000
36	KECAMATAN SARANG		1,470,768,000	354,394,000	1,835,162,000
37	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN		7,226,774,000	2,753,850,000	9,980,624,000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		1,533,813,000	1,663,993,000	3,197,806,000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	133,472,000	5,300,027,000	16,577,249,000	21,877,276,000
40	DINAS ESDM		2,075,481,000	11,566,965,100	13,642,446,100
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	996,000,000	2,218,258,000	3,303,283,000	5,521,541,000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11,783,735,000	3,567,077,000	19,222,522,500	22,789,609,500
	JUMLAH	1,122,999,341,196	719,407,742,213	465,938,115,196	1,185,345,857,409

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD R PERUBAHAN.

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		PENDAPATAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	20=16-4	21=17-5	22=18-6	23=21+22
1	DINAS PENDIDIKAN	-	12,046,440,989	4,624,349,000	16,670,789,989
2	DINAS KESEHATAN	759,332,000	(663,001,000)	4,369,985,000	3,706,984,000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	6,000,000,000	(221,608,000)	6,000,000,000	5,778,392,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	400,000,000	(527,939,000)	18,374,610,400	17,856,671,400
5	BAPPEDA	-	(75,636,000)	764,000,000	688,364,000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	111,000,000	(363,218,000)	1,766,204,000	1,402,986,000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	-	225,000,000	258,750,000	483,750,000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	(50,000,000)	(230,473,000)	287,500,000	57,027,000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	(285,833,000)	907,370,000	621,537,000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	(186,360,000)	717,866,000	531,506,000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	74,900,000	(619,063,000)	1,276,514,000	657,451,000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	(179,937,000)	253,160,000	73,223,000
13	SATPOL PP	-	(174,414,000)	50,000,000	(124,414,000)
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	56,316,000	1,950,300,000	2,006,616,000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	(12,585,000)	-	(12,585,000)
17	SETDA	753,041,000	252,653,000	2,318,445,000	2,571,098,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	300,000,000	300,000,000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	20,000,000	20,000,000
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	-	252,653,000	228,000,000	480,653,000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	934,500,000	934,500,000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	(2,500,000)	-	516,595,000	516,595,000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	(5,650,000)	(5,650,000)
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	50,000,000	50,000,000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	755,541,000	-	275,000,000	275,000,000
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-
18	SEKRETARIAT DPRD	-	81,813,000	(95,307,000)	(13,494,000)
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5,471,454,972	3,404,282,000	646,500,000	4,050,782,000
a	(SKPD)	6,815,295,700	(1,547,132,000)	646,500,000	(900,632,000)
b	(PPKD)	(1,343,840,728)	4,951,414,000	-	4,951,414,000
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	(379,798,000)	248,529,000	(131,269,000)
21	BKD	-	(98,721,000)	883,735,100	785,014,100
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	-	(13,031,000)	62,030,000	48,999,000
23	KECAMATAN REMBANG	-	(325,703,000)	154,700,000	(171,003,000)
24	KECAMATAN KALIORI	-	(10,558,000)	98,650,000	88,092,000
25	KECAMATAN SULANG	-	(182,330,000)	95,759,596	(86,570,404)
26	KECAMATAN SUMBER	-	(50,573,000)	78,900,000	28,327,000
27	KECAMATAN BULU	-	110,938,000	121,800,000	232,738,000
28	KECAMATAN LASEM	-	(34,160,000)	88,000,000	53,840,000
29	KECAMATAN PANCUR	-	(53,606,000)	102,650,000	49,044,000
30	KECAMATAN SLUKE	-	(141,690,000)	60,700,000	(80,990,000)
31	KECAMATAN PAMOTAN	-	(57,988,000)	150,650,000	92,662,000
32	KECAMATAN GUNEM	-	(115,604,000)	70,800,000	(44,804,000)
33	KECAMATAN SALE	-	-	64,250,000	64,250,000
34	KECAMATAN KRAGAN	-	(14,524,000)	113,850,000	99,326,000
35	KECAMATAN SEDAN	-	(260,294,000)	91,550,000	(168,744,000)
36	KECAMATAN SARANG	-	(138,958,000)	103,650,000	(35,308,000)
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	-	48,651,000	142,850,000	191,701,000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	-	(86,176,000)	5,133,000	(81,043,000)
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	-	(222,869,000)	2,446,935,000	2,224,066,000
40	DINAS ESDM	-	(124,896,000)	2,682,853,100	2,557,957,100
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OL/PI RAGA	-	(267,645,000)	588,250,000	320,605,000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,401,635,000	(325,585,000)	850,000,000	524,415,000
	JUMLAH	14,921,362,972	9,781,517,989	53,786,471,196	63,567,989,185

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD R PERUBAHAN.

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	2	24=16-8	25=17-9	26=18-10	27=25+26
1	DINAS PENDIDIKAN	-	-	(165,600,000)	(165,600,000)
2	DINAS KESEHATAN	-	-	(69,500,000)	(69,500,000)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	400,000,000	-	196,000,000	196,000,000
5	BAPPEDA	-	-	(192,000,000)	(192,000,000)
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	(700,000,000)	(700,000,000)
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	(25,000,000)	(25,000,000)
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	-	-	20,000,000	20,000,000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	(10,000,000)	(10,000,000)
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	(40,500,000)	(40,500,000)
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	-	-	403,014,000	403,014,000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	-
13	SATPOL PP	-	-	-	-
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
17	SETDA	-	-	235,000,000	235,000,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	-	-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	-	-	-	-
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	175,000,000	175,000,000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	175,000,000	175,000,000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	(15,000,000)	(15,000,000)
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	(100,000,000)	(100,000,000)
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	-	-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-
18	SEKRETARIAT DPRD	-	-	37,000,000	37,000,000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4,207,234,000	4,316,100,000	319,000,000	4,637,100,000
a	(SKPD)	4,207,234,000	166,000,000	319,000,000	485,000,000
b	(PPKD)	-	4,152,100,000	-	4,152,100,000
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	-	100,000,000	100,000,000
21	BKD	-	-	(25,000,000)	(25,000,000)
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	-	-	-	-
23	KECAMATAN REMBANG	-	-	12,000,000	12,000,000
24	KECAMATAN KALIORI	-	-	8,500,000	8,500,000
25	KECAMATAN SULANG	-	-	9,500,000	9,500,000
26	KECAMATAN SUMBER	-	-	7,500,000	7,500,000
27	KECAMATAN BULU	-	-	7,500,000	7,500,000
28	KECAMATAN LASEM	-	-	8,500,000	8,500,000
29	KECAMATAN PANCUR	-	-	10,500,000	10,500,000
30	KECAMATAN SLUKE	-	-	5,500,000	5,500,000
31	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	9,500,000	9,500,000
32	KECAMATAN GUNEM	-	-	7,000,000	7,000,000
33	KECAMATAN SALE	-	-	5,500,000	5,500,000
34	KECAMATAN KRAGAN	-	-	8,500,000	8,500,000
35	KECAMATAN SEDAN	-	-	8,000,000	8,000,000
36	KECAMATAN SARANG	-	-	11,000,000	11,000,000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	-	-	-	-
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	-	-	(28,280,000)	(28,280,000)
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	-	-	162,500,000	162,500,000
40	DINAS ESDM	-	-	-	-
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	(71,500,000)	(71,500,000)
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	400,000,000	-	425,000,000	425,000,000
	JUMLAH	5,007,234,000	4,318,100,000	689,134,000	5,007,234,000

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

1.1

NO	SKPD	SEBELUM PERUBAHAN				JUMLAH
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	DINAS KESEHATAN		5,994,464,000			5,994,464,000
2	RSU R. SOETRASNO				54,000,000,000	54,000,000,000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM		1,005,000,000		20,000,000	1,105,000,000
4	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		2,298,200,000		1,800,000	2,300,000,000
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		340,000,000		125,000,000	465,000,000
6	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM		2,312,260,000		5,643,200	2,317,903,200
7	SEKRETARIAT DAERAH		156,000,000	1,528,400,000		1,684,408,000
	Bag. Administrasi Keuangan		90,000,000			90,000,000
	Bag. Administrasi Perekonomian			1,528,400,000		1,528,408,000
	Bag. Kesejahteraan Rakyat	1	21,000,000			21,000,000
	Bag. Humas		45,000,000			45,000,000
8	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	24,002,000,000	305,300,000	3,971,697,800	3,210,000,000	31,488,997,800
	SKPD	24,002,000,000	305,300,000	3,971,697,800	3,210,000,000	31,488,997,800
	PPKD					
9	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN		133,472,000			133,472,000
10	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		996,000,000			996,000,000
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		10,257,100,000		125,000,000	10,382,100,000
	JUMLAH	24,002,000,000	23,877,796,000	5,500,105,800	57,487,443,200	110,867,345,000

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

NO	SKPD	JUMLAH				
		SETELAH PERUBAHAN				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	8	9	10	11	12=8+9+10+11
1	DINAS KESEHATAN		6,753,756,000			6,753,796,000
2	RSU R. SOETRASNO				60,000,000,000	60,000,000,000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM		1,085,000,000		20,000,000	1,105,000,000
4	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		2,408,432,000		2,568,000	2,411,000,000
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		340,000,000		75,000,000	415,000,000
6	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM		2,362,260,000		30,543,200	2,392,803,200
7	SEKRETARIAT DAERAH		150,500,000	2,283,949,000		2,437,449,000
	Bag. Administrasi Keuangan		90,000,000			90,000,000
	Bag. Administrasi Perekonomian			2,283,949,000		2,283,949,000
	Bag. Kesejahteraan Rakyat		21,000,000			21,000,000
	Bag. Humas		42,500,000			42,500,000
8	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	26,404,677,000	150,000,000	2,693,485,000	4,848,897,500	34,097,059,500
	SKPD	26,404,677,000	150,000,000	2,693,485,000	4,848,897,500	34,097,059,500
	PPKD					
9	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN		133,472,000			133,472,000
10	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		996,000,000			996,000,000
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		11,298,735,000		35,000,000	11,383,735,000
	JUMLAH	26,404,677,000	25,681,195,000	4,977,434,000	65,062,008,700	122,125,314,700

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

NO	SKPD	PROYEKSI PENDAP				
		BERTAMBAH(BERKURANG)				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	13=8-3	14=9-4	15=10-5	16=11-6	17=13+14+15+16
1	DINAS KESEHATAN	-	759,332,000	-	-	759,332,000
2	RSU R. SOETRASNO	-	-	-	6,000,000,000	6,000,000,000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	-	-	-	-
4	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	110,232,000	-	768,000	111,000,000
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	(50,000,000)	(50,000,000)
6	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	-	50,000,000	-	24,900,000	74,900,000
7	SEKRETARIAT DAERAH	-	(2,500,000)	755,541,000	-	753,041,000
	Bag. Administrasi Keuangan	-	-	-	-	-
	Bag. Administrasi Perekonomian	-	-	755,541,000	-	755,541,000
	Bag. Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-
	Bag. Humas	-	(2,500,000)	-	-	(2,500,000)
8	DINAS PENDAPATAN, PENGELC LAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2,402,677,000	(155,300,000)	(1,278,212,800)	1,638,897,500	2,608,061,700
	SKPD	2,402,677,000	(155,300,000)	(1,278,212,800)	1,638,897,500	2,608,061,700
	PPKD	-	-	-	-	-
9	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	-	-	-	-	-
10	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	1,041,635,000	-	(40,000,000)	1,001,635,000
		-	-	-	-	-
	JUMLAH	2,402,677,000	1,803,399,000	(521,671,800)	7,574,565,500	11,257,969,700

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

NO	SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		PERSETUJUAN				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	18	19	20	21	22=18+19+20+21
1	DINAS KESEHATAN		6,753,796,000			6,753,796,000
2	RSU R. SOETRASNO				60,000,000,000	60,000,000,000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM		1,485,000,000		20,000,000	1,505,000,000
4	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		2,408,432,000		2,568,000	2,411,000,000
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		340,000,000		75,000,000	415,000,000
6	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM		2,362,260,000		30,143,200	2,392,803,200
7	SEKRETARIAT DAERAH		153,500,000	2,283,949,000		2,437,449,000
	Bag. Administrasi Keuangan		90,000,000			90,000,000
	Bag. Administrasi Perekonomian			2,283,949,000		2,283,949,000
	Bag. Kesejahteraan Rakyat		21,000,000			21,000,000
	Bag. Humas		42,500,000			42,500,000
8	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	29,742,877,000	150,000,000	2,693,485,000	5,717,931,500	38,304,293,500
	SKPD	29,742,877,000	150,000,000	2,693,485,000	5,717,931,500	38,304,293,500
	PPKD					
9	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN		133,472,000			133,472,000
10	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		996,000,000			996,000,000
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		11,698,735,000		85,000,000	11,783,735,000
	JUMLAH	29,742,877,000	26,481,195,000	4,977,434,000	65,931,042,700	127,132,548,700

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

NO	SKPD	PEMBAHASAN				
		BERTAMBAH(BERKURANG)				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	23=18-3	24=19-4	25=20-5	26=21-6	27=23+24+25+26
1	DINAS KESEHATAN	-	759,332,000	-	-	759,332,000
2	RSU R. SOETRASNO	-	-	-	6,000,000,000	6,000,000,000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	400,000,000	-	-	400,000,000
4	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	110,232,000	-	768,000	111,000,000
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	(50,000,000)	(50,000,000)
6	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	-	50,000,000	-	24,900,000	74,900,000
7	SEKRETARIAT DAERAH	-	(2,500,000)	755,541,000	-	753,041,000
	Bag. Administrasi Keuangan	-	-	-	-	-
	Bag. Administrasi Perekonomian	-	-	755,541,000	-	755,541,000
	Bag. Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-
	Bag. Humas	-	(2,500,000)	-	-	(2,500,000)
8	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5,740,877,000	(155,300,000)	(1,278,212,800)	2,507,931,500	6,815,295,700
	SKPD	5,740,877,000	(155,300,000)	(1,278,212,800)	2,507,931,500	6,815,295,700
	PPKD	-	-	-	-	-
9	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	-	-	-	-	-
10	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	1,441,635,000	-	(40,000,000)	1,401,635,000
	JUMLAH	5,740,877,000	2,503,399,000	(522,671,800)	8,443,599,500	16,285,203,700

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

NO	SKPD	BERTAMPAH(BERKURANG)				JUMLAH
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1	2	28=18-8	29=19-5	30=20-10	31=21-11	32
1	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-
2	RSU R. SOETRASNO	-	-	-	-	-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	400,000,000	-	-	400,000,000
4	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-
6	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	-	-	-	-	-
7	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-
	Bag. Administrasi Keuangan	-	-	-	-	-
	Bag. Administrasi Perekonomian	-	-	-	-	-
	Bag. Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-
	Bag. Humas	-	-	-	-	-
8	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3,338,200,000	-	-	869,034,000	4,207,234,000
	SKPD	3,338,200,000	-	-	869,034,000	4,207,234,000
	PPKD	-	-	-	-	-
9	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	-	-	-	-	-
10	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	400,000,000	-	-	400,000,000
	JUMLAH	3,338,200,000	800,000,000	-	869,034,000	5,007,234,000

5,007,234,000

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	JUMLAH			
		SEBELUM PERUBAHAN			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
1	DINAS PENDIDIKAN	7,708,156,000	11,192,596,000	51,419,077,000	70,319,829,000
2	DINAS KESEHATAN	4,723,133,000	16,843,253,000	8,741,969,000	30,308,355,000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	19,455,959,000	26,805,685,000	15,529,753,000	61,791,400,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	2,335,414,000	36,130,729,100	69,463,799,900	107,929,943,000
5	BAPPEDA	1,831,893,000	4,490,994,000	135,210,000	6,458,097,000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1,072,232,000	2,786,004,000	4,721,060,000	8,579,296,000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	243,037,800	1,159,217,700	549,427,500	1,951,683,000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	814,813,000	1,476,703,300	428,534,000	2,720,050,000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	1,100,403,000	3,780,350,000	408,400,000	5,286,153,000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	491,205,000	1,215,253,000	204,242,000	1,910,700,000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	648,050,000	1,826,364,000	1,791,961,000	4,266,375,000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,294,524,000	689,586,000	10,000,000	1,994,110,000
13	SATPOL PP	683,116,600	536,471,000	45,950,000	1,265,537,600
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	268,775,000	934,559,000	578,266,000	1,779,600,000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUFATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
17	SETDA	5,938,748,000	11,140,096,000	1,206,395,000	18,285,239,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	3,197,675,000	1,536,175,000	36,550,000	4,770,400,000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	212,050,000	217,950,000	-	430,000,000
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	712,200,000	2,512,950,000	19,450,000	3,244,600,000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	180,475,000	2,770,650,000	781,000,000	3,732,125,000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	171,310,000	362,690,000	26,000,000	560,000,000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	608,288,000	2,040,551,000	234,275,000	2,883,114,000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	335,145,000	510,355,000	39,500,000	885,000,000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	319,780,000	842,600,000	37,620,000	1,200,000,000
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	201,825,000	346,175,000	32,000,000	580,000,000
18	SEKRETARIAT DPRD	1,696,660,000	10,758,672,000	2,730,112,000	15,185,444,000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2,367,828,000	4,216,363,200	7,897,354,800	14,481,546,000
a	(SKPD)	2,367,828,000	4,216,363,200	7,897,354,800	14,481,546,000
b	(PPKD)	-	-	-	-
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	437,800,000	1,620,840,000	57,300,000	2,115,940,000
21	BKD	577,580,000	1,981,690,900	180,503,000	2,719,773,900
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	264,320,000	430,495,870	24,284,130	719,100,000
23	KECAMATAN REMBANG	66,813,000	195,078,000	110,500,000	372,391,000
24	KECAMATAN KALIORI	80,493,000	290,441,000	-	370,934,000
25	KECAMATAN SULANG	54,075,000	147,925,000	28,000,000	230,000,000
26	KECAMATAN SUMBER	45,940,000	144,792,000	19,740,000	210,472,000
27	KECAMATAN BULU	69,555,000	180,940,000	8,977,000	259,472,000
28	KECAMATAN LASEM	47,570,000	201,478,000	7,900,000	256,948,000
29	KECAMATAN PANCUR	46,825,000	138,047,000	53,600,000	238,472,000
30	KECAMATAN SLUKE	51,810,000	108,481,000	48,181,000	208,472,000
31	KECAMATAN PAMOTAN	38,320,000	158,926,000	23,500,000	220,746,000
32	KECAMATAN GUNEM	31,410,000	139,740,000	46,284,000	217,434,000
33	KECAMATAN SALE	66,833,000	175,801,000	24,300,000	266,934,000
34	KECAMATAN KRAGAN	57,765,000	177,379,000	27,600,000	262,744,000
35	KECAMATAN SEDAN	58,210,000	162,698,000	114,950,000	335,858,000
36	KECAMATAN SARANG	43,100,000	197,644,000	20,000,000	260,744,000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	334,943,800	898,296,200	1,377,760,000	2,611,000,000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	170,115,000	431,245,000	1,057,500,000	1,658,860,000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	1,022,609,000	12,716,206,000	391,499,000	14,130,314,000
40	DINAS ESDM	331,041,000	6,577,361,000	1,875,710,000	8,884,112,000
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	872,530,000	1,556,682,000	285,821,000	2,715,033,000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,836,035,000	3,759,262,500	12,777,235,000	18,372,532,500
	JUMLAH	59,279,640,200	168,454,345,470	184,417,658,330	412,151,644,000

KAPITULASI BELANJA LANGSUNG

SKPD	JUMLAH			
	SEBELAH PERUBAHAN			
	Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
2	7	8	9	10 = 7+8+9
DINAS PENDIDIKAN	7,098,333,000	12,400,885,000	55,550,560,000	75,109,778,000
DINAS KESEHATAN	5,938,545,700	19,291,822,300	9,517,472,000	34,747,840,000
RSUD dr R. SOETRASNO	20,906,628,000	31,377,871,000	15,508,901,000	67,791,400,000
DINAS PEKERJAAN UMUM	2,847,464,000	51,729,780,100	71,541,309,300	126,118,553,400
BAPPEDA	2,050,860,000	4,778,178,000	585,059,000	7,414,097,000
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	795,248,000	5,004,722,000	5,245,530,000	11,045,500,000
BADAN LINGKUNGAN HIDUP	312,057,800	1,345,297,700	578,077,500	2,235,433,000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	764,473,000	1,688,588,000	534,489,000	2,987,550,000
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	1,743,808,000	4,051,615,000	408,100,000	6,203,523,000
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	656,340,000	1,422,608,000	590,118,000	2,669,066,000
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	699,380,000	2,124,345,000	2,316,150,000	5,139,875,000
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,365,599,000	872,121,000	9,550,000	2,247,270,000
SATPOL PP	715,966,600	553,621,000	45,950,000	1,315,537,600
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	448,450,000	2,098,294,000	1,183,156,000	3,729,900,000
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
SETDA	6,346,415,000	12,138,322,000	1,883,947,000	20,368,684,000
a SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	3,314,595,000	1,621,855,000	133,950,000	5,070,400,000
b SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	212,050,000	237,950,000	-	450,000,000
c SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	698,400,000	2,746,575,000	27,625,000	3,472,600,000
d SETDA (BAGIAN UMUM)	187,275,000	2,998,350,000	1,306,000,000	4,491,625,000
e SETDA (BAGIAN HUMAS)	196,310,000	544,315,000	160,570,000	901,595,000
f SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	616,880,000	2,191,309,000	84,275,000	2,892,464,000
g SETDA (BAGIAN HUKUM)	446,315,000	529,035,000	59,650,000	1,035,000,000
h SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	486,565,000	929,448,000	58,987,000	1,475,000,000
i SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	188,025,000	339,485,000	52,490,000	580,000,000
18 SEKRETARIAT DPRD	1,685,992,000	10,236,195,000	3,130,950,000	15,053,137,000
19 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2,360,813,000	4,595,519,200	7,852,713,800	14,809,046,000
a (SKPD)	2,360,813,000	4,595,519,200	7,852,713,800	14,809,046,000
b (PPKD)	-	-	-	-
20 INSPEKTORAT KABUPATEN	607,800,000	1,584,369,000	72,300,000	2,264,469,000
21 BKD	844,924,000	2,355,010,000	428,575,000	3,628,509,000
22 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	256,270,000	456,775,870	68,084,130	781,130,000
23 KECAMATAN REMBANG	74,013,000	320,578,000	120,500,000	515,091,000
24 KECAMATAN KALIORI	82,563,000	378,521,000	-	461,084,000
25 KECAMATAN SULANG	61,984,596	226,275,000	28,000,000	316,259,596
26 KECAMATAN SUMBER	51,640,000	210,492,000	19,740,000	281,872,000
27 KECAMATAN BULU	94,105,000	270,690,000	8,977,000	373,772,000
28 KECAMATAN LASEM	52,925,000	275,623,000	7,900,000	336,448,000
29 KECAMATAN PANCUR	53,515,000	223,507,000	53,600,000	330,622,000
30 KECAMATAN SLUKE	54,670,000	160,821,000	48,181,000	263,672,000
31 KECAMATAN PAMOTAN	53,540,000	284,856,000	23,500,000	361,896,000
32 KECAMATAN GUNEM	45,410,000	193,540,000	37,284,000	281,234,000
33 KECAMATAN SALE	71,508,000	229,876,000	24,300,000	325,684,000
34 KECAMATAN KRAGAN	60,900,000	279,594,000	27,600,000	368,094,000
35 KECAMATAN SEDAN	63,610,000	240,843,000	114,950,000	419,408,000
36 KECAMATAN SARANG	52,800,000	280,594,000	20,000,000	353,394,000
37 BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	412,298,800	963,791,200	1,377,760,000	2,753,850,000
38 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	170,115,000	427,378,000	1,094,780,000	1,692,273,000
39 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	1,270,294,800	14,460,880,200	683,574,000	16,414,749,000
40 DINAS ESDM	355,916,000	9,639,866,500	1,571,182,600	11,566,965,100
41 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1,065,410,000	1,955,502,000	353,871,000	3,374,783,000
42 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,395,560,000	4,090,337,500	12,811,635,000	18,797,532,500
JUMLAH	64,488,145,296	205,284,509,570	195,476,326,330	465,248,981,196

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	BERTAMBAH (BERKURANG)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	11 = 7-3	12 = 8-4	13 = 9-5	14 = 11+12+13
1	DINAS PENDIDIKAN	(609,823,000)	1,268,289,000	4,131,483,000	4,789,949,000
2	DINAS KESEHATAN	1,215,412,700	2,448,569,300	775,503,000	4,439,485,000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	1,450,669,000	4,572,186,000	(22,855,000)	6,000,000,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	512,050,000	15,599,051,000	2,077,509,400	18,188,610,400
5	BAPPEDA	218,967,000	287,184,000	449,849,000	956,000,000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(276,984,000)	2,218,718,000	524,470,000	2,466,204,000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	69,020,000	186,080,000	28,650,000	283,750,000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(50,340,000)	211,885,000	105,535,000	267,500,000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	643,405,000	271,265,000	2,700,000	917,370,000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	165,135,000	207,355,000	385,876,000	758,366,000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	51,330,000	297,981,000	524,189,000	873,500,000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	71,075,000	182,535,000	(450,000)	253,160,000
13	SATPOL PP	32,850,000	17,150,000	-	50,000,000
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	179,675,000	1,163,735,000	606,830,000	1,950,300,000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
17	SETDA	407,667,000	998,226,000	677,552,000	2,083,445,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	116,920,000	85,680,000	97,400,000	300,000,000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	20,000,000	-	20,000,000
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	(13,800,000)	233,625,000	8,175,000	228,000,000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	6,800,000	227,700,000	525,000,000	759,500,000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	25,000,000	181,625,000	134,970,000	341,595,000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	8,592,000	153,758,000	(150,000,000)	9,350,000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	111,170,000	18,680,000	20,150,000	150,000,000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	166,785,000	86,848,000	21,367,000	275,000,000
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	(13,800,000)	(6,632,000)	20,490,000	-
18	SEKRETARIAT DPRD	(10,668,000)	(522,477,000)	400,838,000	(132,307,000)
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(7,015,000)	379,156,000	(44,641,000)	327,500,000
a	(SKPD)	(7,015,000)	379,156,000	(44,641,000)	327,500,000
b	(PPKD)	-	-	-	-
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	170,000,000	(36,471,000)	15,000,000	148,529,000
21	BKD	267,344,000	393,319,100	248,072,000	908,735,100
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	(8,050,000)	26,280,000	43,800,000	62,030,000
23	KECAMATAN REMBANG	7,203,000	125,500,000	10,000,000	142,700,000
24	KECAMATAN KALIORI	2,070,000	88,080,000	-	90,150,000
25	KECAMATAN SULANG	7,909,596	78,350,000	-	86,259,596
26	KECAMATAN SUMBER	5,700,000	65,700,000	-	71,400,000
27	KECAMATAN BULU	24,550,000	89,750,000	-	114,300,000
28	KECAMATAN LASEM	5,355,000	74,145,000	-	79,500,000
29	KECAMATAN PANCUR	6,690,000	85,460,000	-	92,150,000
30	KECAMATAN SLUKE	2,860,000	52,340,000	-	55,200,000
31	KECAMATAN PAMOTAN	15,220,000	125,930,000	-	141,150,000
32	KECAMATAN GUNEM	14,000,000	58,800,000	(9,000,000)	63,800,000
33	KECAMATAN SALE	4,675,000	54,075,000	-	58,750,000
34	KECAMATAN KRAGAN	3,135,000	102,215,000	-	105,350,000
35	KECAMATAN SEDAN	5,400,000	78,150,000	-	83,550,000
36	KECAMATAN SARANG	9,700,000	82,950,000	-	92,650,000
37	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	77,355,000	65,495,000	-	142,850,000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	-	(3,867,000)	37,280,000	33,413,000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	247,685,800	1,744,674,200	292,075,000	2,284,435,000
40	DINAS ESDM	24,875,000	2,962,505,500	(304,527,400)	2,682,853,100
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	192,880,000	398,820,000	68,050,000	659,750,000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	59,525,000	331,075,000	34,400,000	425,000,000
	JUMLAH	5,208,505,096	36,830,164,100	11,058,668,000	53,097,337,196

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		PERSETUJUAN			JUMLAH
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	
1	2	15	16	17	18 = 15+16+17
1	DINAS PENDIDIKAN	7,066,128,000	11,966,165,000	55,911,885,000	74,944,178,000
2	DINAS KESEHATAN	5,969,483,000	19,191,385,000	9,517,472,000	34,673,340,000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	20,906,628,000	31,377,871,000	15,506,901,000	67,791,400,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	2,847,464,000	53,220,780,100	70,246,309,300	126,314,553,400
5	BAPPEDA	2,050,860,000	4,778,178,000	393,059,000	7,222,097,000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	798,998,000	4,931,672,000	4,614,830,000	10,345,500,000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	308,307,800	1,324,547,700	577,577,500	2,210,433,000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	852,574,000	1,650,306,000	504,670,000	3,007,550,000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	1,728,533,000	4,056,890,000	408,100,000	6,193,523,000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	641,140,000	1,409,042,000	578,384,000	2,628,566,000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	706,780,000	2,519,959,000	2,316,150,000	5,542,889,000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,365,599,000	872,121,000	9,550,000	2,247,270,000
13	SATPOL PP	715,966,600	553,621,000	45,950,000	1,315,537,600
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	449,950,000	2,096,734,000	1,183,156,000	3,729,900,000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
17	SETDA	6,250,183,000	12,269,554,000	2,083,947,000	20,603,684,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	3,314,595,000	1,621,855,000	133,950,000	5,070,400,000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	212,050,000	237,950,000	-	450,000,000
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	698,400,000	2,746,575,000	27,625,000	3,472,600,000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	187,275,000	2,973,350,000	1,506,000,000	4,666,625,000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	193,210,000	722,415,000	160,970,000	1,076,595,000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	612,023,000	2,181,166,000	84,275,000	2,877,464,000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	358,040,000	517,310,000	59,650,000	935,000,000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	486,565,000	929,448,000	58,937,000	1,475,000,000
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	188,025,000	339,485,000	52,490,000	580,000,000
18	SEKRETARIAT DPRD	1,686,892,000	10,014,886,000	3,388,359,000	15,090,137,000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2,654,813,000	4,595,519,200	7,877,713,300	15,128,046,000
a	(SKPD)	2,654,813,000	4,595,519,200	7,877,713,300	15,128,046,000
b	(PPKD)	-	-	-	-
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	657,800,000	1,546,869,000	159,800,000	2,364,469,000
21	BKD	844,924,000	2,330,010,000	428,575,000	3,603,509,000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	256,270,000	456,775,870	68,094,130	781,130,000
23	KECAMATAN REMBANG	78,813,000	327,778,000	120,500,000	527,091,000
24	KECAMATAN KALIORI	88,543,000	381,041,000	-	469,584,000
25	KECAMATAN SULANG	68,284,596	229,475,000	28,000,000	325,759,596
26	KECAMATAN SUMBER	57,340,000	212,292,000	19,740,000	289,372,000
27	KECAMATAN BULU	99,505,000	272,790,000	8,977,000	381,272,000
28	KECAMATAN LASEM	56,495,000	280,553,000	7,900,000	344,948,000
29	KECAMATAN PANCUR	60,175,000	227,347,000	53,600,000	341,122,000
30	KECAMATAN SLUKE	56,925,000	164,066,000	48,131,000	269,122,000
31	KECAMATAN PAMOTAN	58,385,000	289,511,000	23,500,000	371,396,000
32	KECAMATAN GUNEM	50,660,000	200,290,000	37,284,000	288,234,000
33	KECAMATAN SALE	77,208,000	229,676,000	24,300,000	331,184,000
34	KECAMATAN KRAGAN	74,505,000	274,489,000	27,600,000	376,594,000
35	KECAMATAN SEDAN	70,990,000	241,468,000	114,950,000	427,408,000
36	KECAMATAN SARANG	57,970,000	286,424,000	20,000,000	364,394,000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	412,298,800	963,791,200	1,377,760,000	2,753,850,000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	170,115,000	427,378,000	1,066,500,000	1,663,993,000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	1,276,819,800	14,596,555,200	703,874,000	16,577,249,000
40	DINAS ESDM	355,916,000	9,639,866,500	1,571,182,600	11,566,965,100
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1,012,860,000	1,950,702,000	339,721,000	3,303,283,000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,917,685,000	4,223,162,500	13,081,685,000	19,222,532,500
	JUMLAH	64,860,786,596	206,581,601,270	194,495,727,330	465,938,115,196

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	19 = 15-3	20 = 16-4	21 = 17-5	22 = 19+20+21
1	DINAS PENDIDIKAN	(642,028,000)	773,569,000	4,492,808,000	4,624,349,000
2	DINAS KESEHATAN	1,246,350,000	2,348,132,000	775,503,000	4,369,985,000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	1,450,669,000	4,572,186,000	(22,855,000)	6,000,000,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	512,050,000	17,090,051,000	782,509,400	18,384,610,400
5	BAPPEDA	218,967,000	287,184,000	257,849,000	764,000,000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(273,234,000)	2,145,668,000	(106,230,000)	1,766,204,000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	65,270,000	165,330,000	28,150,000	258,750,000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	37,761,000	173,603,000	76,136,000	287,500,000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	628,130,000	276,540,000	2,700,000	907,370,000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	149,935,000	193,789,000	374,142,000	717,866,000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	58,730,000	693,595,000	524,189,000	1,276,514,000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	71,075,000	182,535,000	(450,000)	253,160,000
13	SATPOL PP	32,850,000	17,150,000	-	50,000,000
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	181,175,000	1,162,235,000	606,890,000	1,950,300,000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
17	SETDA	311,435,000	1,129,458,000	877,552,000	2,318,445,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	116,920,000	85,680,000	97,400,000	300,000,000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	20,000,000	-	20,000,000
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	(13,800,000)	233,625,000	8,175,000	228,000,000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	6,800,000	202,700,000	725,000,000	934,500,000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	21,900,000	359,725,000	134,970,000	516,595,000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	3,735,000	140,615,000	(150,000,000)	(5,650,000)
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	22,895,000	6,955,000	20,150,000	50,000,000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	166,785,000	86,848,000	21,367,000	275,000,000
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	(13,800,000)	(6,690,000)	20,490,000	-
18	SEKRETARIAT DPRD	(9,768,000)	(743,786,000)	658,247,000	(95,307,000)
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	286,985,000	379,156,000	(19,641,000)	646,500,000
a	(SKPD)	286,985,000	379,156,000	(19,641,000)	646,500,000
b	(PPKD)	-	-	-	-
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	220,000,000	(73,971,000)	102,500,000	248,529,000
21	BKD	267,344,000	368,319,100	248,072,000	883,735,100
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	(8,050,000)	26,280,000	43,800,000	62,030,000
23	KECAMATAN REMBANG	12,000,000	132,700,000	10,000,000	154,700,000
24	KECAMATAN KALIORI	8,050,000	90,600,000	-	98,650,000
25	KECAMATAN SULANG	14,209,596	81,550,000	-	95,759,596
26	KECAMATAN SUMBER	11,400,000	67,500,000	-	78,900,000
27	KECAMATAN BULU	29,950,000	91,850,000	-	121,800,000
28	KECAMATAN LASEM	8,925,000	79,075,000	-	88,000,000
29	KECAMATAN PANCUR	13,350,000	89,300,000	-	102,650,000
30	KECAMATAN SLUKE	5,115,000	55,585,000	-	60,700,000
31	KECAMATAN PAMOTAN	20,065,000	130,585,000	-	150,650,000
32	KECAMATAN GUNEM	19,250,000	60,550,000	(9,000,000)	70,800,000
33	KECAMATAN SALE	10,375,000	53,875,000	-	64,250,000
34	KECAMATAN KRAGAN	16,740,000	97,110,000	-	113,850,000
35	KECAMATAN SEDAN	12,780,000	78,770,000	-	91,550,000
36	KECAMATAN SARANG	14,870,000	88,780,000	-	103,650,000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	77,355,000	65,495,000	-	142,850,000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	-	(3,867,000)	9,000,000	5,133,000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	254,210,800	1,880,349,200	312,375,000	2,446,935,000
40	DINAS ESDM	24,875,000	2,962,505,500	(304,527,400)	2,682,853,100
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	140,330,000	394,020,000	53,900,000	588,250,000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	81,650,000	463,900,000	304,450,000	850,000,000
	JUMLAH	5,581,146,396	38,127,255,800	10,078,069,000	53,786,471,196

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	23 = 15-7	24 = 16-8	25 = 17-9	26 = 23+24+25
1	DINAS PENDIDIKAN	(32,205,000)	(494,720,000)	361,325,000	(165,600,000)
2	DINAS KESEHATAN	30,937,300	(100,437,300)	-	(69,500,000)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	1,491,000,000	(1,295,000,000)	196,000,000
5	BAPPEDA	-	-	(192,000,000)	(192,000,000)
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3,750,000	(73,050,000)	(630,700,000)	(700,000,000)
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	(3,750,000)	(20,750,000)	(500,000)	(25,000,000)
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	88,101,000	(38,282,000)	(29,819,000)	20,000,000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(15,275,000)	5,275,000	-	(10,000,000)
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(15,200,000)	(13,566,000)	(11,734,000)	(40,500,000)
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	7,400,000	395,614,000	-	403,014,000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	-
13	SATPOL PP	-	-	-	-
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1,500,000	(1,500,000)	-	-
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
17	SETDA	(96,232,000)	131,232,000	200,000,000	235,000,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	-	-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	-	-	-	-
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	(25,000,000)	200,000,000	175,000,000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	(3,100,000)	178,100,000	-	175,000,000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	(4,857,000)	(10,143,000)	-	(15,000,000)
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	(88,275,000)	(11,725,000)	-	(100,000,000)
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	-	-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-
18	SEKRETARIAT DPRD	900,000	(221,309,000)	257,409,000	37,000,000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	294,000,000	-	25,000,000	319,000,000
a	(SKPD)	294,000,000	-	25,000,000	319,000,000
b	(PPKD)	-	-	-	-
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	50,000,000	(37,500,000)	87,500,000	100,000,000
21	BKD	-	(25,000,000)	-	(25,000,000)
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	-	-	-	-
23	KECAMATAN REMBANG	4,800,000	7,200,000	-	12,000,000
24	KECAMATAN KALIORI	5,980,000	2,520,000	-	8,500,000
25	KECAMATAN SULANG	6,300,000	3,200,000	-	9,500,000
26	KECAMATAN SUMBER	5,700,000	1,800,000	-	7,500,000
27	KECAMATAN BULU	5,400,000	2,100,000	-	7,500,000
28	KECAMATAN LASEM	3,570,000	4,930,000	-	8,500,000
29	KECAMATAN PANCUR	6,660,000	3,840,000	-	10,500,000
30	KECAMATAN SLUKE	2,255,000	3,245,000	-	5,500,000
31	KECAMATAN PAMOTAN	4,845,000	4,655,000	-	9,500,000
32	KECAMATAN GUNEM	5,250,000	1,750,000	-	7,000,000
33	KECAMATAN SALE	5,700,000	(200,000)	-	5,500,000
34	KECAMATAN KRAGAN	13,605,000	(5,105,000)	-	8,500,000
35	KECAMATAN SEIDAN	7,380,000	620,000	-	8,000,000
36	KECAMATAN SARANG	5,170,000	5,830,000	-	11,000,000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	-	-	-	-
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	-	-	(28,280,000)	(28,280,000)
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	6,525,000	135,675,000	20,300,000	162,500,000
40	DINAS ESDM	-	-	-	-
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	(52,550,000)	(4,800,000)	(14,150,000)	(71,500,000)
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	22,125,000	132,825,000	270,050,000	425,000,000
	JUMLAH	372,641,300	1,297,091,700	(980,599,000)	689,134,000

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	JUMLAH (Rp)							
		SEBELUM PERUBAHAN							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3+4+5+6+7+8+9
1	DINAS PENDIDIKAN	437,117,033,224							437,117,033,224
2	DINAS KESEHATAN	33,451,562,000							33,451,562,000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	21,181,380,000							21,181,380,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	12,264,171,000							12,264,171,000
5	BAPPEDA	2,707,416,000							2,707,416,000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4,786,951,000							4,786,951,000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	1,764,393,000							1,764,393,000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2,351,621,000							2,351,621,000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	7,697,126,000							7,697,126,000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4,452,310,000							4,452,310,000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	8,123,457,000							8,123,457,000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,444,544,000							1,444,544,000
13	SATPOL PP	2,916,151,000							2,916,151,000
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1,309,059,000							1,309,059,000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	6,899,372,000							6,899,372,000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	542,184,000							542,184,000
17	SETDA	10,807,859,000							10,807,859,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)								-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)								-
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	10,807,859,000							10,807,859,000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)								-
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)								-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)								-
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)								-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)								-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)								-
18	SEKRETARIAT DPRD	2,806,534,000							2,806,534,000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10,601,677,000	37,000,000	723,000,000	40,055,995,000	6,342,338,000	33,840,750,000	1,000,000,000	92,600,760,000
a	(SKPD)	10,601,677,000							10,601,677,000
b	(PPKD)		37,000,000	723,000,000	40,055,995,000	6,342,338,000	33,840,750,000	1,000,000,000	81,999,083,000
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	3,100,179,000							3,100,179,000
21	BKD	2,913,444,000							2,913,444,000
22	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	1,070,391,000							1,070,391,000
23	KECAMATAN REMBANG	4,625,533,000							4,625,533,000
24	KECAMATAN KALIORI	1,623,833,000							1,623,833,000
25	KECAMATAN SULANG	1,776,326,000							1,776,326,000
26	KECAMATAN SUMBER	1,342,193,000							1,342,193,000
27	KECAMATAN BULU	1,270,034,000							1,270,034,000
28	KECAMATAN LASEM	1,833,558,000							1,833,558,000
29	KECAMATAN PANCUR	1,944,633,000							1,944,633,000
30	KECAMATAN SLUKE	1,301,984,000							1,301,984,000
31	KECAMATAN PAMOTAN	1,417,038,000							1,417,038,000
32	KECAMATAN GUNEM	1,423,894,000							1,423,894,000
33	KECAMATAN SALE	1,293,234,000							1,293,234,000
34	KECAMATAN KRAGAN	1,561,718,000							1,561,718,000
35	KECAMATAN SEDAN	1,394,873,000							1,394,873,000
36	KECAMATAN SARANG	1,609,726,000							1,609,726,000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN	7,177,923,000							7,177,923,000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	1,619,989,000							1,619,989,000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	5,522,896,000							5,522,896,000
40	DINAS ESDM	2,200,377,000							2,200,377,000
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2,485,903,000							2,485,903,000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,892,662,000							3,892,662,000
	JUMLAH	627,627,141,224	37,000,000	723,000,000	40,055,995,000	6,342,338,000	33,840,750,000	1,000,000,000	709,626,224,224

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	JUMLAH (Rp)							
		SETELAH PERUBAHAN							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18 = 11+12+13+14+15+16+17
1	DINAS PENDIDIKAN	449.163.474.213							449.163.474.213
2	DINAS KESEHATAN	32.788.561.000							32.788.561.000
3	RSUD dr. R. SOETRASNO	20.959.772.000							20.959.772.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	11.736.232.000							11.736.232.000
5	BAPPEDA	2.631.780.000							2.631.780.000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.423.733.000							4.423.733.000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	1.989.393.000							1.989.393.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.121.148.000							2.121.148.000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	7.411.293.000							7.411.293.000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.265.950.000							4.265.950.000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	7.504.394.000							7.504.394.000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.264.607.000							1.264.607.000
13	SATPOL PP	2.741.737.000							2.741.737.000
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.365.375.000							1.365.375.000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	6.899.372.000							6.899.372.000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	529.599.000							529.599.000
17	SETDA	11.060.512.000							11.060.512.000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)								-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)								-
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	11.060.512.000							11.060.512.000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)								-
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)								-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)								-
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)								-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)								-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)								-
18	SEKRETARIAT DPRD	2.888.347.000							2.888.347.000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	8.888.545.000	37.000.000		43.357.137.000	4.455.885.000	34.448.375.000	500.000.000	91.686.942.000
a	(SKPD)	8.888.545.000							8.888.545.000
b	(PPKD)		37.000.000		43.357.137.000	4.455.885.000	34.448.375.000	500.000.000	82.798.397.000
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	2.720.381.000							2.720.381.000
21	BKD	2.814.723.000							2.814.723.000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	1.057.360.000							1.057.360.000
23	KECAMATAN REMBANG	4.299.830.000							4.299.830.000
24	KECAMATAN KALIORI	1.613.275.000							1.613.275.000
25	KECAMATAN SULANG	1.593.996.000							1.593.996.000
26	KECAMATAN SUMBER	1.291.620.000							1.291.620.000
27	KECAMATAN BULU	1.380.972.000							1.380.972.000
28	KECAMATAN LASEM	1.799.398.000							1.799.398.000
29	KECAMATAN PANCUR	1.891.027.000							1.891.027.000
30	KECAMATAN SLUKE	1.160.294.000							1.160.294.000
31	KECAMATAN PAMOTAN	1.359.050.000							1.359.050.000
32	KECAMATAN GUNEM	1.308.290.000							1.308.290.000
33	KECAMATAN SALE	1.293.234.000							1.293.234.000
34	KECAMATAN KRAGAN	1.547.194.000							1.547.194.000
35	KECAMATAN SEDAN	1.134.579.000							1.134.579.000
36	KECAMATAN SARANG	1.470.768.000							1.470.768.000
37	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	7.226.774.000							7.226.774.000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	1.533.813.000							1.533.813.000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	5.300.027.000							5.300.027.000
40	DINAS ESOM	2.075.481.000							2.075.481.000
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.218.258.000							2.218.258.000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.567.077.000							3.567.077.000
	JUMLAH	632.291.245.213	37.000.000		43.357.137.000	4.455.885.000	34.448.375.000	500.000.000	715.089.642.213

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	BERTAMBAH (BERKURANG)							JUMLAH
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	
1	2	19 = 11-3	20 = 12-4	21 = 13-5	22 = 14-6	23 = 15-7	24 = 16-8	25 = 17-9	26 = 19+20+21+22+23+24+25
1	DINAS PENDIDIKAN	12.046.440,989	-	-	-	-	-	-	12.046.440,989
2	DINAS KESEHATAN	(663.001,000)	-	-	-	-	-	-	(663.001,000)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	(221.608,000)	-	-	-	-	-	-	(221.608,000)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	(527.939,000)	-	-	-	-	-	-	(527.939,000)
5	BAPPEDA	(75.636,000)	-	-	-	-	-	-	(75.636,000)
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(363.218,000)	-	-	-	-	-	-	(363.218,000)
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	225.000,000	-	-	-	-	-	-	225.000,000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	(230.473,000)	-	-	-	-	-	-	(230.473,000)
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(285.833,000)	-	-	-	-	-	-	(285.833,000)
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(186.360,000)	-	-	-	-	-	-	(186.360,000)
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	(619.063,000)	-	-	-	-	-	-	(619.063,000)
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(179.937,000)	-	-	-	-	-	-	(179.937,000)
13	SATPOL PP	(174.414,000)	-	-	-	-	-	-	(174.414,000)
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	56.316,000	-	-	-	-	-	-	56.316,000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	(12.585,000)	-	-	-	-	-	-	(12.585,000)
17	SETDA	252.653,000	-	-	-	-	-	-	252.653,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	-	-	-	-	-	-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	252.653,000	-	-	-	-	-	-	252.653,000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SEKRETARIAT DPRD	81.813,000	-	-	-	-	-	-	81.813,000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(1.713.132,000)	-	(723.000,000)	3.301.142,000	(1.886.453,000)	607.625,000	(500.000,000)	(913.818,000)
a	(SKPD)	(1.713.132,000)	-	-	-	-	-	-	(1.713.132,000)
b	(PPKD)	-	-	(723.000,000)	3.301.142,000	(1.886.453,000)	607.625,000	(500.000,000)	799.314,000
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	(379.798,000)	-	-	-	-	-	-	(379.798,000)
21	BKD	(98.721,000)	-	-	-	-	-	-	(98.721,000)
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	(13.031,000)	-	-	-	-	-	-	(13.031,000)
23	KECAMATAN REMBANG	(325.703,000)	-	-	-	-	-	-	(325.703,000)
24	KECAMATAN KALIORI	(10.558,000)	-	-	-	-	-	-	(10.558,000)
25	KECAMATAN SULANG	(182.330,000)	-	-	-	-	-	-	(182.330,000)
26	KECAMATAN SUMBER	(50.573,000)	-	-	-	-	-	-	(50.573,000)
27	KECAMATAN BULU	110.938,000	-	-	-	-	-	-	110.938,000
28	KECAMATAN LASEM	(34.180,000)	-	-	-	-	-	-	(34.180,000)
29	KECAMATAN PANCUR	(53.606,000)	-	-	-	-	-	-	(53.606,000)
30	KECAMATAN SLUKE	(141.690,000)	-	-	-	-	-	-	(141.690,000)
31	KECAMATAN PAMOTAN	(57.988,000)	-	-	-	-	-	-	(57.988,000)
32	KECAMATAN GUNEM	(115.604,000)	-	-	-	-	-	-	(115.604,000)
33	KECAMATAN SALE	-	-	-	-	-	-	-	-
34	KECAMATAN KRAGAN	(14.524,000)	-	-	-	-	-	-	(14.524,000)
35	KECAMATAN SEDAN	(260.294,000)	-	-	-	-	-	-	(260.294,000)
36	KECAMATAN SARANG	(138.958,000)	-	-	-	-	-	-	(138.958,000)
37	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	48.851,000	-	-	-	-	-	-	48.851,000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	(88.176,000)	-	-	-	-	-	-	(88.176,000)
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	(222.869,000)	-	-	-	-	-	-	(222.869,000)
40	DINAS ESDM	(124.896,000)	-	-	-	-	-	-	(124.896,000)
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	(267.645,000)	-	-	-	-	-	-	(267.645,000)
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(325.585,000)	-	-	-	-	-	-	(325.585,000)
	JUMLAH	4.664.103,989	-	(723.000,000)	3.301.142,000	(1.886.453,000)	607.625,000	(500.000,000)	5.463.417,989

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGE

NO.	ORGANISASI	PEMBAHASAN PERSETUJUAN							Jumlah
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34 = 27+28+29+30+31+32+33
1	DINAS PENDIDIKAN	440.163.474,213							440.163.474,213
2	DINAS KESEHATAN	32.788.561,000							32.788.561,000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	20.959.772,000							20.959.772,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	11.736.232,000							11.736.232,000
5	BAPPEDA	2.631.780,000							2.631.780,000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.423.733,000							4.423.733,000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	1.989.393,000							1.989.393,000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.121.148,000							2.121.148,000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	7.411.293,000							7.411.293,000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.265.950,000							4.265.950,000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI (DAN) UMKM	7.504.394,000							7.504.394,000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.264.607,000							1.264.607,000
13	SATPOL PP	2.741.737,000							2.741.737,000
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.365.375,000							1.365.375,000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	6.899.372,000							6.899.372,000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	529.599,000							529.599,000
17	SETDA	11.060.512,000							11.060.512,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)								-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)								-
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	11.060.512,000							11.060.512,000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)								-
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)								-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)								-
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)								-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)								-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)								-
18	SEKRETARIAT DPRD	2.888.347,000							2.888.347,000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	9.054.545,000	37.000,000		47.026.071,000	5.014.051,000	34.373.375,000	500.000,000	96.005.042,000
a	(BKPD)	9.054.545,000							9.054.545,000
b	(PPKD)		37.000,000		47.026.071,000	5.014.051,000	34.373.375,000	500.000,000	86.950.497,000
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	2.720.381,000							2.720.381,000
21	BKD	2.814.723,000							2.814.723,000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	1.057.360,000							1.057.360,000
23	KECAMATAN REMBANG	4.299.830,000							4.299.830,000
24	KECAMATAN KALIORI	1.613.275,000							1.613.275,000
25	KECAMATAN SULANG	1.593.996,000							1.593.996,000
26	KECAMATAN SUMBER	1.291.620,000							1.291.620,000
27	KECAMATAN BULU	1.380.972,000							1.380.972,000
28	KECAMATAN LASEM	1.799.398,000							1.799.398,000
29	KECAMATAN PANCUR	1.891.027,000							1.891.027,000
30	KECAMATAN SLUKE	1.160.294,000							1.160.294,000
31	KECAMATAN PAMOTAN	1.359.050,000							1.359.050,000
32	KECAMATAN GUNEM	1.308.290,000							1.308.290,000
33	KECAMATAN SALE	1.293.234,000							1.293.234,000
34	KECAMATAN KRAGAN	1.547.194,000							1.547.194,000
35	KECAMATAN SEDAN	1.134.579,000							1.134.579,000
36	KECAMATAN SARANG	1.470.768,000							1.470.768,000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	7.226.774,000							7.226.774,000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	1.533.813,000							1.533.813,000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	5.300.027,000							5.300.027,000
40	DINAS ESDM	2.075.481,000							2.075.481,000
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.218.258,000							2.218.258,000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.567.077,000							3.567.077,000
	JUMLAH	632.457.245,213	37.000,000		47.026.071,000	5.014.051,000	34.373.375,000	500.000,000	719.407.742,213

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	PEMBAHASAN							
		-BERTAMBAH (BERKURANG)							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	35 = 27-3	36 = 28-4	37 = 29-5	38 = 30-6	39 = 31-7	40 = 32-8	41 = 33-9	42 = 35+36+37+38+39+40+41
1	DINAS PENDIDIKAN	12,046,440,989	-	-	-	-	-	-	12,046,440,989
2	DINAS KESEHATAN	(663,001,000)	-	-	-	-	-	-	(663,001,000)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	(221,608,000)	-	-	-	-	-	-	(221,608,000)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	(527,939,000)	-	-	-	-	-	-	(527,939,000)
5	BAPPEDA	(75,636,000)	-	-	-	-	-	-	(75,636,000)
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(363,218,000)	-	-	-	-	-	-	(363,218,000)
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	225,000,000	-	-	-	-	-	-	225,000,000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(230,473,000)	-	-	-	-	-	-	(230,473,000)
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(285,833,000)	-	-	-	-	-	-	(285,833,000)
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(186,360,000)	-	-	-	-	-	-	(186,360,000)
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	(619,063,000)	-	-	-	-	-	-	(619,063,000)
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(179,937,000)	-	-	-	-	-	-	(179,937,000)
13	SATPOL PP	(174,414,000)	-	-	-	-	-	-	(174,414,000)
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	56,316,000	-	-	-	-	-	-	56,316,000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	(12,585,000)	-	-	-	-	-	-	(12,585,000)
17	SETDA	252,653,000	-	-	-	-	-	-	252,653,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	-	-	-	-	-	-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	252,653,000	-	-	-	-	-	-	252,653,000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SEKRETARIAT DPRD	81,813,000	-	-	-	-	-	-	81,813,000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(1,547,132,000)	-	(723,000,000)	6,970,076,000	(1,328,287,000)	532,625,000	(500,000,000)	3,404,282,000
a	(SKPD)	(1,547,132,000)	-	-	-	-	-	-	(1,547,132,000)
b	(PPKD)	-	-	(723,000,000)	6,970,076,000	(1,328,287,000)	532,625,000	(500,000,000)	4,951,414,000
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	(379,798,000)	-	-	-	-	-	-	(379,798,000)
21	BKD	(98,721,000)	-	-	-	-	-	-	(98,721,000)
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	(13,031,000)	-	-	-	-	-	-	(13,031,000)
23	KECAMATAN REMBANG	(325,703,000)	-	-	-	-	-	-	(325,703,000)
24	KECAMATAN KALIORI	(10,558,000)	-	-	-	-	-	-	(10,558,000)
25	KECAMATAN SULANG	(182,330,000)	-	-	-	-	-	-	(182,330,000)
26	KECAMATAN SUMBER	(50,573,000)	-	-	-	-	-	-	(50,573,000)
27	KECAMATAN BULU	110,938,000	-	-	-	-	-	-	110,938,000
28	KECAMATAN LASEM	(34,160,000)	-	-	-	-	-	-	(34,160,000)
29	KECAMATAN PANCUR	(53,606,000)	-	-	-	-	-	-	(53,606,000)
30	KECAMATAN SLUKE	(141,690,000)	-	-	-	-	-	-	(141,690,000)
31	KECAMATAN PAMOTAN	(57,988,000)	-	-	-	-	-	-	(57,988,000)
32	KECAMATAN GUNEM	(115,604,000)	-	-	-	-	-	-	(115,604,000)
33	KECAMATAN SALE	-	-	-	-	-	-	-	-
34	KECAMATAN KRAGAN	(14,524,000)	-	-	-	-	-	-	(14,524,000)
35	KECAMATAN SEDAN	(260,294,000)	-	-	-	-	-	-	(260,294,000)
36	KECAMATAN SARANG	(138,958,000)	-	-	-	-	-	-	(138,958,000)
37	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	48,851,000	-	-	-	-	-	-	48,851,000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	(86,176,000)	-	-	-	-	-	-	(86,176,000)
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	(222,869,000)	-	-	-	-	-	-	(222,869,000)
40	DINAS ESDM	(124,896,000)	-	-	-	-	-	-	(124,896,000)
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	(267,645,000)	-	-	-	-	-	-	(267,645,000)
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(325,585,000)	-	-	-	-	-	-	(325,585,000)
JUMLAH		4,830,103,989	-	(723,000,000)	6,970,076,000	(1,328,287,000)	532,625,000	(500,000,000)	9,781,517,989

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	HASIL PEMBAHASAN BERTAMBAH (BERKURANG)							JUMLAH
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	
1	2	43 = 27-11	44 = 28-12	45 = 29-13	46 = 30-14	47 = 31-15	48 = 32-16	49 = 33-17	50 = 43+44+45+46+47+48+49
1	DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RSUD dr R. SOETRASNO	-	-	-	-	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BAPPEDA	-	-	-	-	-	-	-	-
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	-
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	-	-	-	-	-	-	-	-
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	-	-	-	-	-	-	-	-
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SATPOL PP	-	-	-	-	-	-	-	-
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SETDA	-	-	-	-	-	-	-	-
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	-	-	-	-	-	-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	166,000,000	-	-	3,668,934,000	558,166,000	(75,000,000)	-	4,318,100,000
a	(SKPD)	166,000,000	-	-	-	-	-	-	166,000,000
b	(PPKD)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	-	-	3,668,934,000	558,166,000	(75,000,000)	-	4,152,100,000
21	BKD	-	-	-	-	-	-	-	-
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	-	-	-	-	-	-	-	-
23	KECAMATAN REMBANG	-	-	-	-	-	-	-	-
24	KECAMATAN KALIORI	-	-	-	-	-	-	-	-
25	KECAMATAN SULANG	-	-	-	-	-	-	-	-
26	KECAMATAN SUMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
27	KECAMATAN BULU	-	-	-	-	-	-	-	-
28	KECAMATAN LASEM	-	-	-	-	-	-	-	-
29	KECAMATAN PANCUR	-	-	-	-	-	-	-	-
30	KECAMATAN SLUKE	-	-	-	-	-	-	-	-
31	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-	-	-	-	-	-
32	KECAMATAN GUNEM	-	-	-	-	-	-	-	-
33	KECAMATAN SALE	-	-	-	-	-	-	-	-
34	KECAMATAN KRAGAN	-	-	-	-	-	-	-	-
35	KECAMATAN SEDAN	-	-	-	-	-	-	-	-
36	KECAMATAN SARANG	-	-	-	-	-	-	-	-
37	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	-	-	-	-	-	-	-	-
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	-	-	-	-	-	-	-	-
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	-	-	-	-	-	-	-	-
40	DINAS ESDM	-	-	-	-	-	-	-	-
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		166,000,000	-	-	3,668,934,000	558,166,000	(75,000,000)	-	4,318,100,000

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2013**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG
Rembang, 27 September 2013
DIBACAKAN OLEH : EDI KATONO. SPd, MII.**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang;
telp. (0295) 691194; 693290; 693291

PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEKOKRAT

A T A S

HASIL PEMBAHASAN RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2013

Jum'at, 27 September 2013

Dibacakan oleh :

EDI KARTONO, S.Pd, MH

Assalamualaikum Wr.Wb.

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati , Wakil Bupati .
2. Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang .
3. Saudara Ketua pengadilan Negeri dan pengadilan Agama Rembang.
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang .
5. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
6. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang berserta Staf.
7. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM , rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Allah SWT . bahwa di pagi hari ini kita masih diberi Rahmat dan hidayahNya yang berupa kesehatan sehingga kita masih dapat bertemu dan bertatap muka dalam Rapat Paripurna Tentang Persetujuan DPRD Atas Hasil Pembahasan Raperda perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013.

Setelah melalui rangkaian jadwal mulai dari penyampaian KUAPPA, RAPBD sampai dengan pembahasan ditingkat komisi-komisi serta BANGGAR, sehingga RAPBD Perubahan tersebut ada beberapa perubahan baik pergeseran, pengurangan serta penambahan. Hal tersebut merupakan wujud dari kesungguh-sungguhan kami dalam merasionalisasi dan efesiensi anggaran untuk kepentingan masyarakat Rembang pada umumnya.

Bupati,Wakil Bupati Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohkim kami fraksi Demokrat menerima dan menyetujui RAPBD perubahan tahun 2013 untuk ditetapkan sebagai perda perubahan APBD 2013.

Namun ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai masukan untuk ditindaklanjuti antara lain :

1. Mohon kepada saudara Bupati agar Jabatan yang kosong di jajaran Dinas Pendidikan segera diisi.
2. Dengan adanya asumsi kenaikan PAD diharapkan benar-benar bisa terpenuhi sesuai angka yang ditetapkan.
3. Mohonh Pemerintah Daerah agar mengagarkan BOP untuk bantuan keuangan dari propinsi, karena setiap tahun pasti mendapat bantuan tersebut walaupun besarnya anggaran hanya bersifat estimasi.

Bupati, Wakil Bupati Peserta Rapat Paripurna yang terhormat.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Demokrat kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati Saudara Ketua dan

Wakil Ketua dan segenap tamu undangan kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini .

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab membangun masyarakat , bangsa dan negara.

Terima kasih, sebelumnya kami mohon maaf .

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Rembang, 27 September 2013

**FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

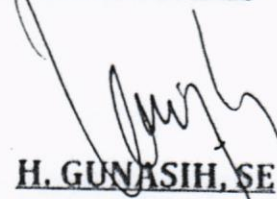
KETUA



H. ISLAHUDDIN



SEKRETARIS



H. GUNASIH, SE

PENDAPAT FRAKSI
FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD KABUPATEN REMBANG



atas
Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang
APBD Perubahan Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2013



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

Sekretariat: DPRD Rembang, Jl. Diponegoro No.88, Rembang 59212

PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD KABUPATEN REMBANG

atas

Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Rembang

Hari Jum'at, 27 September 2013
Juru Bicara: GATOT PAERAN, SH, MSi.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Pimpinan rapat dan hadirin yang terhormat.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum Fraksi kali ini, perkenankanlah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan selamat kepada Jemaah Calon Haji dari Kabupaten Rembang yang mulai hari ini berangkat ke Tanah Suci, semoga senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran selama melaksanakan ibadah dan pulang menjadi haji mabrur.... Amin.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Setelah melalui pembahasan antara komisi-komisi bersama SKPD terkait dan dilanjutkan pembahasan antara TAPD bersama Banggar DPRD maka saatnya kami menyampaikan pendapat Fraksi Partai

GOLKAR atas hasil pembahasan RAPBD Perubahan Kabupaten Rembang TA 2013 sbb.

- Kami meng-apresiasi tekad Pemerintah Kabupaten Rembang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) hampir 12,5 %, dalam APBD Perubahan ini. Peningkatan ini diperoleh dari sektor pertambangan, perikanan, IMB, PBB, BPHTB dll. Kepada SKPD pemungut PAD , kami berharap hendaknya bekerja lebih keras agar bisa mencapai target yang ditetapkan namun tanpa memberatkan masyarakat.
- Sampai akhir Agustus 2013 ini penyerapan APBD 2013 oleh SKPD baru mencapai 50 %. Dengan bertambahnya anggaran melalui APBD Perubahan ini hendaknya pemerintah bekerja cepat, karena waktu pelaksanaan yang singkat; namun tetap berhati-hati dalam membelanjakan uang rakyat, digunakan sesuai peruntukannya agar tidak terjadi pemborosan atau mengambil untung demi kepentingan pribadi.
- Setelah retribusi dari pelelangan ikan di TPI masuk Kas Daerah (APBD), maka bagian atau tabungan yang menjadi hak nelayan dikururkan dalam bentuk Bantuan Sosial. Hal ini kami rasa kurang tepat, karena prosedurnya harus sesuai dengan mekanisme APBD. Untuk itu kami mengusulkan agar dicari solusi yang paling tepat sehingga hak nelayan terpenuhi dengan baik.

Pimpinan rapat dan hadirin yang terhormat.

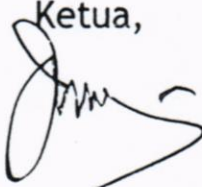
Menutup pendapat fraksi ini kami mengutip piweling Begawan Abiyasa ketika Raden Puntadewa diwisuda menjadi Raja Amarta sbb. *"Wong kang darbe panguwasa, menawa arep nibakake pitenah utawa paukuman marang wong kang luwih endhek palungguhane iku paribasan suwe mijet wohing ranti. Nanging ngertenana, wong luhur kang gelem nyanak, ngraketi lan ngajeni wong cilik iku ora bakal ilang kaluhurane"*.

Bila ada kata-kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

Ketua,


H. ISMARI



Sekretaris,


JOKO SUSILO

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
HARI : JUM'AT
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2013
Dibacakan oleh :

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro no.88 Rembang Telp. (0295) 693292

PENDAPAT AHIR FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
TERHADAP RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2013

Disampaikan oleh :

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Yang terhormat Saudara Bupati dan wakil Bupati Rembang

Yang terhormat Saudara Muspida kabupaten rembang

Yang terhormat Saudara ketua pengadilan Negeri Rembang

Yang terhormat Saudara ketua pengadilan Agama Rembang

Yang terhormat saudara sekda, asisten sekda dan staf ahli Bupati Rembang

Yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Rembang

Yang terhormat Saudara pimpinan parpol, ormas, LSM dan wartawan di kabupaten Rembang.

Mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini perkenankanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan taufik,

hidayah dan karuniaNya kita dapat bertemu kembali dalam rapat paripurna DPRD kabupaten Rembang untuk menyampaikan pendapat ahir terhadap RAPBD perubahan tahun anggaran 2013. Harapan kami semoga pertemuan kita pada hari ini dapat membuahkan keputusan yang betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat Rembang. Dan pada kesempatan ini pula kami dari fraksi partai Persatuan Pembangunan mengucapkan selamat kepada seluruh jamaah haji kabupaten Rembang semoga dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan sempurna agar menjadi haji yang mabrur.

Saudara Bupati, wakil Bupati, dan rapat Dewan yang terhormat.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2013 hendaknya dapat kita jadikan pengalaman bagi kita semua sehingga diharapkan kekurangan-kekurangan yang belum bisa dilaksanakan pada tahun Anggaran tersebut, dapat diperbaiki dan lebih ditingkatkan pada tahun Anggaran berikutnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terus menerus dan terintegrasi sehingga tujuan pembangunan Daerah secara menyeluruh akan dapat terwujud.

Situasi yang kondusif di kabupaten Rembang hendaknya tetap kita pertahankan, keberhasilan ini tidak semata-mata keberhasilan aparat keamanan saja, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat Rembang secara keseluruhan. Oleh karena itu kedepan diharapkan bisa lebih kita tingkatkan lebih-lah lebih menjelang pemilu tahun 2014. Mari kita kedepankan kebersamaan diantara kita semua. BAJU, BENDERA boleh berbeda tetapi tujuan tetap sama. Yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah suatu nikmat dan karunia Allah

o

karena sampai saat ini sebagian ada yang masih belum tersentuh sama sekali.

6. Kami masih melihat adanya kegiatan-kegiatan Pemerintah yang belum di laksanakan, padahal menurut hitungan waktu mestinya sudah selesai. Untuk itu mohon segera di selesaikan.
7. Mohon perhatian Pemkab terhadap jalan-jalan yang rusak lebih-lebih poros jalan antar Kecamatan untuk segera di perhatikan.

Saudara Bupati, wakil Bupati dan rapat Dewan yang terhormat.

Setelah kami mengikuti dan mencermati proses pembahasan RAPBD perubahan Kabupaten Rembang tahun Anggaran 2013, fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan mengucapkan BISMILLAHIRRAHMANIRROHIM dapat menerima dan menyetujui RAPBD perubahan tahun Anggaran 2013 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.





PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Pendapat Akhir

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013**

disampaikan oleh puji santoso

Pada Sidang Paripurna DPRD kabupaten Rembang, Jum'at, 27 September 2013

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Yang kami Hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami Hormati, kawan-kawan pers, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang berbahagia.

Untuk mengawali pendapat akhir kami terhadap raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2013 ini perkenankan kami mengucapkan Selamat menunaikan ibadah haji 1434 h bagi jamaah haji kabupaten Rembang yang tergabung dalam kloter 45 dan 46. Pagi ini para jamaah sudah mulai berangkat menuju Haramain menunaikan panggilan Allah SWT. *Allahumma hajjan mabrura, wa sya'yan masykura, wa danban maghfuro, wa tijarotan lan tabur.* Semoga menjadi haji yang mabrur. Haji yang mampu memberi manfaat lebih banyak kepada masyarakat di kabupaten Rembang. Mudah mudahan ummat Islam yang berada di ruangan atau majlis ini segera dapat juga menunaikan ibadah haji. Amiin.

Perkenankan kami, Fraksi Kebangkitan Bangsa menyampaikan selamat berhari jadi Polisi lalu lintas 23 September semoga mampu menertibkan lalu lintas agar tak ada lagi anak anak yang belum saatnya memiliki SIM sudah mengendarai motor/mobil di jalan raya.

Kami juga mengucapkan selamat berhari Tani semoga membuka kesadaran semua pihak tentang negara kita yang agraris tetapi kita ingin menjadikannya negara industri yang tak berbasis pertanian. Hari Tani semoga memberikan makna untuk membangun kembali ketahanan pangan kita yang pernah sangat kuat, kita ingat swasembada pangan yang

didukung oleh keberpihakan pengambil kebijakan untuk mempertahankan lahan lahan pertanian produktif dan menghidupkan kembali lahan tidak produktif dengan mengupayakan pengelolaan sumberdaya air. Mari dalam hari tani ini kita bangun kesadaran baru dalam mempertahankan dan menemukan sumberdaya air yang ada di perut bumi. Membangun kesadaran untuk melindungi sumber mata air dengan tidak merusak hal hal yang menyebabkan punahnya sumber mata air.

Sidang Dewan Yang Kami Hormati

Di bidang perencanaan pembangunan, kami berharap Pemkab mampu menyusun perencanaan secara teliti agar tidak muncul lahirnya bangunan-bangunan yang tidak memenuhi persyaratan, alias gampang rusak. Beberapa bangunan yang cepat rusak banyak terjadi pada bangunan talud yang menyebabkan air tidak mengalir, kualitas bangunan yang asal asalan, kualitas bahan baku yang tidak sesuai standard. Juga bangunan jalan yang mudah rusak ataupun pembangunan saluran yang tak berfungsi.

Termasuk hal ini adalah jalan jalan hotmix mulus yang disosialisasikan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena saat ini telah mengalami kerusakan berat. Entah berapa kali terjadi kecelakaan akibat jalan yang bertubang lubang dan rusak ini.

Dalam hal ini patut disampaikan pernyataan sahabat Ali ibn Abi Tholib r.a "Andaikata ada keledai jatuh terpeleset di salah satu jalan yang ada di Baghdad ini, aku takut kalau nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT : mengapa tak kau perbaiki jalan itu?". apalagi jika yang menjadi korban adalah manusia.

Pimpinan Sidang dan Hadirin Yang Kami Mulyakan

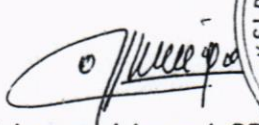
Kami juga memberikan apresiasi terhadap beberapa rekomendasi yang dihasilkan dalam pembahasan perubahan APBD tahun 2013 antara lain:

1. Untuk meningkatkan kinerja dan memperlancar kegiatan agar Saudara Bupati segera menunjuk pelaksana tugas pada Dinas Pendidikan ataupun dinas yang akan mengalami hal serupa.
2. Untuk mempersiapkan pembangunan puskesmas Sarang 2 agar dilakukan reklamasi terhadap lahan yang menjadi lokasi pembangunannya.
3. Terkait dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) perlu segera dilengkapi dengan mekanisme yang mampu mempercepat pelayanannya.

Selanjutnya, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* kami dapat menerima Raperda Perubahan APBD ini untuk selanjutnya dapat ditetapkan sebagai Perda Perubahan APBD.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rembang, 27 September 2013
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa


Muhammad Asnawi, SPdI
Ketua


Puji Santoso, SE
Sekretaris



Pendapat Akhir
FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN REMBANG

Terhadap:

Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013

Dibacakan Oleh;
SUPRIHADI

Pada Sidang Paripurna
DPRD KABUPATEN REMBANG
Jumat, 27 September 2013



FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

PENDAPAT AKHIR

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Rembang

Terhadap;

*Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013*

Dibacakan Oleh;

SUPRIHADI

**Assalamu'alaikum wa rohmatullahi wa barokatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
MERDEKA...!!!**

Yang terhormat, Saudara Bupati, Saudara Wakil Bupati, Saudara-Saudaraku Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
Yang terhormat, Saudara Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan Badan Musyawarah, Pimpinan Badan Kehormatan, Pimpinan Badan Legislasi Daerah, beserta seluruh Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
Yang terhormat, Saudara Sekretaris Daerah, Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang, Saudara Kepala Dinas, Para Kepala Bagian, para Kepala Kantor, Badan dan para staf di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang;
Para hadirin, Insan Pers dan tamu undangan Peserta Rapat Paripurna yang berbahagia.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Berbahagia,

Segala puja dan puji hanya milik Allah dan tiada pihak lain yang berhak selain hanya kepada Allah. Kami bersyukur, mengabdikan dan meminta hanya kepada Allah dan hanya kepada-Nyalah kami mohon pertolongan.

Sholawat dan Salam Ta'dzim semoga terhaturkan kepada junjungan seluruh ummat, Rosul Muhammad pembawa wahyu Allah, pelaku dan pemberi suri tauladan menuju insan kamil dan berakhlakul karimah.

7
Selamat jalan bagi saudara-saudaraku jama'ah haji Kabupaten Rembang, semoga selamat sampai tujuan, mampu menjalankan semua syarat dan rukun haji dengan baik, mengerjakan amaliyah-amaliyah terkait dengan baik, tiba di tanah air dengan selamat dengan membawa berkah haji mabrur dan mampu mengimplementasikan dalam sikap, perilaku, tindakan, ucapan dan perbuatan yang didasari oleh sifat-sifat kemabruran seorang haji.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Terhormat,

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Saudaraku Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang telah memerintahkan para SKPD termasuk TAPD Kabupaten Rembang dalam pembahasan Perubahan APBD tahun ini serta apresiasi yang tinggi sehingga pembahasan ini berjalan dengan baik dan lancar. Serta mohon maaf, jika selama pembahasan perubahan APBD ini ditemui adanya pergerakan maupun pergeseran di sana-sini.

Mengingat telah selesai pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 ini baik di tingkat Komisi maupun Badan Anggaran sehingga selangkah lagi masuk ke tahap pengesahan. Namun sebelum Raperda ini disahkan menjadi Peraturan Daerah, perkenankanlah Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami mendesak kepada Saudara Eksekutif, agar penggunaan anggaran Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan benar-benar dilaksanakan dengan cermat dan efisien serta lebih mengutamakan azas kebutuhan dan azas manfaat mengingat masih ditemukan jalan-jalan berlubang dan seolah tanpa tuan, tanpa ketersediaan anggaran, diantaranya;
 - Jalan Sarang – Sedan
 - Jalan Pandangan – Sedan
 - Jalan Sale – Pamotan
 - Jalan Gambiran, Pamotan – Njuwet, Sedan
 - Jalan Kragan – Sedan;
 - Jalan Lasem – Kajar;
 - Jalan Banyuurip – Japerejo – Lasem;
2. Mengingat telah ditemukannya ketidak lancaran dalam pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan akhir-akhir ini terlebih sehubungan dengan diselenggarakannya Pilkades Serentak yang diantaranya membutuhkan pelayanan legalisir bagi para Bakal Calon Kepala Desa dan pelayanan administrasi yang lain, maka sudah sepantasnya Saudara Bupati segera mengambil sikap atas temuan dimaksud guna memberikan solusi pelayanan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
3. Ditemukan pula indikasi kelangkaan obat pada Puskesmas-Puskesmas di wilayah Kabupaten Rembang sehingga sangat mengganggu bagi keluarga pasien untuk mendapatkan obat saat melakukan pengobatan dan perawatan di beberapa Puskesmas. Sehingga kami mendorong agar Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang segera melakukan pengadaan obat sebagaimana anggaran dan RKA yang telah direncanakan.

4. Seiring dengan ditemukannya kegaduhan sosial terkait dengan polemik pencairan dana bantuan sosial nelayan, kami mendesak kepada Saudara Bupati agar segera melakukan kajian ulang kemudian melakukan sosialisasi yang cukup terkait aspek normatif, aspek administratif dan aspek teknis mengingat secara historis bansos nelayan ini adalah beda dengan bansos-bansos yang lainnya.
5. Kami menangkap adanya keresahan dan ketegangan di tingkat bawah terkait dengan perubahan jadwal Pilkades serentak tahun 2013 ini yang diakibatkan oleh adanya sinyalemen inkonsistensi Saudara Eksekutif dalam perencanaan dan pelaksanaan.

Sekali lagi, hal-hal yang telah direncanakan oleh Eksekutif dan telah mendapat persetujuan bersama oleh Legislatif sehingga patut difahami sebagai sebuah komitmen bersama, hendaknya tidak lagi dirubah apalagi tanpa mengkonfirmasi kembali. Hal ini untuk menghindari terjadinya preseden buruk antar lembaga dan mengganggu harmonisasi kewilayahan.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi, ada kurang lebihnya mohon maaf. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohiem Fraksi sepakat Raperda ini dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

**Wassalamu'alaikum wa rohmatullahi wa barokatuh,
MERDEKA...!!!**

Rembang, 27 September 2013

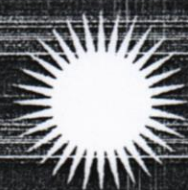
**F R A K S I
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA,


JASMANI

SEKRETARIS,


SUMARSIH



PE

RA

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KABUPATEN REMBANG
PENDAPAT AKHIR
TERHADAP
RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2013

Dibacakan Oleh : SUKARMAIN

Yang Terhormat,

Saudaraku Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Saudaraku Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Saudaraku Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Saudaraku Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Saudaraku Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor,

Kepala Bagian dan Camat Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Saudaraku Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pendapat Akhir dalam keadaan sehat.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *uswatun hasanah*, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. *Aamin*.

Saudaraku Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Beberapa hal yang perlu kami samaikan terkait dengan Raperda Perubahan APBD T.A 2013 adalah :

1. Pada Rancangan Perubahan APBD T.A 2013 terdapat kenaikan Belanja Daerah, untuk itu kami mengharapkan Pemerintah Daerah meningkatkan kinerja dalam rangka optimalisasi penyerapan belanja daerah, mengingat masa anggaran Tahun 2013 hanya menyisakan waktu 3 bulan (Oktober – Desember) saja. Terlebih pada Dinas Pendidikan, yang hingga saat sekarang belum ditunjuk Pelaksana Tugas kepala Dinas Pendidikan. Keterlambatan dalam mensikapi persoalan ini akan mengakibatkan rendahnya penyerapan dan berdampak pada pihak ketiga yang telah selesai melaksanakan kegiatan-kegiatan di Dinas Pendidikan.
2. Mencermati pelaksanaan Anggaran Bansos/Hibah Nelayan sebagai pelaksanaan Perda nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, kami melihat terdapat kesulitan pada tingkat teknis baik pada pemenuhan kriteria penerima bansos, pelaksanaan atau penyusunan laporan sesuai dengan Permendagri no 32 tahun 2011 dan perubahannya yaitu permendagri no 39 tahun 2012. Untuk itu, kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional mengusulkan agar dilakukan perubahan atas Perda nomor 4 Tahun 2009 dimana hak nelayan dipisahkan dari pengelolaan keuangan daerah dan dapat dikelola langsung oleh lembaga terkait seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau KUD Nelayan.

Saudaraku Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Meskipun belum terdapat penetapan perubahan pada rekening Bantuan Keuangan dari Provinsi, kami mengharapkan untuk dipersiapkan anggaran untuk pendampingan biaya

operasional pelaksanaan anggaran tersebut. Mengingat biaya operasional satu hal yang tidak terpisah dalam kelancaran pelaksanaan sebuah kegiatan.

Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Partai Amanat Nasional dan kami menyetujui Raperda Perubahan APBD T.A 2013 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Kami harapkan APBD dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat bermfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Rembang.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 27 September 2013

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KAB. REMBANG

Ketua



JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE.



Sekretaris



MOH. IMAM ZARKASI

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS

OFFICE OF THE DEAN

1100 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILLINOIS 60637

TEL: 773-936-5000

FAX: 773-936-5001

WWW.CHICAGOEDU.EDU

ADMISSIONS

1100 EAST 58TH STREET



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2013**



REMBANG, 27 SEPTEMBER 2013

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**



REMBANG, 27 SEPTEMBER 2013



**FRAKSI BINTANG KEADILAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl.P.Diponegoro No.88 Rembang (0295) 691194 Kode
Pos 59251**

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Jumat , 27 september 2013

Dibacakan oleh : H. ACHMAD ZAMHURI

بسم الله الرحمن الرحيم

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

Yang kami hormati saudara BUPATI dan WAKIL BUPATI beserta jajarannya

Yang kami hormati Pimpinan DPRD beserta seluruh anggota

Yang kami hormati jajaran Muspida dan semua undangan yang kami mulyakan, dan Seluruh Masyarakat Rembang yang kami banggakan

Segala Puji Bagi Alloh SWT, Penguasa dan Pengendali alam semesta , atas segala curahan nikmat , rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Untuk kita jadikan bekal guna menjadi wakilNya (kholifatullah fil ardi) dalam mengelola sumberdaya alam dan masyarakat sehingga kemanfaatan optimal dapat di rasakan oleh semua.

Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi dan Rosul yang mulia, Muhammad SAW , yang Alloh SWT sengaja mengutusNya kepada manusia agar kita dapat meneladaninya untuk menghadirkan bagi harmoni dalam kehidupan ini sehingga rahmat dapat dirasakan oleh semua (Rahmatallil'alam).

Dalam kesempatan berbahagia ini, kami juga mengucapkan selamat jalan kepada calon jemaah haji Kabupaten Rembang khususnya pada saudara kami dr. ROCHMAD ISNAINI dan Ibu DHIAN RAHWENI DEWI, SE. semoga di dalam menjalankan ibadah Haji dapat menjalankan syarat dan rukun Haji dan kembali ke Rembang dengan membawa gelar Haji Mabrur Mabrullah.

Hadirin sidang paripurna yang kami hormati .

Di dalam pendapat akhir Fraksi atas pembahasan perubahan RAPERDA APBD 2013 , FBK dapat menerima hasil pembahasan RAPERDA perubahan APBD 2013 untuk di sahkan menjadi PERDA Perubahan APBD 2013, dengan beberapa rekomendasi sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Dalam bidang pendapatan.

mestinya masih banyak lagi potensi-potensi yang masih bisa digali oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, di antaranya ;

- a. Deviden dari RBSJ yang pada tahun 2013 belum menyetorkan Kas Daerah dengan alasan belum adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sampai dengan saat ini. padahal kalau kita melihat potensi dari SPBU milik RBSJ serta operasional pelabuhan umum Rembang dapat diindikasikan adanya potensi pendapatan daerah. untuk itu FBK merekomendasikan agar RUPS segera di gelar dan deviden RBSJ untuk segera disetor ke kas daerah.

b. SPBN yang dibangun di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Rembang yang terletak di sebelah utara TPI Tasik Agung Rembang belum ada shering pendapatan dengan Pemerintah Kabupaten Rembang, padahal usaha ini menggunakan fasilitas lahan milik PEMKAB.

kedepan dalam pengelolaan SPBN ini ada shering Pendapatan dengan Pemkab Rembang.

2. Dalam bidang Perencanaan

pembangunan TPI di Tasik Agung harap lebih cermat di dalam perencanaannya. ketidak cermatan didalam perencanaan ini mengakibatkan sering berpindahnya TPI Tasik Agung, seiring dengan perkembangan reklamasi laut.

3. Dalam bidang Kesehatan

a. Semakin maraknya penderita penyakit HIV/AIDS di kabupaten Rembang. maka Pemerintah Kabupaten diharapkan untuk melakukan upaya yang maksimal guna mencegah meluasnya penyakit HIV/AIDS dengan kegiatan lintas sektoral.

b. Agar DKK menertibkan bidan praktek swasta yang melakukan penarikan kepada Ibu- ibu peserta Jampersal.

Hadirin Sidang paripurna yang kami Hormati.

Demikian Pendapat Fraksi Bintang Keadilan yang kami sampaikan ,
semoga memberikan manfaat kepada masyarakat Rembang. Sekian
dan terima kasih.

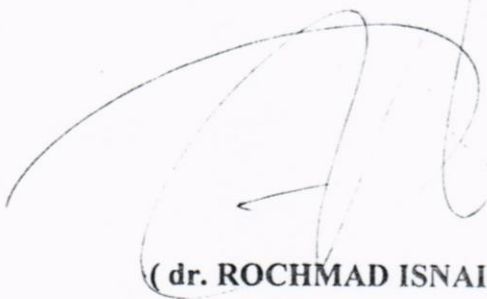
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

Rembang, 27 September 2013

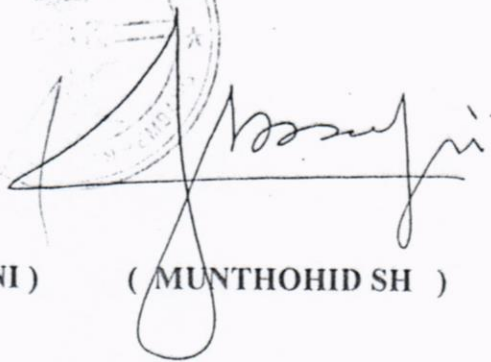
FRAKSI BINTANG KEADILAN

Ketua

Sekretaris



(dr. ROCHMAD ISNAINI)



(MUNTHOHID SH)



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA RAPAT PARIPURNA
PENETAPAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**
Rembang, 27 September 2013

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Ykh. - Ketua DPRD Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Para Ketua Komisi dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Rekan-Rekan Forkopimda Kab. Rembang ;
- Ykh. - Wakil Bupati Rembang ;
- Ykh. - Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan
Kabag. di Lingkungan Setda Kabupaten
Rembang ;
- Ykh. - Kepala SKPD se Kab. Rembang ;
- Ykh. - Para Camat dan Hadirin sekalian yang
berbahagia.

Mengawali pertemuan kali ini perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya-lah kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka ***Penetapan Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013***, dalam keadaan sehat wal'fiat tiada kurang suatu apa.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Kita sadari bahwa dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini banyak terjadi perubahan yang berarti, pada semua tatanan kehidupan. Hal ini merupakan dampak pelaksanaan demokrasi yang semakin luas dan berkembang semakin baik di negara kita. Proses demokratisasi ini berdampak pula pada semua aspek sistem ketatanegaraan, termasuk juga pada pengelolaan keuangan.

Paradigma pengelolaan keuangan daerah yang menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja,

berpengaruh terhadap tahapan penyusunan anggaran, yang di dalam proses perencanaannya harus dilandasi transparansi dan akuntabilitas, serta secara ekonomi, efisien dan efektif mampu mencerminkan pengelolaan keuangan dalam rangka memberikan fungsi pelayanan publik secara utuh.

Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 ini, pada setiap program yang akan dilaksanakan nantinya dapat memberikan *output* dan *outcome* dengan kuantitas dan kualitas yang terencana dan terukur.

Hal ini merupakan implementasi dari fungsi perencanaan, fungsi koordinasi dan motivasi serta fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan strategi kinerja Pemerintah Daerah sebagai bentuk manajemen koordinasi yang baik.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, esensi dari Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 adalah karena diperlukannya penyesuaian program dan kegiatan untuk peningkatan kinerja

penyelenggaraan urusan pemerintahan, dengan indikator perubahan yang memberi manfaat, perubahan yang lebih efisien dan tepat sasaran, perubahan APBD yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan dan kemandirian masyarakat serta penyerapan anggaran yang lebih baik.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, kita bersama telah melaksanakan koordinasi dan pembahasan yang sistematis dan terencana baik pada tingkat komisi maupun Badan Anggaran, dalam rangka untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap setiap perencanaan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam program dan kegiatan, serta besaran Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

Rancangan Anggaran Pendapatan pada Perubahan APBD tahun 2013 sebesar Rp.1.122.999.341.196,- (*Satu trilyun seratus dua*

puluh dua milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu Seratus Sembilan puluh enam rupiah), mengalami peningkatan sebesar 1,35% dari APBD tahun 2013 sejumlah Rp.1.108.077.978.224,- (Satu trilyun seratus delapan milyar tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), maka terdapat kenaikan sebesar Rp.14.921.362.972,- (Empat belas milyar Sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)

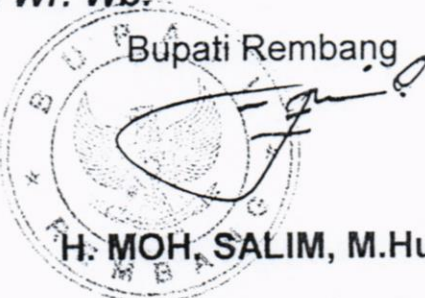
Selanjutnya untuk Rancangan Perubahan Anggaran Belanja APBD Tahun 2013 sebesar Rp.1.185.345.857.409,- (*Satu trilyun seratus delapan puluh lima milyar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan rupiah*) mengalami peningkatan sebesar 5,67 %, dibanding anggaran belanja APBD tahun 2013 sebesar Rp.1.121.777.868.224,- (*Satu trilyun seratus dua puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus*

Berbagai masukan, saran, dan kritik konstruktif yang disampaikan Badan Anggaran maupun lintas Komisi DPRD baik secara kelembagaan maupun perorangan akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kedepan.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang. *Amin, amin, ya Robbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

H. MOH. SALIM, M.Hum

